



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

## KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA





# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

## KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran tahun 2024.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program yang kesemuanya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026 dan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dari RPD dan RKPD ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, serta untuk mengukur kinerja ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan pengukuran kinerja beserta dengan analisis terhadap keberhasilan, kegagalan, kendala, serta strategi ke depan yang dapat dilaksanakan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan atau meningkatkan capaian kinerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap realisasi capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan Tahun 2024, Indikator Tujuan dan Sasaran tercapai Sangat Memuaskan dengan Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan 391,80 % dan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 151,4 %. Pencapaian Kinerja ini didorong oleh adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari kendala atau hambatan yang dihadapi, namun dapat diminimalisir dengan berbagai upaya dan strategi. Adapun kendala atau hambatan yang mempengaruhi pencapaian akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dengan cara peningkatan kinerja melalui pengembangan inovasi, komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, serta masyarakat.



## Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan selama Tahun 2024 dimana dapat menjadi gambaran tentang Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan merupakan satu di antara upaya sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Di samping itu merupakan rangkaian pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*). Perlu diketahui bahwa tahun 2024 merupakan tahun awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selama tahun 2024 secara umum sudah berjalan baik, namun masih perlu peningkatan upaya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh aparatur sipil negara.

Kami mengharapkan saran dan kritik demi sempurnanya penyusunan laporan ini, yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan di tahun mendatang.

Penajam, 25 Maret 2025  
Bupati Penajam Paser Utara,  
  
H. Mudyat Noor, S.Hut

# Daftar Isi

Kata Pengantar	i	Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii	Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi		
A. Gambaran Umum Daerah	1	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
B. Kedudukan dan Fungsi Organisasi	4		
C. Sumber Daya Aparatur	5		
D. Permasalahan dan Isu Strategis	6		
E. Sistematika Penyajian	13		
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	16		
		A. Rencana Strategis	16
		B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	28
A. Hasil dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2024	31	<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	31
B. Capaian Kinerja Organisasi	33		
C. Realisasi Anggaran	108		
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran	109		
<b>BAB IV PENUTUP</b>	115		

Lampiran I	Rencana Kinerja Tahunan 2024
Lampiran II	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Lampiran III	Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Lampiran IV	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

## Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 .....	2
Tabel 1.2	Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 .....	2
Tabel 1.3	Permasalahan Daerah .....	7
Tabel 2.1	Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 - 2026 .....	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	28
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	31
Tabel 3.2	Rekomendasi dan Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 .....	32
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 .....	34
Tabel 3.4	Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	36
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan .....	42
Tabel 3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat .....	45
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja .....	50
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan .....	58
Tabel 3.9	Sepuluh Besar Penyakit di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 .....	60
Tabel 3.10	Faktor yang Mempengaruhi Usia Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 .....	61
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan .....	63
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender .....	66



Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan .....	69
Tabel 3.14	Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Tahun 2024 .....	73
Tabel 3.15	Hasil Evaluasi AKIP Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 .....	75
Tabel 3.16	Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 - 2024 .....	76
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien .....	79
Tabel 3.18	Hasil Evaluasi AKIP Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dan 2024 .....	80
Tabel 3.19	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik .....	82
Tabel 3.20	Laju Pertumbuhan PDRB Aas Harga Konstan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	84
Tabel 3.21	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalia .....	88
Tabel 3.22	Nilai Investasi Tahun 2020 - 2024 .....	90
Tabel 3.23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah .....	92
Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup .....	99
Tabel 3.25	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Ketahanan Kebencanaan .....	103
Tabel 3.26	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Km) Tahun 2020 - 2024 .....	105
Tabel 3.27	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Infrastruktur .....	106
Tabel 3.28	Perolehan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 .....	107
Tabel 3.29	Komposisi Belanja Tahun Anggaran 2024 .....	108
Tabel 3.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sasaran Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara 2024 .....	109

## Daftar Grafik

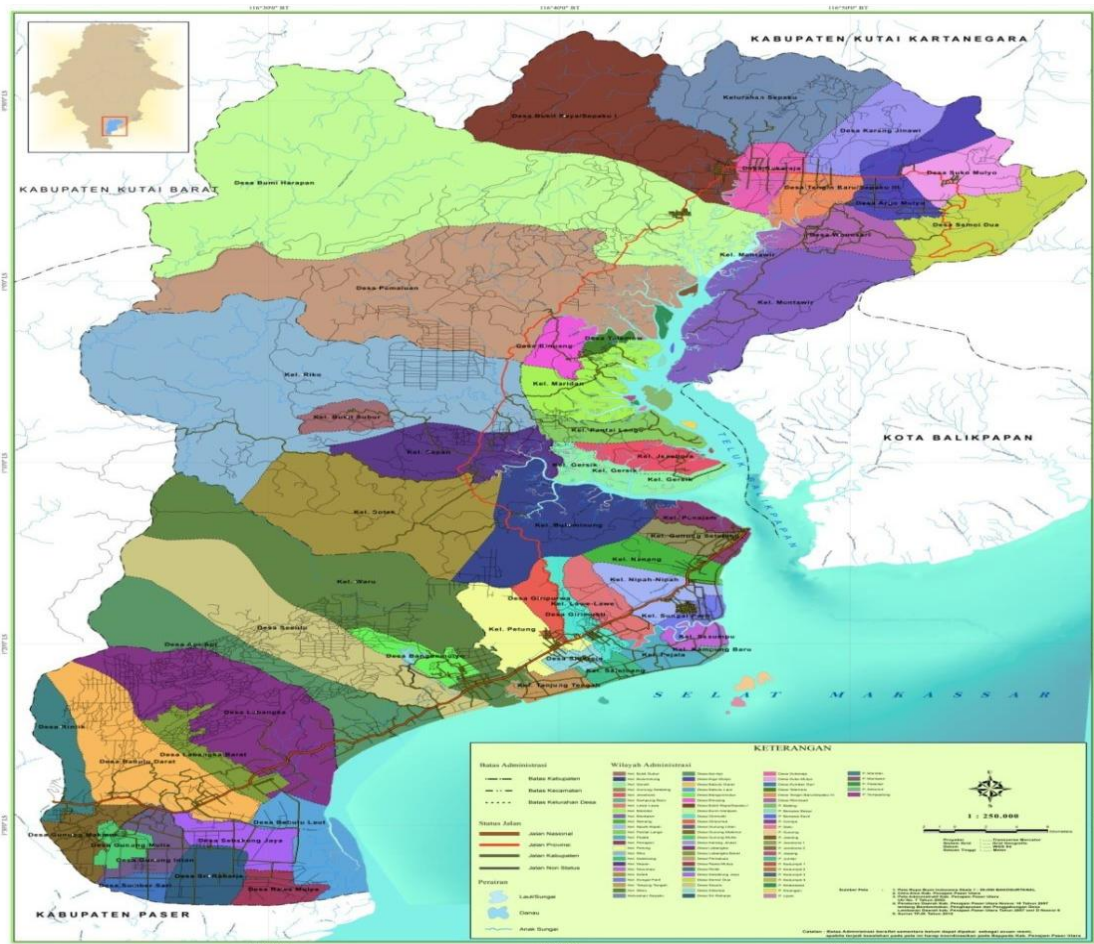
Grafik 1.1	Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	3
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Agama yang Dianut, Tahun 2024 .....	3
Grafik 1.3	ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024 .....	6
Grafik 1.4	ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2024 .....	6
Grafik 3.1	Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024 .....	34
Grafik 3.2	Persentase Kemiskinan Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	37
Grafik 3.3	Persentase Kemiskinan Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2024 .....	37
Grafik 3.4	Rasio Gini Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	38
Grafik 3.5	Rasio Gini Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	39
Grafik 3.6	Status Desa Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	43
Grafik 3.7	Indeks Desa Membangun Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	44
Grafik 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024	47
Grafik 3.9	Tingkat Kesempatan Kerja Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 ....	47
Grafik 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	48
Grafik 3.11	Indeks Pembangunan Manusia Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024	51
Grafik 3.12	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024.....	52
Grafik 3.13	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	54
Grafik 3.14	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2024 .....	54
Grafik 3.15	Rata-rata Lama Sekolah Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024.....	56





Grafik 3.16 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2024 .....	56
Grafik 3.17 Angka Harapan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024.....	59
Grafik 3.18 Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan TImur, Indonesia Tahun 2024 .....	60
Grafik 3.19 Prevalensi Stunting Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024	61
Grafik 3.20 Indeks Pembangunan Gender Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024	64
Grafik 3.21 Indeks Pembangunan Gender Penajam Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2023 ..	65
Grafik 3.22 Indeks Reformasi Birokrasi Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 ..	71
Grafik 3.23 Indeks SPBE Penajam Paser Utara Tahun 2022 - 2024 .....	72
Grafik 3.24 Indeks SPBE Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	73
Grafik 3.25 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 - 2024 .....	77
Grafik 3.26 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	77
Grafik 3.27 Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2024 .....	81
Grafik 3.28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .	83
Grafik 3.29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2024 .....	85
Grafik 3.30 LPE Non Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2023 .....	86
Grafik 3.31 Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	95
Grafik 3.32 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	96
Grafik 3.33 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024 .....	100
Grafik 3.34 Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/ Kota seKalimantan Timur Tahun 2024 .....	101





Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Penajam Paser Utara secara geografis terletak antara  $00^{\circ}48'29''$ - $01^{\circ}36'37''$  Lintang Selatan dan  $116^{\circ}19'30''$ - $116^{\circ}56'35''$  Bujur Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki luas wilayah  $3.333,06 \text{ Km}^2$  meliputi wilayah daratan seluas  $3.060,82 \text{ Km}^2$  dan wilayah lautan seluas  $272,24 \text{ Km}^2$ .

Secara administratif pemerintahan Kabupaten PenajamPaser Utara terbagi atas 4 kecamatan, 24 kelurahan dan 30 desa yang terdiri dari :

**Tabel 1.1 Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Penajam  
Paser Utara Tahun 2024**

Kecamatan Penajam	Kecamatan Waru	Kecamatan Babulu	Kecamatan Sepaku
Kelurahan Tanjung Tengah	Kelurahan Waru	Desa Gunung Makmur	Kelurahan Maridan
Kelurahan Saloloang	Desa Api-api	Desa Gunung Intan	Kelurahan Mentawir
Kelurahan Lawe-lawe	Desa Sesulu	Desa Sumber Sari	Kelurahan Pemaluan
Kelurahan Pejala	Desa Bangun Mulia	Desa Sri Raharja	Kelurahan Sepaku
Kelurahan Petung		Desa Rawa Mulia	Desa Telemow
Kelurahan Kampung Baru		Desa Sebakung Jaya	Desa Binuang
Kelurahan Sesumpu		Desa Babulu Laut	Desa Bumi Harapan
Kelurahan Sungai Parit		Desa Babulu Darat	Desa Wono Sari
Kelurahan Nipah-nipah		Desa Labangka	Desa Semoi Dua
Kelurahan Nenang		Desa Rintik	Desa Argo Mulyo
Kelurahan Gunung Seteleng		Desa Gunung Mulia	Desa Suko Mulyo
Kelurahan Penajam		Desa Labangka Barat	Desa Tengin Baru
Kelurahan Buluminung			Desa Suka Raja
Kelurahan Sotek			Desa Bukit Raya
Kelurahan Sepan			Desa Karang Jinawi
Kelurahan Riko			
Kelurahan Pantai Lango			
Kelurahan Gersik			
Kelurahan Jenebora			
Desa Girimukti			
Desa Bukit Subur			
Desa Sido Rejo			
Desa Giri Purwa			
<b>19 Kelurahan, 4 Desa</b>	<b>1 Kelurahan, 3 Desa</b>	<b>12 Desa</b>	<b>4 Kelurahan, 11 Desa</b>

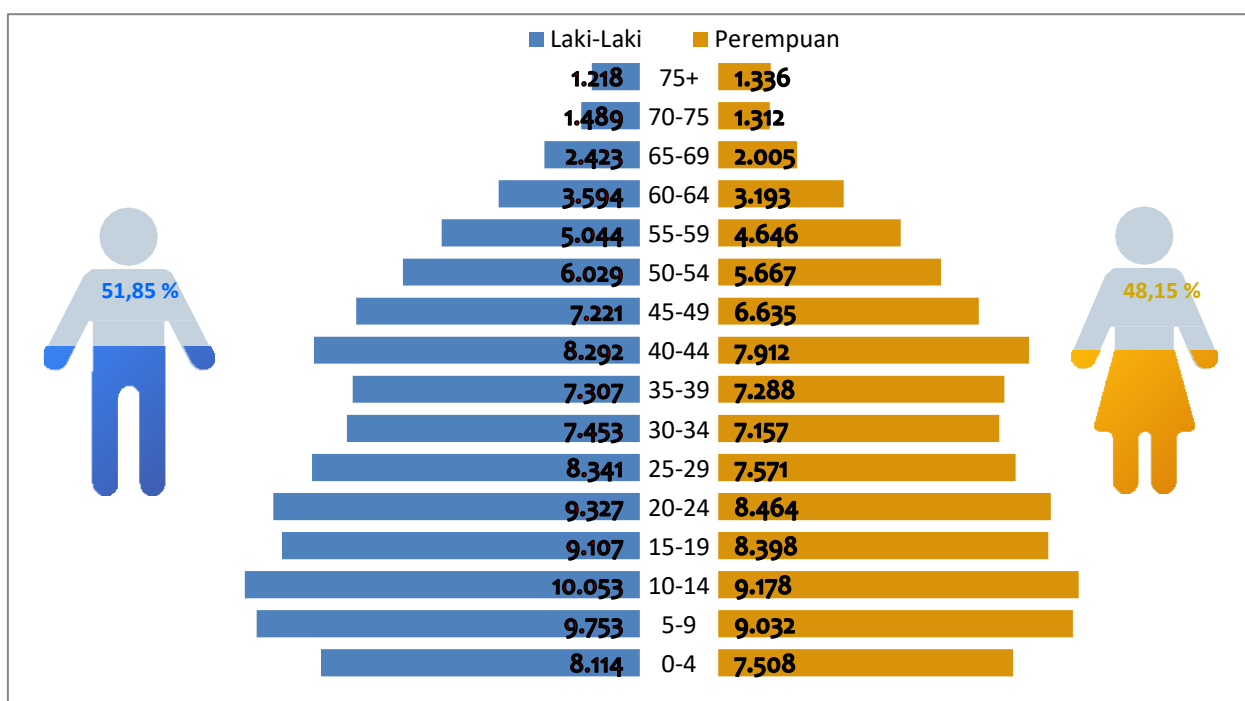
Jumlah penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berjumlah 202.067 jiwa. Penyebaran penduduk di masih belum merata di setiap kecamatan. Dengan melihat luas wilayah kecamatan dan jumlah penduduk, maka dapat dilihat kepadatan penduduk per km<sup>2</sup>, dapat dilihat pada tabel berikut :



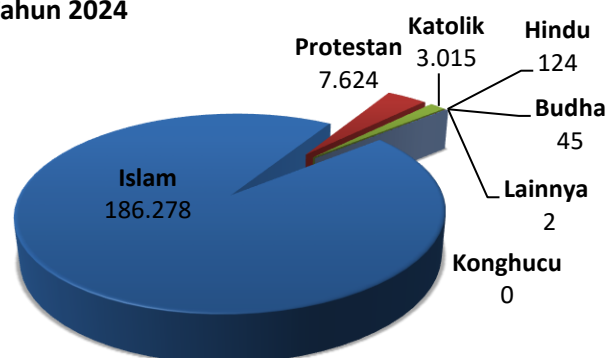
**Tabel 1.2 Penyebaran Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun 2024**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk	Kepadatan (per Km <sup>2</sup> )
Penajam	1.207,37	98.387	81,49
Waru	553,88	21.412	38,66
Babulu	399,45	40.591	101,62
Sepaku	1.172,36	41.677	35,55
<b>Total</b>	<b>3.333,06</b>	<b>202.067</b>	<b>60,63</b>

**Grafik 1.1 Penduduk Penajam Paser Utara Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2024**



**Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Penajam Paser  
Utara Menurut Agama yang Dianut, Tahun 2024**



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai kewenangan mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.



Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
10. Dinas Sosial
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Ketahanan Pangan
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Komunikasi dan Informasi
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip
23. Dinas Perikanan
24. Dinas Pertanian
25. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31. Rumah Sakit Umum Daerah
32. Kecamatan Penajam
33. Kecamatan Waru
34. Kecamatan Babulu
35. Kecamatan Sepaku

### **Sumber Daya Aparatur**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu ditunjang oleh sumber daya aparatur yang memadai. Satu di antara tiga kebijakan pemerintah provinsi dan juga kebijakan utama yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas masyarakat yang sebelum berlangsungnya otonomi daerah, masih ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi yang tak ternilai harganya dan sangat berperan dalam kelangsungan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya di masa yang akan datang.

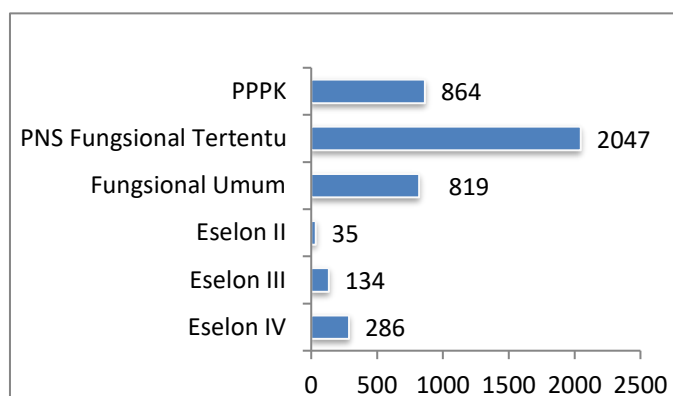




Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 berjumlah 4.185 orang, yang terdiri 3.321 Pegawai Negeri Sipil dan 864 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan gambaran komposisi aparatur menurut jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

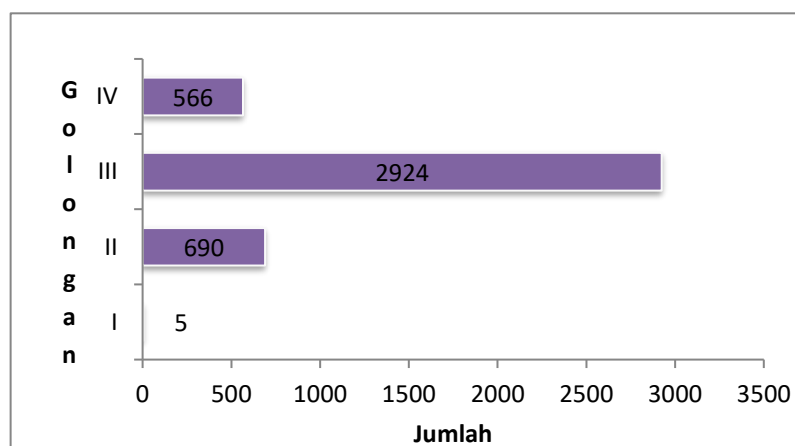
**a. Berdasarkan Jabatan**

**Grafik 1.3 ASN Berdasarkan Jabatan Tahun 2024**



**b. Berdasarkan Golongan**

**Grafik 1.4 ASN Berdasarkan Golongan Tahun 2024**



**D**

**Permasalahan dan Isu Strategis**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun

sebelumnya. Selain itu, mandatori pembangunan dari nasional maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola.

**Tabel 1.3 Permasalahan Daerah**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Masih rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pemerataan pelayanan pendidikan daerah	Kurangnya pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan
		Rendahnya kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan
		Masih tingginya keterbatasan masyarakat kurang mampu dalam mengenyam pendidikan PAUD/KB/TK
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan tingkat pendidikan
	Masih rendahnya pembudayaan olahraga dan pengembangan bibit-bibit olahragawan daerah	Masih rendahnya pembudayaan olahraga dan pengembangan bibit-bibit olahragawan daerah
	Belum optimalnya jaringan pelayanan kesehatan daerah	Belum meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas
		Masih terbatasnya kesiagaan pelayanan kesehatan yang terjangkau
		Belum optimalnya sistem dalam menjalankan SPM Kesehatan
		Masih tingginya angka stunting
	Lemahnya pengembangan kompetensi/keterampilan angkatan kerja	Masih kurangnya kualitas dan daya saing SDM angkatan kerja daerah
		Kurangnya <i>link and match</i> angkatan kerja dengan Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI)
		Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
		Minimnya kesempatan kerja
2. Masih tingginya angka kemiskinan	Lemahnya pemberdayaan kelompok rentan dan pembentukan kelembagaan sosial daerah	Ketidakpastian kehidupan yang layak dan bermartabat bagi kelompok rentan
		Tidak meratanya kesempatan bagi kelompok rentan dalam peningkatan sosial ekonomi
		Lemahnya sumber daya pembangunan bidang kesejahteraan sosial
3. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan hidup	Masih lemahnya kelembagaan Lingkungan Hidup dalam mendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Masih kurangnya pengelolaan persampahan
		Tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Tingginya potensi peningkatan emisi GRK akibat kebakaran lahan
	Masih lemahnya koordinasi kelembagaan dalam menangani bencana daerah	Minimnya kesiapan daerah dalam menghadapi bencana
		Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan memperkecil resiko bencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih rendahnya pemenuhan Rumah Layak Huni dan penanganan kawasan kumuh bagi masyarakat	Masih tingginya jumlah penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni
		Terbatasnya kemampuan penanganan kawasan kumuh
		Masih tingginya tingkat BABS masyarakat
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur sumber daya air	Masih terbatasnya kapasitas air baku daerah
		Belum optimalnya distribusi air bersih ke masyarakat
		Masih rendahnya penanganan jaringan irigasi dan drainase daerah
	Rendahnya konektifitas antar wilayah dalam mendukung ekonomi kawasan	Masih tingginya kebutuhan konektifitas wilayah khususnya dengan pusat kegiatan ekonomi dan Pertanian (dalam arti luas)
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur penunjang pelayanan prima pemerintahan bagi masyarakat	Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan Gedung untuk pemerintahan
	Belum optimalnya kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Belum selarasnya RTRW Kabupaten dengan RTRW Nasional dan Propinsi
		Belum optimalnya fungsi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Belum optimalnya transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat	Masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Minimnya sarana prasarana pendukung kepariwisataan
		Minimnya promosi produk wisata daerah
		Masih terbatasnya SDM penunjang kepariwisataan daerah
	Masih rendahnya kontribusi UMKM dan Koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Masih lemahnya daya saing produk UMKM
		Masih minimnya pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi IT dalam pemasaran
		Belum optimalnya kinerja kelembagaan Koperasi dan UMKM
		Masih rendahnya akses permodalan dalam pengembangan usaha
		Masih lemahnya pengelolaan pasar sebagai sarana promosi, distribusi dan pembentuk harga barang
	Masih rendahnya kapasitas produk dan produktivitas pertanian dalam mendukung pangan lokal	Belum optimalnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
		Terbatasnya kapasitas irigasi teknis dalam mendukung produktifitas pertanian
		Masih rendahnya nilai jual produk pertanian
	Masih rendahnya produksi pangan hewani lokal	Rendahnya produksi bibit/benih ternak
		Rendahnya produksi daging dalam pemenuhan pangan
	Masih rendahnya produksi perkebunan non kelapa sawit	Rendahnya produktivitas perkebunan non sawit
		Belum optimalnya nilai tambah dan harga produk di tingkat petani



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5. Tata kelola pemerintahan belum bertransformasi optimal dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat	Masih rendahnya produktivitas dan pemasaran hasil perikanan	Belum optimalnya produksi benih perikanan dalam menunjang produksi perikanan daerah Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam budidaya perikanan Masih rendahnya pengelolaan pasca panen dan nilai tambah produksi perikanan
	Belum optimalnya pelayanan perizinan penanaman modal (investasi) daerah	Masih minimnya pemanfaatan IT dalam pelayanan investasi daerah Kebijakan investasi daerah belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan realisasi investasi daerah
	Rendahnya nilai tambah industri pengolahan non pertambangan dan penggalian	Belum optimalnya perkembangan kawasan industri di Buluminung Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan sentra industri
	Masih rendahnya kapasitas Fiskal daerah dalam pendanaan pembangunan	Masih rendahnya pelayanan dan pengawasan sumber-sumber penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Belum optimalnya penggalan potensi penerimaan daerah
	Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan menuju Desa Mandiri	Rendahnya kapasitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Kurangnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintahan Desa
	Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dalam menghasilkan kebijakan yang unggul dan kinerja pemerintahan yang prima bagi pelayanan publik	Rendahnya kemampuan tata kelola sistem penyelenggaraan data dalam pelayanan pemerintahan
		Rendahnya implementasi pelayanan minimal (SPM) dalam pelayanan publik
		Masih rendahnya cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Masih rendahnya pemanfaatan IT dalam menjalankan manajemen pemerintahan
		Terbatasnya kapasitas SDM pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik yang prima
		Belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya pelayanan publik kependudukan
	Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam integrasi pelayanan publik	
	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya kinerja kelembagaan PUG dan PPA Terbatasnya ruang terbuka publik layak anak



Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Dari kajian terhadap permasalahan yang ada serta memperhatikan isu strategis internasional, nasional, provinsi dan daerah, teridentifikasi isu strategis daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Penajam Paser Utara 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif.

Penduduk Penajam Paser Utara pada berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 tercatat 178.681 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 92.506 Jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 86.175 jiwa. Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur diketahui bahwa penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh penduduk usia muda. Jumlah penduduk dengan usia produktif cukup mendominasi dalam komposisi penduduk secara keseluruhan sehingga dapat menjadi modal penting terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia secara umum di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kondisi ini juga menandai bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara juga relatif lebih besar dan dominan sehingga perlu dipikirkan mengenai jumlah dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berpengaruh terhadap produktivitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu jumlah penduduk dengan rentang usia balita hingga remaja juga cukup besar sehingga dapat menjadi fokus utama terhadap peningkatan sektor pendidikan yang akan menjadi modal dalam peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam pembangunan daerah. Aspek tersebut menjadi begitu penting karena tingginya kualitas, daya saing serta produktivitas sumber daya manusia dapat menentukan bagaimana kondisi daerah kedepannya. Sebagai upaya peningkatan kualitas, daya saing serta produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Penajam Paser Utara diperlukan optimalisasi bidang pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan non formal. Akan tetapi, terdapat beberapa



permasalahan yang muncul seiring dengan adanya potensi pertanian yaitu dari segi produksi pertanian hingga pemasaran produk pertanian. Para petani, khususnya petani padi di Kabupaten Penajam Paser Utara menggunakan sistem sawah tadah hujan, yang dimana sistem tersebut sangat mengandalkan kondisi alam dalam pemenuhan kebutuhan pengairan. Sehingga pada kondisi musim yang tidak menentu seperti kekeringan atau curah hujan tinggi, kemungkinan gagal panen akan semakin tinggi atau meningkat. Permasalahan lainnya adalah ketersediaan pupuk yang digunakan para petani sering kali terjadi kelangkaan yang diiringi dengan meningkatnya harga pupuk. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap biaya produksi petani yang tentunya berpengaruh terhadap harga jual (gabah atau beras). Selain itu, saat masa panen dengan produksi melimpah, petani seringkali kesulitan dalam memasarkan hasil panennya. Kondisi ini tentunya perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah maupun non pemerintah untum dapat membantu dari segi pemasaran hasil pangan.

## 2. Optimalisasi tatakelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Pelayanan publik menjadi hal penting dalam penerapan good governance di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelayanan publik yang murah, cepat, mudah serta didukung dengan teknologi informasi yang maksimal perlu diupayakan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara masih mengalami beberapa permasalahan utama yang menyebabkan belum maksimalnya pelayanan publik. Masih kurangnya tingkat keefektifan dan efisiensi dari segi waktu dan biaya pelayanan serta transparansi alur dan proses pelayanan menjadi permasalahan yang perlu segera ditingkatkan. Proses pelayanan publik dinilai masih belum efektif dan efisien khususnya dari segi waktu karena waktu pelayanan dapat mencapai waktu 1 bulan pada beberapa instansi. Selain itu, proses pelayanan terkesan rumit dan tidak transparan. Kondisi ini ditunjukkan dari tidak jelasnya alur pelayanan dan terkesan berbelit belit.

Pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri sudah didukung dengan adanya sistem informasi berupa Aplikasi GO PPU. Aplikasi tersebut dikelola oleh Disdukcapil yang diluncurkan pada bulan april tahun 2022. Akan tetapi, adanya aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.





3. Peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi pelayanan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Infrastruktur dasar pada umumnya terdiri dari infrastruktur listrik, telekomunikasi, jalan, sanitasi, air bersih dan drainase. Ketersediaan infrastruktur dasar yang optimal dapat mendukung dan meningkatkan akses masyarakat dalam menjangkau sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Infrastruktur air bersih di Kecamatan Penajam Paser Utara dinilai masih belum maksimal. Kondisi tersebut dapat diketahui dari persentase pelayanan air minum perpipaan di tahun 2022 yang masih berkisar di angka 25%. Hal ini terjadi karena masyarakat yang berada diluar cakupan PDAM yang tidak mendapatkan akses air bersih memilih untuk menggunakan sumber air lainnya seperti mata air, sumur, embung, penampungan air dan WTP. Pelayanan air bersih perlu ditingkatkan baik dari segi peningkatan cakupan rumah tangga yang terlayani maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Sedangkan untuk infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kondisi yang belum maksimal. Melihat dari kondisi jalannya, hanya sekitar 35% jalan yang memiliki kondisi jalan baik (mantap) sedangkan 65% lainnya masih termasuk kedalam kondisi jalan sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Berdasarkan kondisi tersebut tentunya perlu diusahakan untuk meningkatkan kondisi jalan menjadi kondisi baik yang bertujuan untuk meningkatkan aksibilitas antar wilayah dan mendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan hampir diseluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui keberadaan UPT-PU di keempat kecamatan. Mekanisme UPT-PU sangat membantu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik pada sektor infrastruktur bagi masyarakat. Meningkatkan infrastruktur daerah melalui prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan serta permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, daya saing dan iklim investasi.

Pembangunan Infrastruktur dasar akan menarik investasi masuk ke kawasan industri Buluminung (KIB) dan menjadikannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) Kalimantan Timur.



#### 4. Transformasi ekonomi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 sebesar 6,49 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2020 sebesar 6,60 triliun rupiah. Kondisi perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami penurunan dapat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga diperlukan adanya perbaikan sistem perekonomian yang dapat dipercepat oleh perbaikan kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang diikuti oleh peningkatan pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Selain itu dapat juga didukung dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan UMKM dengan dorongan bantuan pendampingan dan stimulan dana. Menanggulangi Kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kreatif kerakyatan, perekonomian berbasis perdesaan dan kelurahan serta kelompok Masyarakat minoritas, terpencil dan terpinggirkan melalui pembangunan desa dan kelurahan serta pembangunan kawasan pedesaan dan kelurahan.

#### E

#### Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 ini menyajikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama Tahun 2024 berdasarkan perjanjian kinerja dan perbandingan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya serta capaian terhadap kondisi akhir RPD tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah, di mana Tahun 2024 ini merupakan tahun awal RPD 2024-2026.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan gambaran umum daerah, kedudukan dan fungsi organisasi, Sumber Daya Aparatur, permasalahan umum dan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi, serta sistematika penyajian.

## Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar sasaran strategis daerah, dan perjanjian kinerja tahun 2024.

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

### A. Hasil dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2024

Pada sub bab ini disajikan hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN dan RB tahun 2024 beserta rekomendasi dan tindak lanjutnya.

### B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan kabupaten/ kota seKalimantan Timur, dan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
7. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.



### C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dibelanjakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran kaitannya dengan kinerja atas penggunaan anggaran.

## Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1). Rencana Kinerja Tahun 2024
- 2). Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 3). Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- 4). Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024



Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Pembangunan Daerah mencakup tujuan dan sasaran serta bagaimana cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

**A****Rencana Strategis****1.****Visi dan Misi**

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2023, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026. Di dalam RPD tersebut tidak memuat visi dan misi kepala daerah karena Kabupaten Penajam Paser Utara dipimpin oleh pejabat kepala daerah.

Visi pembangunan daerah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 – 2025 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Penajam Paser Utara Yang Berakhlak Baik, Mandiri, Sehat dan Sejahtera Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan”**

Dalam mewujudkan visi yang tercantum di dalam RPJPD Tahun 2024-2026 tersebut, ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi.**

Penajam Paser Utara dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kalimantan Timur, oleh karenanya untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi pertanian akan dilakukan terus menerus secara berkesinambungan. Revitalisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan dukungan kebijakan pemerintah akan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menyerap tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui revitalisasi pertanian, perkebunan dan pertanian, diharapkan tercipta suatu kegiatan integratif antara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan sampai pemasaran.

- 2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang produktivitas ekonomi masyarakat.**

Sebagai kabupaten baru, Penajam Paser Utara masih tertinggal dengan kabupaten lain yang lebih dulu berdiri dari sisi sarana prasarana, terutama untuk mendukung agrobisnis dan agroindustri. Sarana jalan yang memadai antara sumber-sumber produksi belum tersedia dengan baik yang menghubungkan dengan pasar, waktu yang dibutuhkan untuk menghubungkan masih terlalu lama. Posisi Penajam Paser Utara yang berhadap-hadapan dengan Balikpapan dapat dikatakan sebagai pintu masuk dari arah samarinda menuju Banjarmasin sehingga memiliki nilai strategis. Pewujudan jembatan yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Paser Utara sangat besar artinya bagi perkembangan peningkatan produktivitas perekonomian, mengingat Balikpapan merupakan kota penghubung melalui laut dengan Pulau Jawa. Sarana pelayanan publik merupakan modal dasar pembangunan di suatu pemerintahan daerah dan tersedianya infrastruktur sosial dasar, perhubungan, telekomunikasi, informasi dan energi. Dalam mendukung pembangunan agrobisnis sarana penelitian bidang pertanian, perkebunan dan perikanan perlu dibangun. Sarana dalam mendukung agrobisnis yang paling penting adalah sarana yang mendukung pengembangan bidang pertanian, perkebunan dan perikanan seperti tersedianya lahan pertanian dan perkebunan dalam rangka ekstensifikasi dan tersedianya Pangkalan Pendaratan Ikan serta Tempat Pelelangan Ikan.





**3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disiplin, bersih, berwibawa, professional dan bertanggungjawab, efisien dan efektif yang dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang prima.**

Mewujudkan visi Kabupaten Penajam Paser Utara dengan mengembangkan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan kinerja pelayanan prima di berbagai sektor publik, yang didukung perangkat daerah yang efektif dan efisien, aparatur yang bertanggung jawab dan berwibawa dalam suasana politik dan hukum yang kondusif dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara terus menerus dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penambahan skill, manajemen dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih secara profesional.

**4. Mewujudkan pembangunan agrobisnis subsistem budidaya dan subsistem hilir untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah serta menciptakan dasar pengembangan agroindustri berdasarkan keunggulan dan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.**

Kegiatan agroindustri adalah kegiatan yang mengandung kompleksitas sangat tinggi yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga pada rencana 20 tahunan ini penting untuk meletakkan dasar bagi pengembangan agroindustri. Sarana prasarana utama adalah ketersediaan jalan yang menghubungkan tempat produksi utama ke tempat pengolahan, irigasi yang memadai, jaminan listrik, kepastian hukum dan suasana yang kondusif. Agrobisnis merupakan suatu kegiatan integratif dari hulu hingga pemasaran yaitu sub sistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir dan subsistem pemasaran.

Potensi yang ada dan potensial untuk dikembangkan dalam sistem agrobisnis pada saat ini adalah subsistem budidaya dan subsistem hilir beserta pemasaran. Penajam Paser Utara sangat kaya dengan budidaya dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sub sistem hilir yang dapat dikembangkan dalam bentuk produksi barang setengah jadi dan barang jadi seperti pabrik pembuatan tepung tapioka dan pabrik pembuatan tepung ubi jalar.



**5. Menciptakan ekonomi kerakyatan yang maju dan berkesinambungan sebagai satu kesatuan dengan pembangunan agrobisnis dan agroindustri.**

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan koperasi (UMKMK) merupakan titik berat pembangunan agrobisnis dan agroindustri dimana secara umum UMKMK merupakan penopang ekonomi nasional dan mampu menyerap tenaga kerja. Penyiapan regulasi dan skim-skim pembiayaan UMKMK perlu dipersiapkan dengan matang. Dukungan kebijakan pemerintah bagi UMKMK dan UMKMK yang partisipatif yang ditunjukkan dengan profil UMKMK yang transparan dan akuntabel akan melahirkan sinergi pembangunan ekonomi kerakyatan. Sinergi pembangunan kerakyatan ini akan semakin menunjukkan tingkat keberhasilan apabila ada dukungan sektor swasta yang bisa diwujudkan seperti dalam sistem plasma, bapak angkat maupun bekerjasama dalam menyediakan pasar bagi hasil produksi UMKMK.

**6. Mengembangkan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan.**

Pengelolaan Lingkungan Hidup harus berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan harus dicegah baik itu pencemaran darat, laut maupun udara. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terlindunginya wilayah Penajam Paser Utara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pengembangan potensi wilayah yang tidak berwawasan lingkungan memang akan memberikan keuntungan secara besar dalam waktu singkat akan tetapi akan mengalami kerugian yang akan dialami dalam jangka waktu lama seperti pembabatan hutan sampai gundul, penggunaan pupuk secara berlebihan, penangkapan ikan dengan memakai alat peledak dan sebagainya.

**7. Mewujudkan sumber daya masyarakat Penajam Paser Utara yang maju dan berakhlak baik.**

Masyarakat yang maju dan berakhlak baik diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini diwujudkan dengan melaksanakan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan agama serta pelestarian kebudayaan. Sinergi dari berbagai program tersebut akan mewujudkan masyarakat Penajam Paser Utara yang maju, berakhlak baik dan memiliki daya saing.



**8. Mewujudkan jaringan infrastruktur transportasi dan prasarana utility yang handal dan terintegrasi satu sama lain di Kabupaten Penajam Paser Utara.**

Termasuk di dalamnya tersedianya pasokan energi listrik yang cukup untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, tersedianya air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri serta sistem informasi berbasis elektronik yang mampu mendorong produktifitas sektor – sektor ekonomi.

## **2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 -2026 terdapat 5 tujuan dan 14 sasaran pembangunan. Tabel dibawah ini menyajikan keterkaitan antara , tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan ini diharapkan dapat menjawab isu strategis pembangunan daerah.

**Tabel 2.1 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan  
RPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 -2026**

Isu Strategis/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing				
<b>Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan</b>				
		Persentase Kemiskinan		
		Rasio Gini		
S1.1	Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	1. Penyaluran BLT tepat sasaran 2. Perluasan perlindungan sosial
S1.2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa dan kelurahan	Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat
S1.3	Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan daya saing tenaga kerja	1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja 2. Sertifikasi angkatan kerja 3. Jaminan kesehatan ketenagakerjaan

Isu Strategis/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM				
		Indeks Pembangunan Manusia		
S2.1	Peningkatan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan	1. Peningkatan dan rehabilitasi sarpras Pendidikan 2. Beasiswa Kejar Paket, Siswa Sekolah dan Mahasiswa 3. Sertifikasi tenaga Pendidik
		Rata - Rata Lama Sekolah		
S2.2	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Penurunan angka Stunting
		Prevalensi Stunting		
S2.3	Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Peningkatan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Responsif Gender	1. Perluasan cakupan kampung KB aktif 2. Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan pembangunan Kota Layak Anak
S2.4	Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan	Perkuatan identitas warisan budaya daerah	Penyelenggaraan even budaya daerah
			Mengembangkan daya saing organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan	Mengembangkan potensi keolahragaan, kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan
Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi				
Tujuan 3. Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		
		Indeks SPBE		
S3.1	Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Unggul	1. Peningkatan pendidikan demokrasi masyarakat dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 2. Peningkatan Tata Kelola Organisasi Pemerintahan 3. Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan Pembangunan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
		Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Peningkatan upaya kemandirian keuangan pembangunan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah



Isu Strategis/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
S3.2	Peningkatan pelayanan prima kepada publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik</li> <li>3. Pengamanan Aset Tanah Pemerintah daerah secara Fisik dan Administrasi</li> </ol>
Transformasi Ekonomi Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat				
<b>Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing</b>				
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		
S4.1	Peningkatan kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	Peningkatan Kemandirian Pangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan daya saing komoditas unggulan perkebunan masyarakat</li> <li>2. Pengembangan produktifitas dan daya saing perikanan masyarakat</li> <li>3. Peningkatan daya saing produk ternak unggulan</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan pangan</li> </ol>
			Peningkatan Potensi Pariwisata Daerah	Pengembangan destinasi wisata khas lokal
			Revitalisasi Pembinaan, Pengelolaan dan Pola Pengembangan UMKM	Peningkatan daya saing pasar produk UMKM unggulan daerah
			Peningkatan Nilai Perdagangan & Jasa Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif</li> <li>2. Pemantapan jaringan distribusi dan stabilitas harga pasar bahan pokok</li> </ol>
S4.2	Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Pemantapan Kebijakan Kemudahan Investasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan investasi/ penanaman modal berbasis elektronik</li> <li>3. Pengembangan hilirisasi industri Kawasan buluminung, perlindungan areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan dan pemasaran serta amenitas pariwisata dalam rangka mendukung IKN</li> </ol>



Isu Strategis/ Tujuan/ Sasaran		Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi pelayanan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan				
<b>Tujuan 5.</b> Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan				
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		
S5.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
S5.2	Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Mengurangi Resiko Bencana	1. Peningkatan sarana prasarana siaga bencana 2. Peningkatan kapasitas masyarakat siaga bencana 3. Pemantapan pengendali banjir pada daerah irigasi.
S5.3	Peningkatan pelayanan infrastruktur	Persentase pemenuhan rumah layak huni	Peningkatan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1. Penataan bangunan perkantoran 2. Penataan permukiman daerah 3. Pemantapan layanan infrastruktur sumber daya air 4. Peningkatan kualitas konektivitas kewilayahan
		Persentase jalan Mantap		

Adapun strategi pembangunan yang akan dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

#### 1. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Strategi penanggulangan kemiskinan secara terpadu diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Strategi ini juga merupakan bentuk kontribusi terhadap penurunan kemiskinan secara regional Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Hal ini dapat dicapai dengan penyaluran BLT tepat sasaran dan perluasan perlindungan sosial terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### 2. Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Desa dan Kelurahan

Strategi kedua dalam rencana pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah terkait dengan pembinaan dan pengembangan kemandirian desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Untuk meningkatkan kemandirian desa, maka





dibutuhkan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat.

### 3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu aspek yang menentukan daya saing daerah. Adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan potensi yang dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan tenaga kerja jika diimbangi dengan tingginya daya saing tenaga kerja. Daya saing tenaga kerja dapat dicapai dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja, sertifikasi angkatan kerja, dan penyediaan jaminan kesehatan ketenagakerjaan.

### 4. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Pendidikan merupakan dasar dalam pembangunan suatu wilayah. Kualitas pembangunan ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia pada wilayah tersebut. Ketidakmerataan sebaran pelayanan fasilitas Pendidikan menyebabkan masih terdapatnya masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara yang belum melek huruf. Oleh karena itu arah kebijakannya adalah Peningkatan dan rehabilitasi sarpras pendidikan, beasiswa kejar paket, siswa sekolah dan mahasiswa, sertifikasi tenaga pendidik.

### 5. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek dasar yang harus dipenuhi dalam rangka pembangunan suatu daerah. Kemudahan akses terhadap layanan Kesehatan harus dirasakan oleh semua masyarakat. Selain itu, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan disuatu daerah adalah prevalensi stunting, dimana angka ini termasuk memiliki tren yang meningkat sejak tahun 2018 hingga 2021. Oleh karena itu, arah kebijakan dalam strategi ini adalah peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan penurunan angka stunting.

### 6. Peningkatan Pembangunan yang Berkeadilan dan Responsif Gender

Strategi peningkatan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender perlu dilakukan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab atas pembangunan kota layak anak. Selain itu, adanya penurunan persentase kesadaran masyarakat untuk ber-KB yang cukup signifikan juga menjadi perhatian dalam rangka pengendalian jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara.



Oleh karena itu arah kebijakan pada strategi ini difokuskan untuk perluasan cakupan kampung KB aktif dan optimalisasi pembangunan kota layak anak

#### 7. Perkuatan Identitas Warisan Budaya Daerah

Identitas budaya merupakan ciri khas atau kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Identitas warisan budaya daerah juga dapat menjadi daya tarik wisata bagi penduduk didalam maupun diluar daerah. Penguatan identitas warisan budaya daerah dapat dilakukan dengan penyelenggaraan even budaya daerah secara berkala.

#### 8. Pengembangan Daya Saing Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peran organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan sangatlah penting. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan daya saing organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan diperlukan pengembangan potensi kepemudaan dan kemasyarakatan.

#### 9. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Unggul

Pada strategi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul ini diarahkan pada peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

#### 10. Peningkatan Upaya Kemandirian Keuangan Pembangunan Daerah

Dalam upaya peningkatan kemandirian keuangan pembangunan daerah. Pemerintah perlu melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

#### 11. Pemantapan Sarana dan Prasarana Pemerintahan dengan Dukungan Teknologi Informasi

Pemantapan sarana dan prasarana pemerintahan dengan dukungan teknologi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Adapun arah kebijakannya adalah dengan peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.



## 12. Peningkatan Kemandirian Pangan Daerah

Peningkatan kemandirian pangan daerah dapat dilakukan dengan pengembangan daya saing komoditas unggulan perkebunan masyarakat, pengembangan produktivitas dan daya saing perikanan masyarakat, peningkatan daya saing produk ternak unggulan, serta peningkatan ketersediaan pangan.

## 13. Peningkatan Potensi Pariwisata Daerah

Peningkatan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat menjadi sektor pendorong peningkatan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di daerah sekitar lokasi objek daya tarik wisata di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengembangan destinasi wisata khas lokal Kabupaten Penajam Paser Utara.

## 14. Revitalisasi Pembinaan, Pengelolaan dan Pola Pengembangan UMKM

UMKM merupakan salah satu kekuatan dalam perekonomian daerah. Revitalisasi pembinaan, pengelolaan, dan pola pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing pasar produk UMKM unggulan daerah.

## 15. Peningkatan Nilai Perdagangan & Jasa Daerah

Pemantapan jaringan distribusi dan stabilitas harga pasar bahan pokok dibutuhkan dalam rangka peningkatan nilai perdagangan dan jasa daerah, sehingga dapat berdampak positif bagi sektor perdagangan dan jasa maupun masyarakat.

## 16. Pemantapan Kebijakan Kemudahan Investasi Daerah

Pemantapan kebijakan kemudahan investasi daerah diharapkan akan meningkatkan nilai investasi daerah dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di antara adalah penyelenggaraan tata ruang dan pelayanan investasi. Oleh karena itu arah kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, serta peningkatan kualitas pelayanan investasi/penanaman modal berbasis elektronik.



## 17. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan tujuan utama dari pembangunan. Dalam peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pengelolaan persampahan.

## 18. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Mengurangi Resiko Bencana

Adanya potensi bencana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari di setiap daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi resiko dari bencana tersebut. Dalam rangka meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi resiko bencana diperlukan peningkatan sarana prasarana siaga bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat siaga bencana.

## 19. Peningkatan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pembangunan daerah dapat dinilai baik apabila kebutuhan dasar semua masyarakatnya terpenuhi. Oleh karena itu, peningkatan cakupan pembangunan infrastruktur dasar dapat dilakukan dengan penataan permukiman daerah, penataan kawasan kumuh, pemantapan layanan infrastruktur sumber daya air, serta peningkatan kualitas konektivitas kewilayahan.

Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan arah **Peningkatan Daya Saing dan Pelayanan Publik dengan Optimalisasi Potensi Menuju PPU Serambi Nusantara**. Arah kebijakan ini difokuskan pada *pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing SDM, terlaksananya pemilu dan pemilihan serentak, serta peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur*. Adapun arah kebijakan terkait berupa penyaluran BLT tepat sasaran, perluasan perlindungan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis BUMDES dan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat, peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja, sertifikasi angkatan kerja, jaminan kesehatan ketenagakerjaan, peningkatan dan rehabilitasi sarpras pendidikan, beasiswa kejar paket, siswa sekolah dan mahasiswa, sertifikasi tenaga pendidik, peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penurunan angka stunting, perluasan cakupan kampung KB aktif, optimalisasi pembangunan kota layak anak, penyelenggaraan even budaya daerah, mengembangkan



potensi kepemudaan dan kemasyarakatan, pengembangan daya saing komoditas unggulan perkebunan masyarakat, pengembangan produktivitas dan daya saing perikanan masyarakat, peningkatan daya saing produk ternak unggulan, peningkatan ketersediaan pangan, pengembangan destinasi wisata khas lokal, peningkatan daya saing pasar produk UMKM unggulan daerah, pemantapan jaringan distribusi dan stabilitas harga pasar bahan pokok, peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang, peningkatan kualitas pelayanan investasi/ penanaman modal berbasis elektronik.

## B

### Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Di Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan 5 Tujuan dengan 8 indikator, dan 14 Sasaran dengan 18 indikator kinerja. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program yang akan dicapai dengan memanfaatkan Anggaran Belanja dan Pendapatan (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang akan dicapai di tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan				
Indikator Kinerja		Satuan	Target	
1.1	Persentase Kemiskinan	Persen	6,76	
1.2	Rasio Gini	Rasio	0,20	
	Sasaran Strategis 1.1 Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan			
	1.1.1	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial	Persen	47,80
	Sasaran Strategis 1.2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			
	1.2.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8086
	Sasaran Strategis 1.3 Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja			
	1.3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,05

Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM				
Indikator Kinerja		Satuan	Target	
2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,55	
	Sasaran Strategis 2.4 Peningkatan kualitas Pendidikan			
	2.4.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95
	2.4.2	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,95
	Sasaran Strategis 2.5 Peningkatan Kualitas Kesehatan			
	2.5.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,25
	2.5.2	Prevalensi Stunting	Tahun	10,92
	Sasaran Strategis 2.6 Peningkatan kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender			
	2.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,50
	Sasaran Strategis 2.7 Peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berwawasan kebangsaan			
	2.7.1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan	Persen	33
Tujuan 3. Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,85	
3.2	Indeks SPBE	Indeks	3	
	Sasaran Strategis 3.8 Penguatan birokrasi yang efektif dan efisien			
	3.8.1	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B
	3.8.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,30
	Sasaran Strategis 3.9 Peningkatan pelayanan prima kepada publik			
	3.9.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,55
Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing				
4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	34,85	
	Sasaran Strategis 4.10 Peningkatan kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian			
	4.10.1	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	Persen	39,90
	Sasaran Strategis 4.11 Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah			
	4.11.1	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rupiah	1.040.366.000.000
Tujuan 5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan				
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	65	
5.2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	23,30	
	Sasaran Strategis 5.12 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			
	5.12.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	71,75



Sasaran Strategis 5.13 Peningkatan Ketahanan Kebencanaan			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5.13.1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	125
Sasaran Strategis 5.14 Peningkatan pelayanan infrastruktur			
5.14.1	Persentase pemenuhan rumah layak huni	Persen	64
5.14.2	Persentase jalan Mantap	Persen	28





Sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban tugas dan amanah masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024.

Pada Bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta beberapa langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
> 90 – 100	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	Memuaskan
> 70 – 80	Sangat Baik
> 60 – 70	Baik
> 50 – 60	Cukup
> 30 – 50	Kurang
> 0 – 30	Sangat Kurang

#### A

#### Hasil dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP 2024



Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 oleh Kementerian PAN dan RB terdapat rekomendasi, dimana sebagian besar telah ditindaklanjuti dan sebagiannya masih dalam

proses pelaksanaan. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024**

 <b>Rekomendasi</b>	 <b>Tindak Lanjut</b>
<p>1 Melakukan pemutaktiran seluruh dokumen terkait SAKIP melalui <a href="http://esr.menpan.go.id">esr.menpan.go.id</a>, sehingga dapat disimpulkan secara valid dan terkini tentang kualitas tingkat implementasi SAKIP</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan memastikan menyampaikan seluruh dokumen terkait SAKIP termutakhir pada portal <i>esr</i></p>
<p>2 Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tinggi ke level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemda. Selanjutnya memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan</p>	<p>Melakukan perbaikan terhadap penjenjangan kinerja dengan pendekatan prinsip SMART dalam menemukan strategi dan solusi baru untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah, serta memanfaatkannya untuk penyempurnaan dokumen perencanaan.</p>
<p>3 Menyampaikan PK tahun berjalan pada setiap PD dari level tertinggi hingga ke level terendah agar dapat dipastikan penjenjangan kinerja yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi</p>	<p>Melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah dan memastikan menyampaikan dokumen PK tahun berjalan pada setiap PD dari level tertinggi hingga level terendah</p>
<p>4 Menetapkan IKU pada level Pemda dan PD dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja</p>	<p>Melakukan perbaikan pada IKU Pemda dan PD dengan menyajikan definisi operasional, formula perhitungan, dan sumber data</p>
<p>5 Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sehingga dapat diketahui capaian kinerja serta hal-hal yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut</p>	<p>Melakukan asistensi dan mengevaluasi pengukuran kinerja secara berjenjang seluruh PD</p>
<p>6 Menyajikan data <i>benchmark</i> kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai sudah di kondisi mana</p>	<p>Mengevaluasi dokumen laporan kinerja seluruh PD agar menyajikan data <i>benchmark</i> kinerja</p>





## Rekomendasi

- 7 Meningkatkan kualitas LPPD dan Laporan Kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis atas penggunaan sumber daya
- 8 Memaksimalkan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala
- 9 Menyampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang terkini sehingga PD dapat menindaklanjuti hal tersebut dan diharapkan dapat memicu pencapaian kinerja tingkat Pemda
- 10 Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan



## Tindak Lanjut

Memperbaiki dan memastikan dokumen LPPD dan Laporan Kinerja PD telah menyajikan informasi yang lengkap dan akurat, dan telah sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja yang ada.

Melakukan monitoring dan memastikan seluruh PD menyampaikan capaian kinerja setiap triwulannya pada eSAKIP PPU

Mempercepat penyampaian hasil evaluasi AKIP PD

Melakukan bimbingan teknis atau *workshop* evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan kinerja

## B

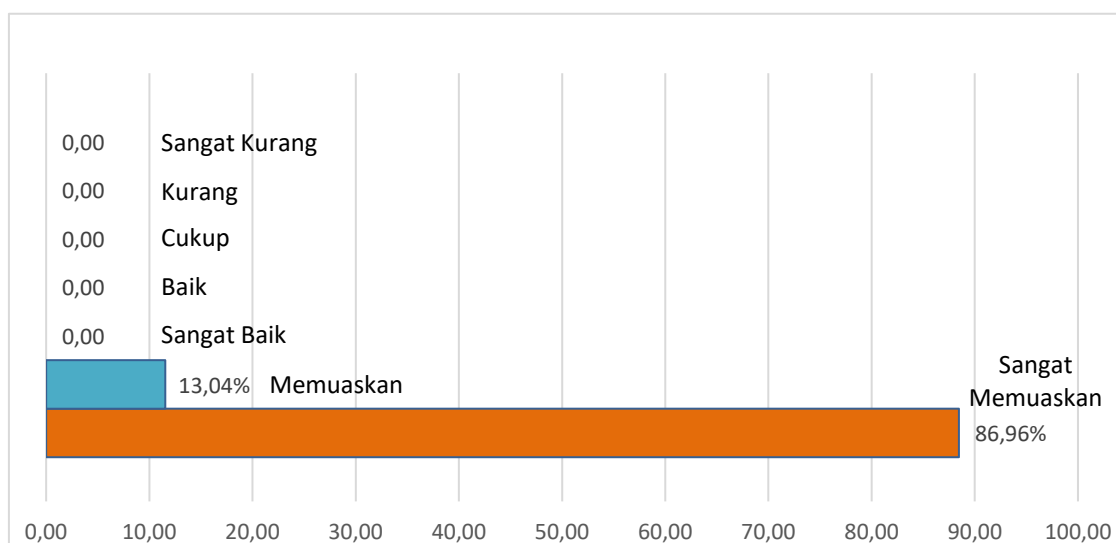
### Capaian Kinerja Organisasi



Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengemban amanah masyarakat, secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik.







**Grafik 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2024**




Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 sebanyak 5 tujuan dan 14 sasaran dengan 26 indikator kinerja. Dari 26 indikator kinerja, sebanyak 20 indikator atau 86,96 % dalam kriteria **Sangat Memuaskan**, 3 indikator kinerja atau 13,04 % masuk dalam kriteria **Memuaskan**, dan 3 indikator kinerja tidak dapat ditampilkan hasil capaiannya.

Selengkapnya capaian indikator kinerja Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024**

 Indikator Kinerja		 Target	 Realisasi	 % Realisasi
1	Persentase Kemiskinan	6,76 %	6,69	101,5
2	Rasio Gini	0,260	0,258	100,78
3	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	47,80 %	70,19	146,84
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,55	74,94	100,52
5	Indeks Desa Membangun	0,8086 (Maju) Mandiri : 19 Desa Maju : 11 Desa Berkembang : 0 Desa	0,8205 (Mandiri) Mandiri : 21 Desa Maju : 9 Desa Berkembang : 0 Desa	101,47

 Indikator Kinerja		 Target	 Realisasi	 % Realisasi
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05 %	2,05	100
7	Harapan Lama Sekolah	12,95 Tahun	12,87	99,38
8	Rata - Rata Lama Sekolah	8,95 Tahun	8,57	95,75
9	Usia Harapan Hidup	74,25 Tahun	74,27	100,03
10	Prevalensi Stunting	10,92 %	11,55	94,55
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,50 %	-	-
12	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	33 %	95	287,88
13	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62,85 (Baik)	68,5	108,99
14	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	B	100
15	Indeks SPBE	3 (Baik)	2,87 (Baik)	95,67
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,55	83,57	100,02
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	34,85 %	30,68	88,03
18	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	39,90 %	33,16	83,11
19	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,30 %	6,12	83,84
20	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rp 1.040.366.000.000	3.705.197.869.077	356,14
21	Persentase Penurunan Emisi GRK	23,30 %	-	-
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,75	71,1	99,09
23	Indeks Resiko Bencana	125	131,81	94,83
24	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	65 (Cukup)	-	-
25	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	64,00 %	64,21	100,36
26	Persentase Jalan Mantap	28,00 %	33,38	119,21
Rata - Rata				119,91

### Tujuan 1

### Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023		2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.1	Persentase Kemiskinan	6,97 %		6,76	6,69	101,05	6,62	98,95
1.2	Rasio Gini	0,299		0,260	0,258	100,78	0,255	98,84
Rata-rata Capaian Kinerja						100,92		98,90

## 1.1. Persentase Kemiskinan

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara karena kemiskinan dapat berdampak buruk pada kehidupan masyarakat, mulai dari berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup, standar kesehatan, dan standar pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Angka kemiskinan suatu daerah dapat dilihat dari garis kemiskinannya. Garis kemiskinan merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari selama sebulan. Garis kemiskinan penduduk Penajam Paser Utara tahun 2024 meningkat sebesar Rp 34.434,- dibandingkan tahun 2023 menjadi Rp 617.673,-. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 sebesar 10.780 (6,69 persen), sedangkan pada tahun 2023 sebesar 11.190 (6,97 persen). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan sebanyak 410 jiwa atau 0,28 persen penduduk miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara dibanding tahun 2022. Target Persentase Penduduk Miskin tahun 2024 sebesar 6,76 % dapat terealisasi 6,69 % sehingga capaian kinerja sebesar 101,05 % dengan kategori capaian Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Persentase Kemiskinan tahun 2024 masih kurang 0,07 % dengan capaian kinerja sebesar 98,95 %.



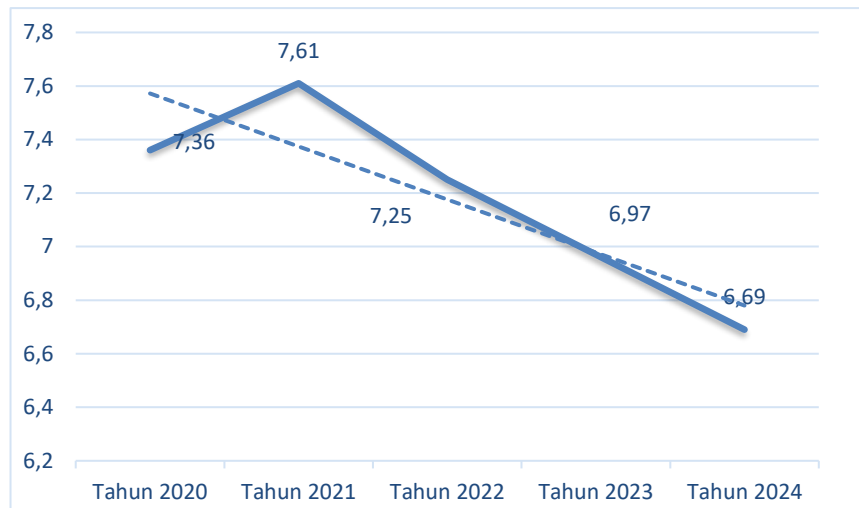
**Tabel 3.4 Persentase Kemiskinan Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2020	488.807	11.930	7,36
2021	513.666	12.130	7,61
2022	538.022	11.590	7,25
2023	583.239	11.190	6,97
2024	617.673	10.780	6,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

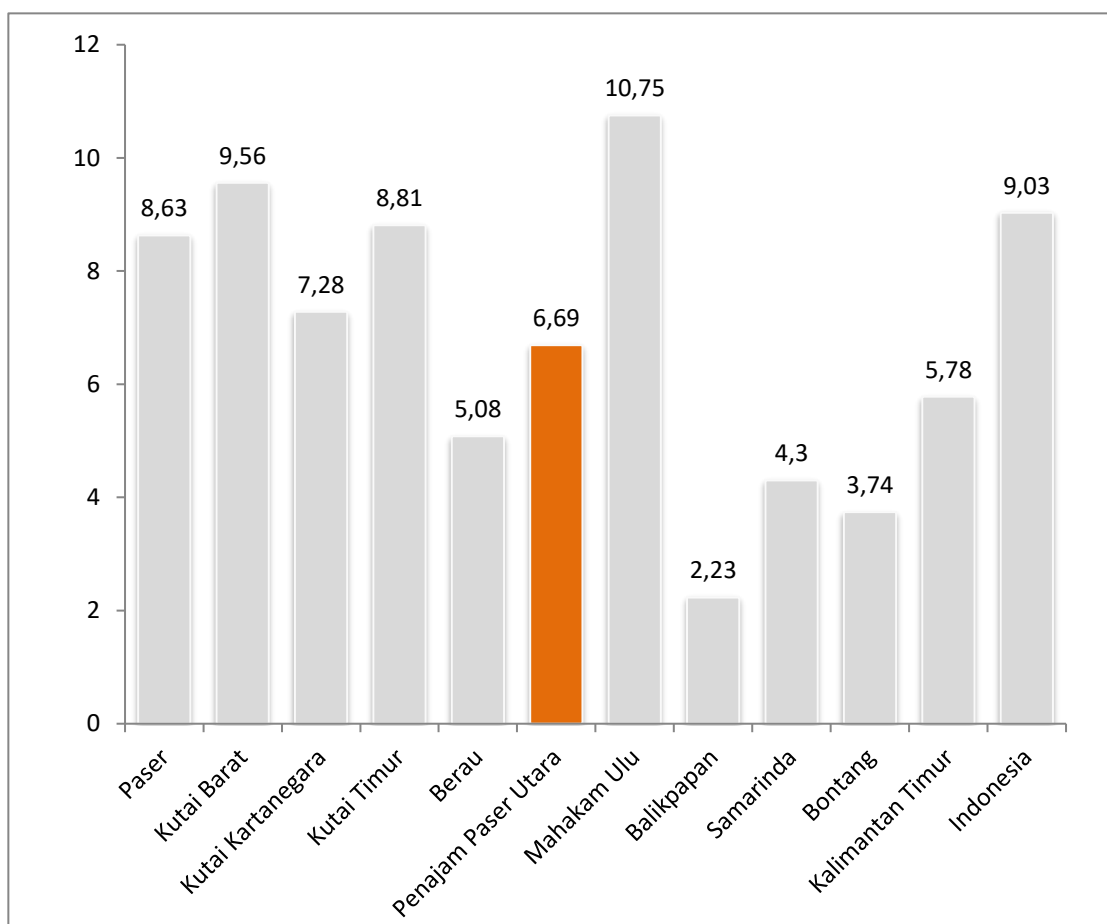


**Grafik 3.2 Persentase Kemiskinan Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

**Grafik 3.3 Persentase Kemiskinan Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025





Jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan ke-5 dengan Persentase Kemiskinan terendah dibanding dengan 10 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, dan Persentase Kemiskinannya masih di atas Persentase Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur, serta berada di bawah Persentase Kemiskinan Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi persentase kemiskinan, antara lain yaitu:

- Penciptaan wirausaha baru dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan lapangan pekerjaan;
- Pemberian bantuan pemerintah melalui program perlindungan dan jaminan sosial sosial;
- Menstabilisasi harga;
- Pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui peningkatkan program desa mandiri.

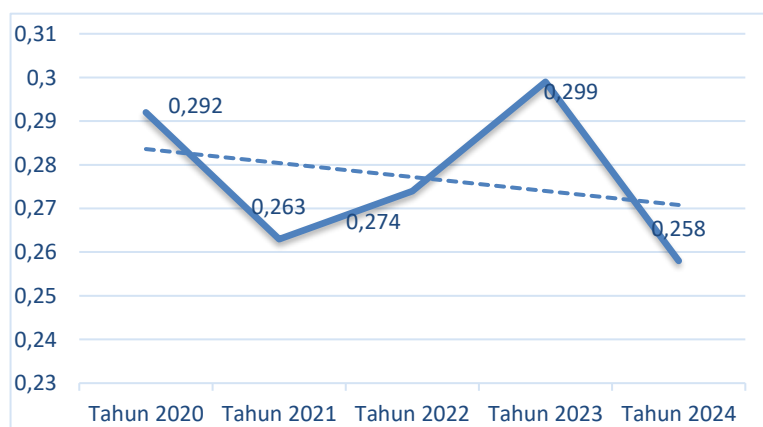
## 1.2. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu alat untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan yang menggambarkan tingkat ketimpangan atau kesenjangan antar wilayah. Semakin tinggi nilai Rasio Gini, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan antar kelompok penduduk.

Rasio Gini Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebesar 0,258 dengan target 0,260 tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100,78 % atau dengan kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan. Rasio Gini tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,041 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran yang digunakan walaupun tidak belum signifikan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Rasio Gini tahun 2024 masih kurang 0,003 dengan capaian kinerja sebesar 98,84 %.



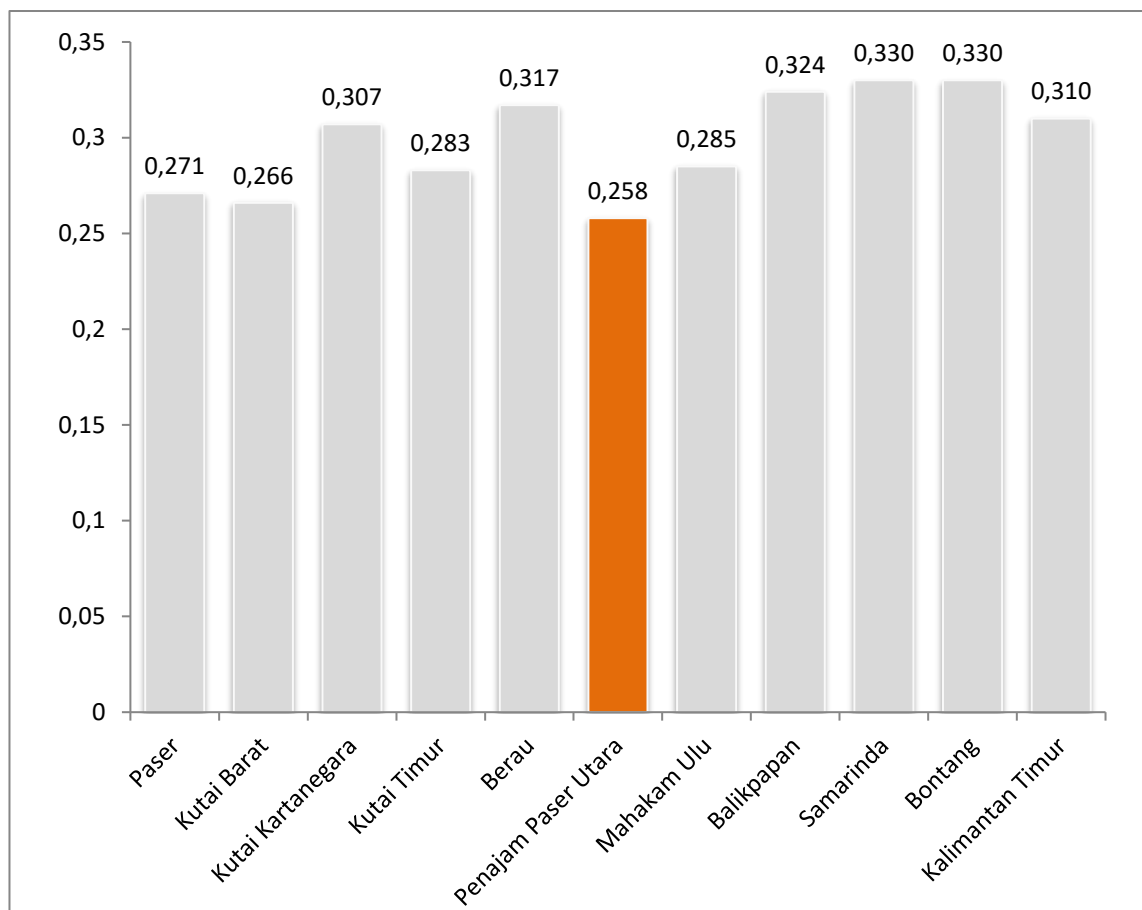
**Grafik 3.4 Rasio Gini Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Penajam Paser Utara, 2025

Jika melihat grafik Rasio Gini Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami tren penurunan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 capaian di tahun 2024 sudah mencapai 98,84 %.

**Grafik 3.5 Rasio Gini Kabupaten/ Kota  
Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan Rasio Gini, yaitu:

1. Mengurangi jumlah penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan melalui pemberian program bantuan sosial;
2. Meningkatkan lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru dan pengembangan UMKM;
3. Meningkatkan keterampilan kerja melalui pelatihan kerja;
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.



Adapun strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk menurunkan Rasio Gini, yaitu:

1. Peningkatan lapangan kerja;  
Mendorong terciptanya wirausaha baru melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia;  
Meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian akses pendidikan berkualitas dan melakukan pelatihan-pelatihan kerja terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;  
Mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan melalui peningkatan desa mandiri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa/ kelurahan.
4. Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin.  
Pemberian bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

#### SASARAN 1

#### Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.1.1	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial	77,27 %	47,80	70,19	146,84	100	70,19
Rata-rata Capaian Kinerja					146,84		70,19

##### 1.1.1. Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial

Pemerintah selalu berupaya untuk menekan angka kemiskinan, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Beberapa program bantuan sosial yang telah diberikan berupa Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung Tunai, dan Bantuan Permodalan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2023 terdapat 4.718 KK yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, 531 KK yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, dan 9.600 KK yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Dari target yang ditetapkan, Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial 47,80 % dapat terealisasi 70,19 % sehingga capaiannya sebesar 146,84 %, dalam kategori kinerja Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 70,19 %, masih kurang 29,81 %.

Upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial, yaitu:

1. Pemberian bantuan secara rutin berupa Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, dan Bantuan Pangan Non Tunai;
2. Perluasan pemberian bantuan seperti bantuan permodalan usaha untuk masyarakat miskin melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama;
3. Pemberian bantuan upaya rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembinaan mental selanjutnya dilakukan reunifikasi kepada keluarga sehingga anak dapat menjalankan fungsi social secara normal;
4. Pemberian jaminan sosial kepada masyarakat miskin absolut, kepada penyandang disabilitas atau orang yang secara fisik sudah tidak berdaya.



Pelatihan dan Workshop Pengembangan UMKM dengan Ekosistem Digital

### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan dengan pagu anggaran Rp 9.133.288.141,00, terealisasi Rp 8.991.308.777,00 sehingga capaian realisasi anggaran 98,45 %. Rata-rata capaian kinerja



sasaran strategis ini sebesar 162,85 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 32,96 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target di dalam perencanaan.

**Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan</b>		9.133.288.141,00	8.991.308.777,00	98,45	146,84	32,96
<b>Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial</b>						
1	Program Rehabilitasi Sosial	1.768.844.708,00	1.735.708.784,00			
2	Program Pemberdayaan Sosial	915.034.292,00	899.456.796,00			
3	Program perlindungan dan jaminan sosial	3.070.848.540,00	3.025.023.917,00			
4	Program Penanganan Bencana	2.957.585.833,00	2.927.672.380,00			
5	Program Penanganan Kerawanan Pangan	420.974.768,00	403.446.900,00			

## SASARAN 2

### Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.2.1	Indeks Desa Membangun	0,8052 (Maju) Mandiri = 18 Maju = 12 Berkembang = 0	0,8086 (Maju) Mandiri = 19 Maju = 11	0,8205 (Mandiri) Mandiri = 21 Maju = 9	101,47	0,8205 (Mandiri) Mandiri = 25 Maju = 5	98,80
Rata-rata Capaian Kinerja					101,47		98,80

### 1.2.1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indikator untuk mengukur kemajuan desa dalam membangun ekonomi lokal dan sumber daya manusia dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

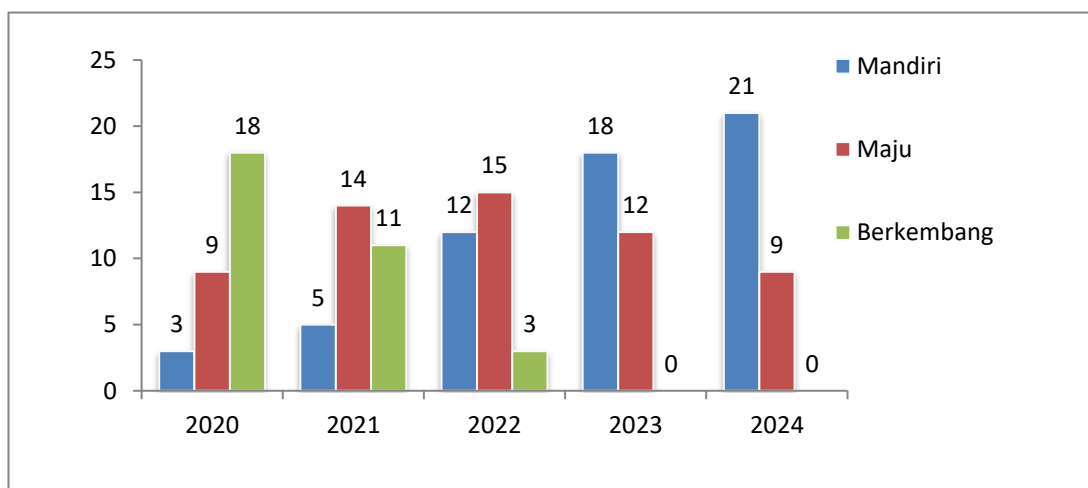
Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni:

1. Desa Mandiri
2. Desa Maju
3. Desa Berkembang
4. Desa Tertinggal
5. Desa Sangat Tertinggal

Dalam perkembangan pemerintahan desa di Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang positif. Dari 30 desa dari jumlah seluruh desa yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Tahun 2024 terdapat 21 Desa Mandiri dan 9 Desa Maju. Terjadi peningkatan status 3 desa berkembang menjadi desa mandiri di tahun 2024. Sejak tahun 2023 desa berkembang sudah tidak ada, mengalami peningkatan status menjadi desa maju. Pencapaian ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara agar lebih mandiri dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran desa.

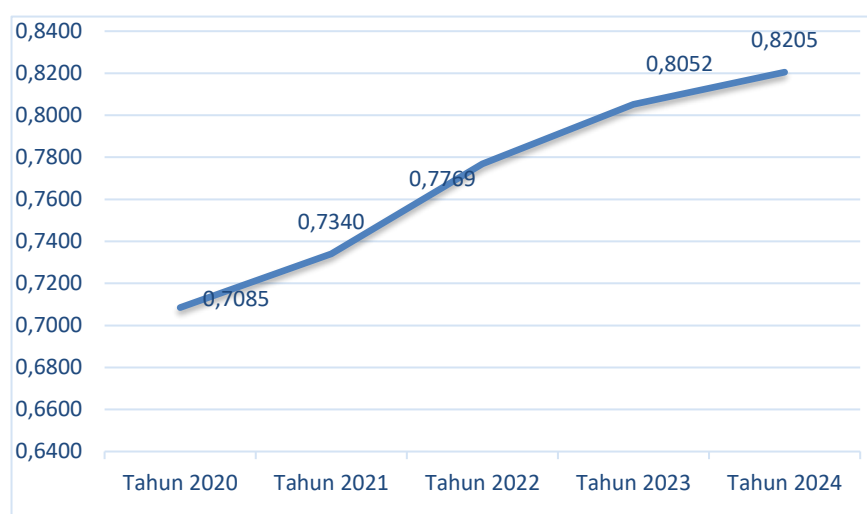


**Grafik 3.6 Status Desa Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun 2020 - 2024**



Peningkatan status desa seiring dengan peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), dimana tahun 2024 Indeks Desa Membangun Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi 0,8205 yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar 0,8086. Status klasifikasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah Mandiri atau disebut Desa Sembada yang berarti memiliki kemampuan melaksanakan Pembangunan desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

**Grafik 3.7 Indeks Desa Membangun  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



Sasaran Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan 1 (satu) indikator Indeks Desa Membangun tercapai dengan capaian 101,47 % dalam kategori Sangat Berhasil. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD telah tercapai sebesar 98,80 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD telah tercapai sebesar 98,80 %.

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa hal, yaitu:

- Kolaborasi yang baik antara pemerintah desa sebagai pelaksana dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pembina;
- Meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara baik dan transparan;
- Pembinaan secara terus menerus yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pendampingan P3MD;



d. Adanya Program Pro P2KPM yang merekrut para pendamping teknis dalam meningkatkan pembangunan desa dan bantuan keuangan pemerintah daerah untuk pelatihan-pelatihan demi meningkatkan keterampilan masyarakat.

Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Penataan Desa;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran Rp 32.253.971.903,00, terealisasi Rp 28.821.896.916,08 sehingga capaian realisasi anggaran 89,36 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 101,47 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 11,94 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>		32.253.971.903,00	28.821.896.916,08	89,36	101,47	11,94
<b>Indeks Desa Membangun</b>						
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.205.355.144,00	1.867.877.790,00			
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.081.937.663,00	18.638.078.205,08			
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	286.002.703,00	243.622.900,00			
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.305.552.778,00	2.903.288.988,00			
5	Program Penataan Desa	4.759.053.772,00	4.583.085.875,00			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	616.069.843,00	585.943.158,00			





### SASARAN 3

#### Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,07 %	2,05	2,05	100	1,95	95,12
Rata-rata Capaian Kinerja					100		95,12

#### 1.3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

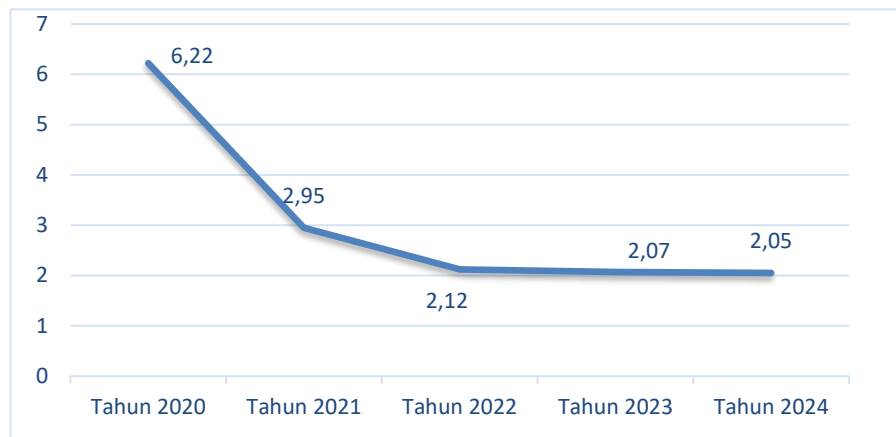
Pengangguran dapat disebabkan oleh minimnya kualitas, baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan kelompok angkatan kerja, serta masalah ketenagakerjaan yang dapat memicu pengangguran. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja, yang mengindikasikan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari jumlah tersebut diperoleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2024 sebesar 73,10 persen, bertambah 6,80 poin dibanding tahun 2023.

Angkatan kerja di Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 yang bekerja sebanyak 157.112 orang, dan sebanyak 3.293 orang pengangguran. Terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 57.780 orang jika dibandingkan Tahun 2023. Jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan sebanyak 56.615 orang dan jumlah pengangguran bertambah sebanyak 1.165 orang.

**Grafik 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka  
Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**

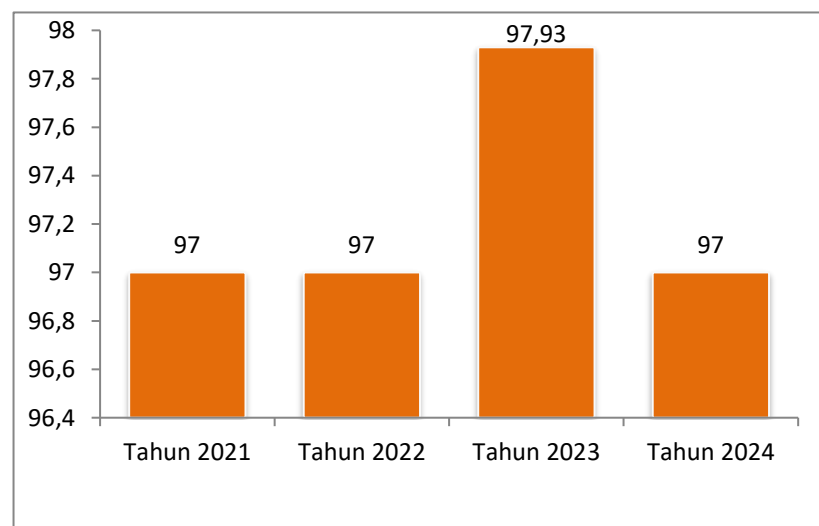


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 ditargetkan 2,05 % terealisasi 2,05%, tercapai 100 % dengan kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka di Penajam Paser Utara turun sebesar 0,02, artinya terjadi perbaikan dalam hal program penanganan ketenagakerjaan atau menggambarkan bahwa tingkat kesempatan kerja mengalami peningkatan. Tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir RPD masih kurang sebesar 0,1, dimana sudah tercapai 98,80 %.



**Grafik 3.9 Tingkat Kesempatan Kerja  
Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



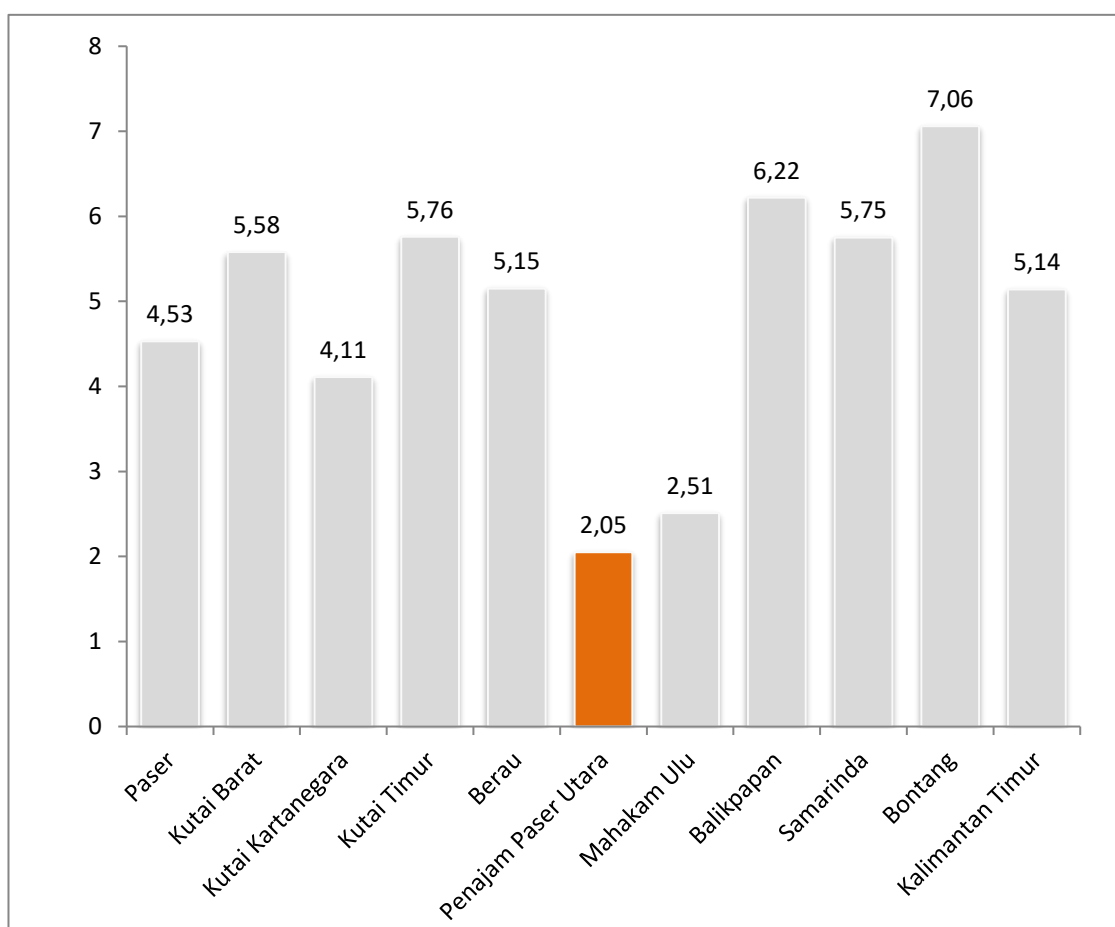
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025



Tingkat Pengangguran Terbuka salah satunya dipengaruhi oleh besaran Tingkat Kesempatan Kerja. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara selama 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan, sehingga memberikan lebih banyak pilihan pekerjaan bagi para pencari kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 sebesar 2,05 persen, terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

**Grafik 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Dalam rangka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan hal yang positif. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sejak tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi



yang meningkat, maka kesempatan kerja akan semakin bertambah sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

b. Peningkatan Investasi

Investasi juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Investasi dapat membuka lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

c. Pemberdayaan dan Pengembangan Industri

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja.

d. Peningkatan Keahlian dan Keterampilan

Pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap kerja dapat menekan Tingkat pengangguran. Jenis pelatihan yang diberikan menyesuaikan dengan tuntutan pasar tenaga kerja.

e. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;

Informasi pasar kerja online dapat mempermudah para pencari kerja untuk mencari informasi lowongan kerja secara cepat dan beragam.

f. Job fair/ bursa kerja;

Melalui kegiatan Job fair/ bursa kerja, pencari kerja dapat secara langsung bertemu dengan Perusahaan, sehingga mempermudah pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

g. Memperkuat program hubungan industrial dan program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

Dengan melakukan pengesahan kebijakan terkait perusahaan dan melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan mogok kerja melalui mediasi.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Pengurangan Angka Pengangguran, yaitu :

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Penempatan Tenaga Kerja;
3. Program Hubungan Industrial;
4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
6. Program Pengembangan UMKM.



## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp 27.650.238.810,00, terealisasi Rp 26.167.384.598,00 sehingga capaian realisasi anggaran 94,64 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 100 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 5,36 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja</b>		27.650.238.810,00	26.167.384.598,00	94,64	100	5,36
<b>Tingkat Penganguran Terbuka</b>						
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.436.201.600,00	14.340.365.473,00			
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	279.000.000,00	277.109.879,00			
3	Program Hubungan Industrial	2.413.500.000,00	2.357.181.478,00			
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.388.558.444,00	3.187.995.307,00			
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	482.035.001,00	427.890.161,00			
6	Program Pengembangan UMKM	5.650.943.765,00	5.576.842.300,00			

### Tujuan 2

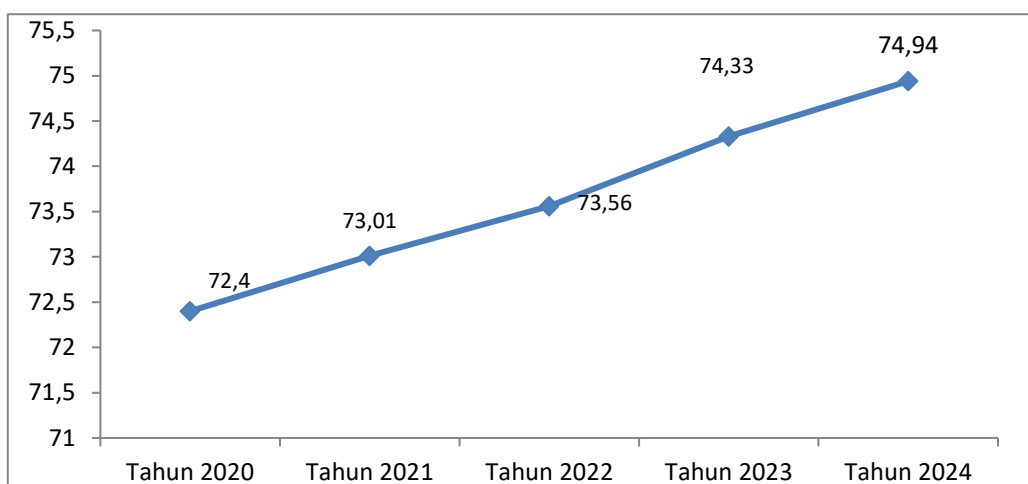
### Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Data Manusia

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,33	74,55	74,94	100,52	75	99,92
Rata-rata Capaian Kinerja					100,52		99,92

## 2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah. Pembangunan manusia bertujuan untuk menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, dan produktif, yang dapat dilihat melalui kondisi pendidikan, kesehatan, perekonomian. Perkembangan kondisi ini dapat dilihat melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

**Grafik 3.11 Indeks Pembangunan Manusia  
Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**

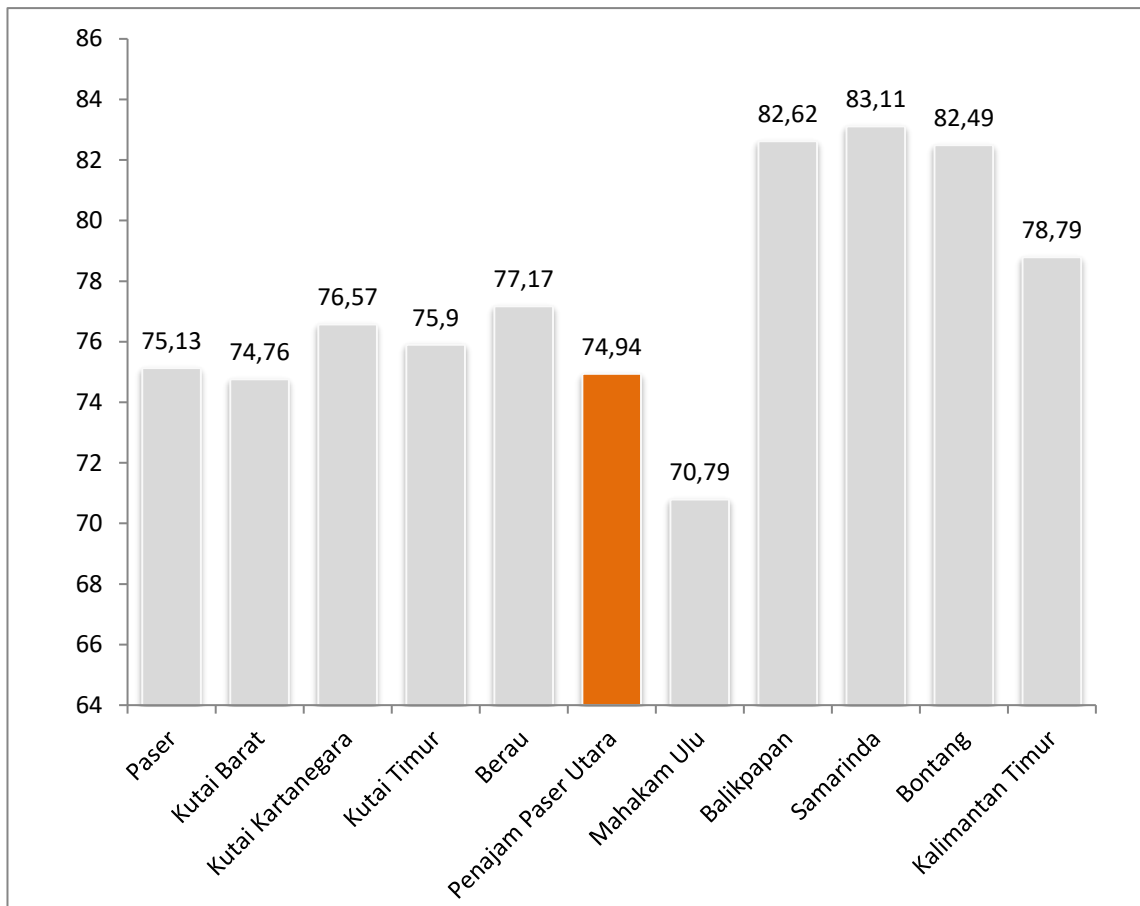


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai melebihi dari yang ditargetkan, dimana dapat tercapai 100,52 dengan kategori capaian Sangat Memuaskan. Tahun 2024 Capaian IPM ini meningkat sebesar 0,61 dari tahun 2023, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 IPM tahun 2024 masih kurang 0,06 poin dengan capaian 99,92 %.



**Grafik 3.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didukung oleh empat sasaran strategis, yaitu Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan, Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan, Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender, dan Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan.



## SASARAN 4

### Peningkatan Kualitas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.4.1	Harapan Lama Sekolah	12,86 Tahun	12,95	12,87	99,38	13,85	92,92
2.4.2	Rata – rata Lama Sekolah	8,53 Tahun	8,95	8,57	95,75	9,85	87,01
Rata-rata Capaian Kinerja					97,57		89,97

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah karena peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan bagian penting dari proses pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi kemajuan suatu daerah. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam dimensi pendidikan suatu daerah.

#### 2.4.1. Harapan Lama Sekolah

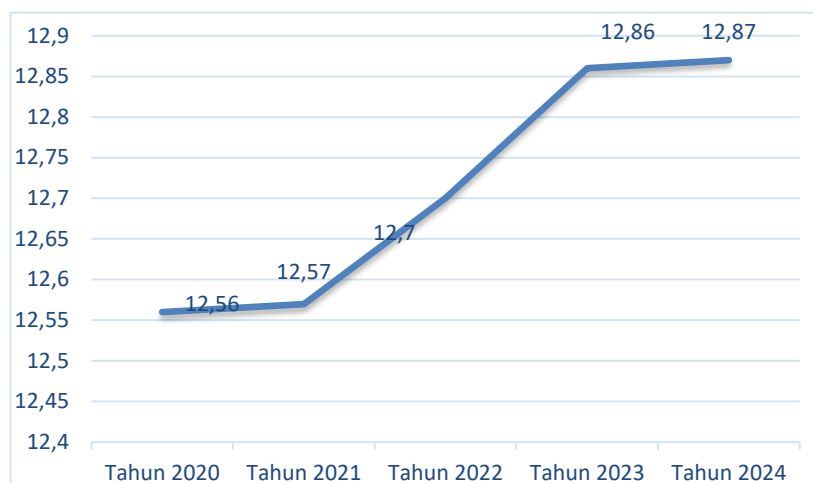
Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah didapatkan dengan menghitung rata-rata jumlah penduduk yang bersekolah pada rentang umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada rentang umur tertentu.

Pada tahun 2024, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 12,87 tahun dari target yang ditetapkan 12,95 tahun dengan capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 99,38 persen. Angka Harapan Lama Sekolah 12,87 artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki kesempatan untuk bersekolah selama 12,87 tahun atau setidaknya hingga Diploma I. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2024 terjadi peningkatan 0,01 tahun dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Harapan Lama Sekolah tahun 2024 masih kurang 0,98 tahun dengan capaian 92,92 %.





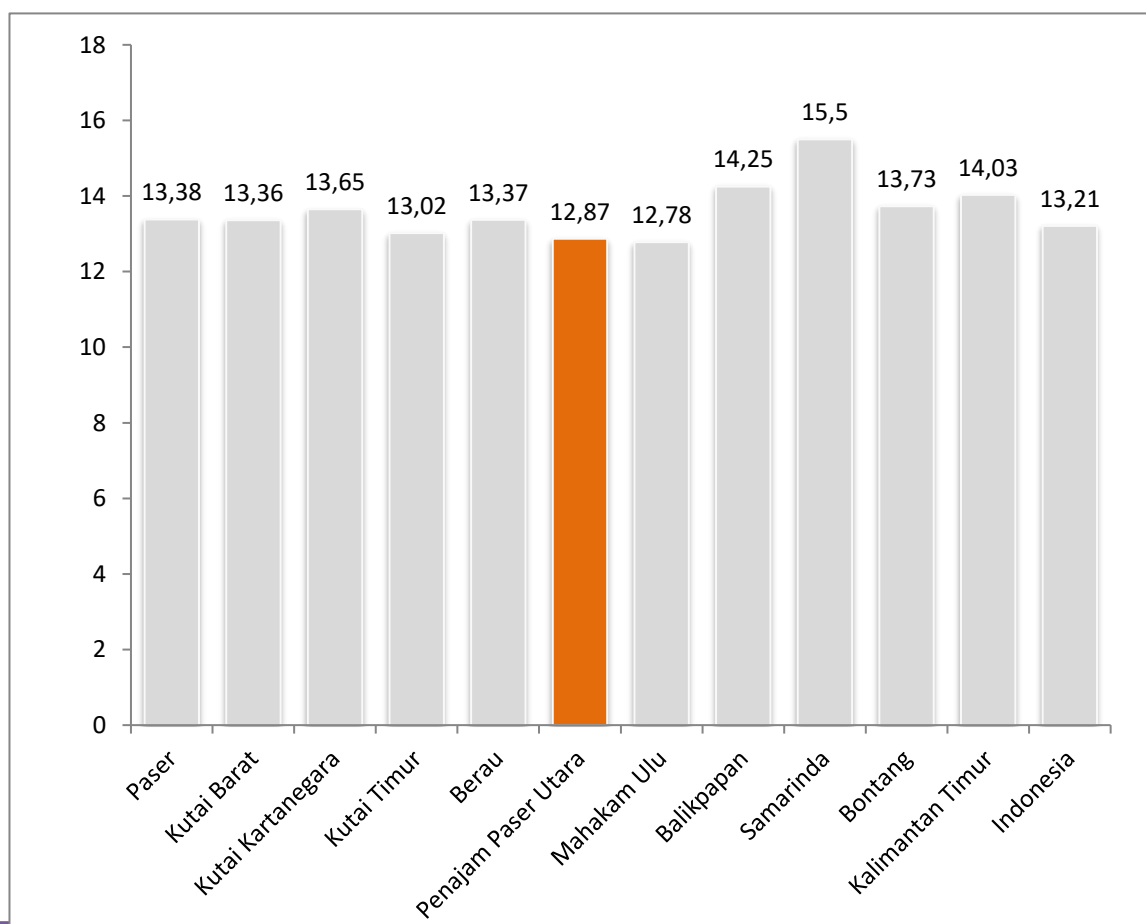
**Grafik 3.13 Harapan Lama Sekolah  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah pada Provinsi Kalimantan Timur dan Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia, serta masih berada pada urutan kedua terendah dari 10 kabupaten/ kota se Kalimantan Timur. Angka Harapan Lama Sekolah Indonesia tahun 2024 sebesar 13,21 tahun dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 14,03 tahun.

**Grafik 3.14 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui sosialisasi pendidikan dari tingkat PAUD, memberikan bantuan peralatan pendukung sekolah bagi siswa, bea siswa bagi siswa berprestasi, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP, meningkatkan kualitas pengajar.

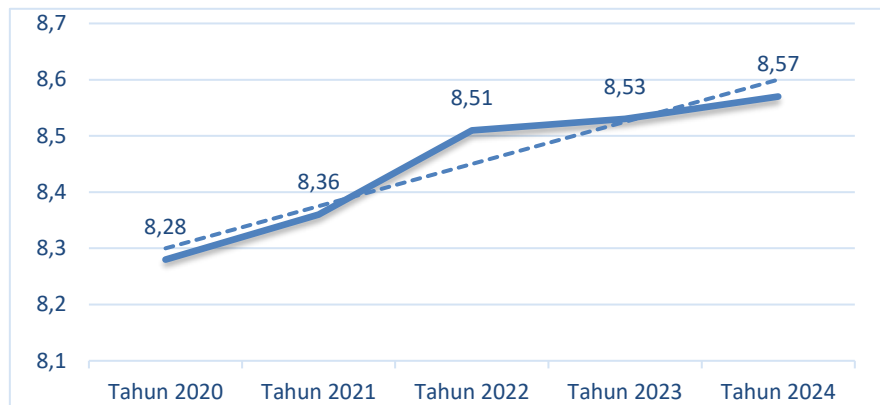
#### 2.4.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2024, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 8,57 tahun masih kurang dari target yang diperjanjikan, dengan capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 95,75 %. Jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023, pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,04 tahun. Rata-rata Lama Sekolah 8,57 artinya pada tahun 2024 rata-rata penduduk Penajam Paser Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh Pendidikan selama 8,57 tahun atau hamper menamatkan kelas IX (kelas 3 SMP). Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya program-program penunjang pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, seperti Program Beasiswa Seribu Sarjana, Reguler Berprestasi untuk pelajar dan mahasiswa, Tahfiz Qur'an. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Rata-rata Lama Sekolah tahun 2024 masih kurang 1,28 tahun dan telah tercapai 87,01 %.



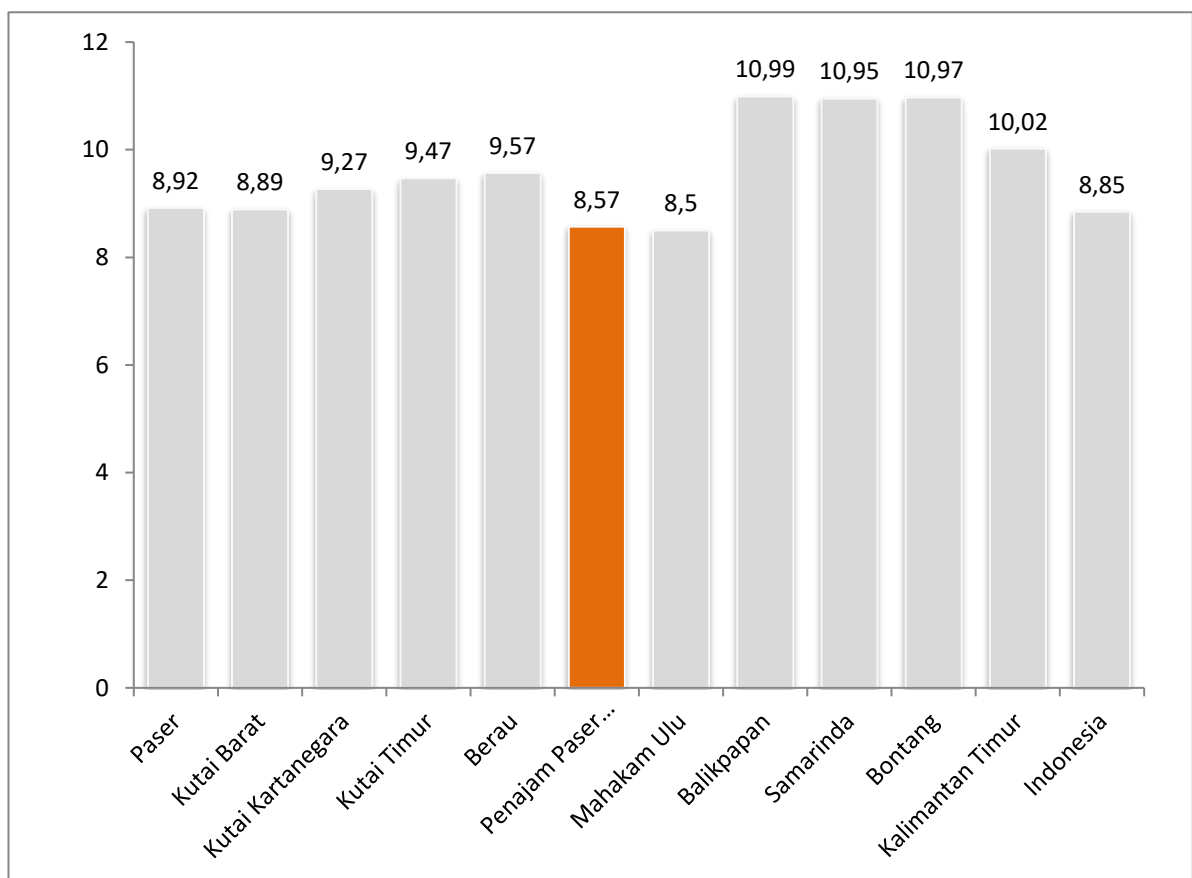
**Grafik 3.15 Rata-rata Lama Sekolah Penajam Paser Utara  
Tahun 2020 - 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Penajam Paser Utara masih lebih rendah dibandingkan dengan Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia (8,85 tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur (10,02 tahun), serta berada pada urutan kedua terendah dari 10 kabupaten/ kota se Kalimantan Timur.

**Grafik 3.16 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota se  
Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025



Adapun kendala yang ada dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, antara lain masih kurangnya aksesibilitas pendidikan.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan dalam peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pendidik

Peningkatan pada kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi tenaga pengajar salah satunya melalui *In House Training* yang diselenggarakan di setiap sekolah.

2. Peningkatan kualitas pembelajaran

Memanfaatkan dengan maksimal penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang merupakan platform edukasi. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa juga tidak kalah penting mengingat ini merupakan pondasi utama dalam hal pemahaman pembelajaran.

3. Peningkatan aksesibilitas Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana seperti ketersediaan ruang kelas, ruang praktikum, serta peralatan pembelajaran. Memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mengikuti Pendidikan sehingga tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum.



Pemberian Bantuan Peralatan Sekolah



## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 275.479.556.153,00, terealisasi Rp 267.826.623.369,59 sehingga capaian realisasi anggaran 97,22 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 97,57 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 0,36 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Kualitas Pendidikan</b>	275.479.556.153,00	267.826.623.369,59	97,22	97,57	0,36
Harapan Lama Sekolah					
Rata-rata Lama Sekolah					
1 Program Pengelolaan Pendidikan	275.229.672.616,00	267.587.409.559,59			
2 Program Pengembangan Kurikulum	249.883.537,00	239.213.810,00			

### SASARAN 5

#### Peningkatan Kualitas Kesehatan

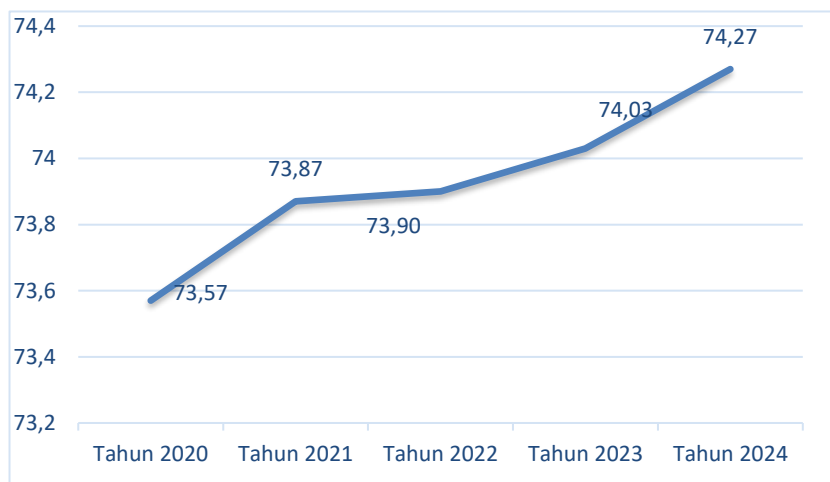
No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.5.1	Usia Harapan Hidup	74,03 Tahun	74,25	74,27	100,03	74,50	99,69
2.5.2	Prevalensi Stunting	10,8	10,92	11,55	94,55	10,05	87,01
Rata-rata Capaian Kinerja					97,29		93,35

Salah satu komponen pembentuk IPM lainnya selain sektor pendidikan yaitu sektor Kesehatan. Indeks Kesehatan diukur dari Usia Harapan Hidup (UHH). Indeks Kesehatan juga dapat diukur dari indikator Prevalensi Stunting.

### 2.5.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang. UHH menjadi suatu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program-program kesehatan. Faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup yaitu : faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

**Grafik 3.17 Angka Harapan Hidup  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



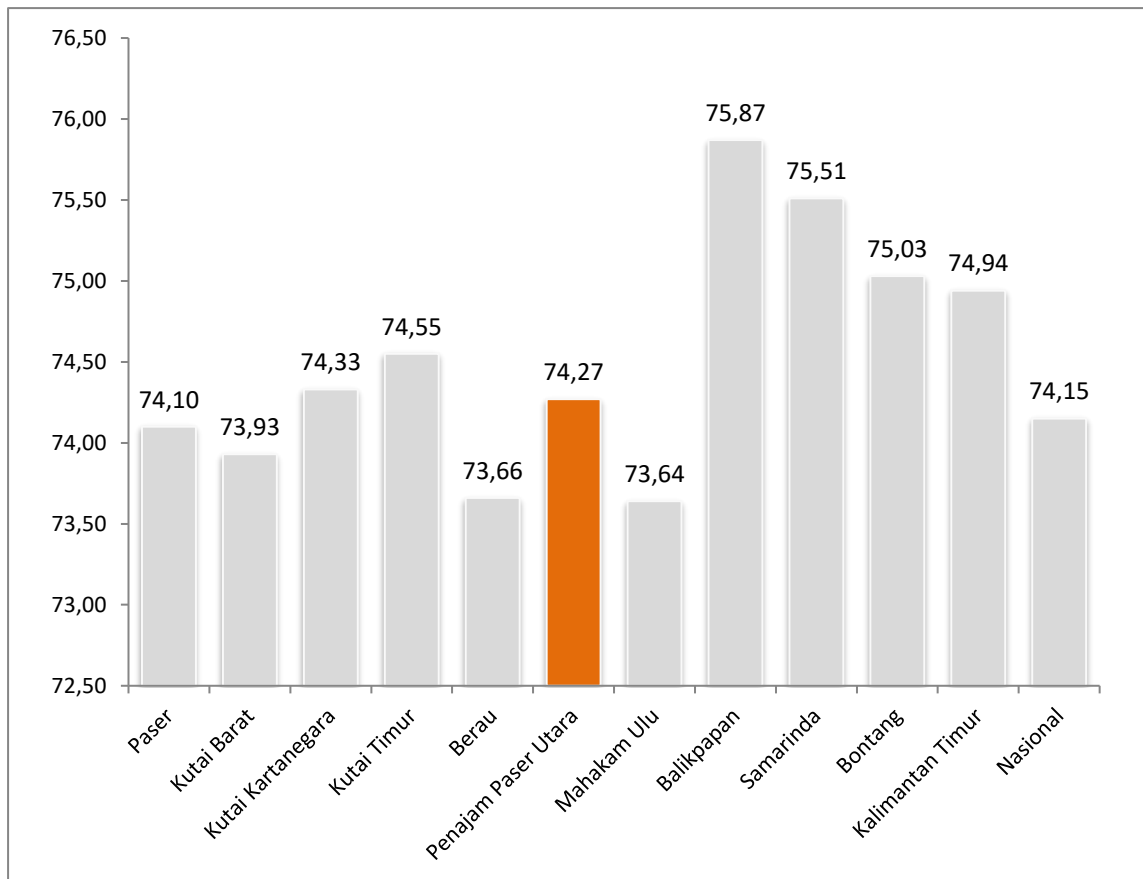
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

UHH Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebesar 74,27 tahun, mengalami kenaikan 0,24 tahun dari tahun 2023. Interpretasinya dari angka harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2024 mempunyai harapan untuk hidup selama 74,27 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang akan mencapai umur 74,27 tahun pada tahun ke depan. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari target yang ditetapkan sebesar 74,25 tahun, Angka Harapan Hidup pada tahun 2024 sebesar 74,27 tahun sehingga capaian kinerja sebesar 100,03 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Usia Harapan Hidup tahun 2024 masih kurang 0,23 tahun dan telah tercapai 99,69 %.



Angka UHH ini masih berada di bawah capaian UHH Provinsi Kalimantan Timur 74,94 tahun dan berada di atas UHH Indonesia 74,15 tahun, serta berada pada urutan kelima dengan UHH terkecil dari 10 kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur.

**Grafik 3.18 Angka Harapan Hidup Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Tujuan usaha Kesehatan Masyarakat ialah agar setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosialnya diharapkan berumur panjang, dan tidak mudah sakit-sakitan. Adapun jumlah 10 Besar Penyakit di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.9 Sepuluh Besar Penyakit di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024**

	Nama Penyakit	Jumlah
1	Nasofaringitis akute (Common Cold)	8.997
2	Hipertensi Primer ( esensial)	6.886
3	Penyakit pulpa dan jaringan periapikal	3.070
4	Dispepsia	2.876
5	Diabetes Melitus	2.859
6	Myalgia	2.265
7	Gasritis	2.176
8	Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema)	2.158
9	Diare dan Gastroenteritis	1.555
10	Rematixme	1.094
	Jumlah	33.936



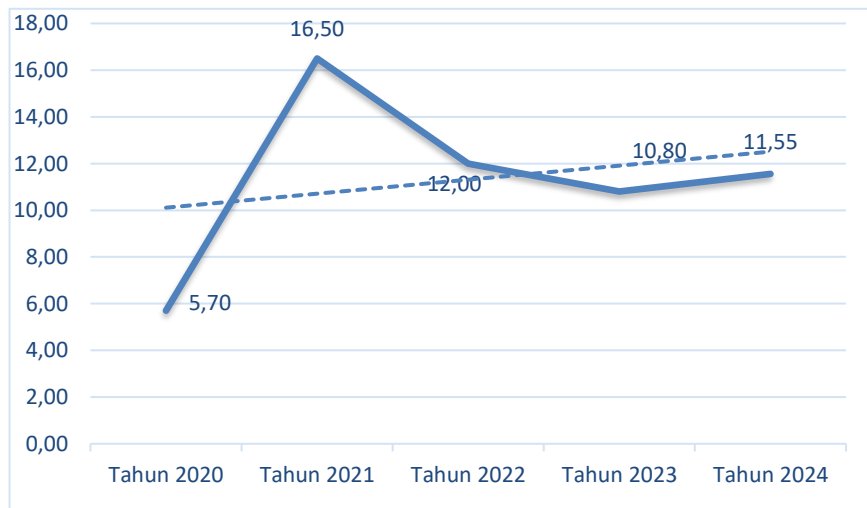
**Tabel 3.10 Faktor yang Mempengaruhi Usia Harapan Hidup  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024**

	Nama Penyakit	Jumlah
1	Prevalensi Balita Stunting	11,55
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	5
3	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	10
4	Persentase Standar Pelayanan Minimal	52,2
5	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	90

### 1.5.1. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting adalah persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kondisi sosial ekonomi, kurangnya asupan gizi pada bayi, kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum, saat kehamilan serta setelah persalinan.

**Grafik 3.19 Prevalensi Stunting  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



Prevalensi Stunting Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebesar 11,55 %, mengalami kenaikan 0,12 tahun dari tahun 2023. Penurunan kasus stunting tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu untuk pemeriksaan dan pemberian imunisasi kepada bayi





dan balita sehingga kemungkinan penanganan stunting pada balita dapat dapat dicegah sejak dini. Pada tahun 2024 jumlah kunjungan balita ke posyandu sebesar 86,71 % meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan balita ke Posyandu pada tahun 2023 yang sebesar 67,5%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Prevalensi Stunting tahun 2024 masih kurang 1,50 % dan telah tercapai 87,01 %.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Penajam Paser Utara, antara lain:

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal kepada Balita dan ibu hamil.  
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil sejak terdeteksi mengalami kekurangan gizi kronis, dan kepada balita sejak diketahui tidak mengalami kenaikan berat badan saat ditimbang.
2. Meningkatkan sumber daya manusia kader Posyandu dalam melakukan penjangkaran terhadap Balita dan ibu hamil.
3. Meningkatkan *Open Defecation Free* (ODF) melalui program sanitasi total berbasis masyarakat.
4. Meningkatkan tenaga kesehatan Puskesmas berupa tata laksana pencegahan anak bermasalah gizi.
5. Meningkatkan sumber daya kesehatan yang mencakup tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Peningkatan Kualitas Kesehatan”, yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
6. program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 276.727.141.818,00, terealisasi Rp 258.503.664.060,20 sehingga capaian realisasi anggaran 93,41 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 97,29 %, maka efisiensi



penggunaan sumber daya anggaran sebesar 3,98 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis  
Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Kualitas Kesehatan</b>		276.727.141.818,00	258.503.664.060,20	93,41	97,29	3,98
<b>Usia Harapan Hidup</b>						
<b>Prevalensi Stunting</b>						
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	272.621.307.334,00	254.895.294.507,20			
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.248.798.020,00	1.144.389.416,00			
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	434.131.000,00	311.066.000,00			
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	837.692.461,00	662.081.592,00			
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	174.334.833,00	170.464.197,00			
6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.410.878.170,00	1.320.368.348,00			

## SASARAN 6

### Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,93	87,50	-	-	87,85	-
Rata-rata Capaian Kinerja					-		-

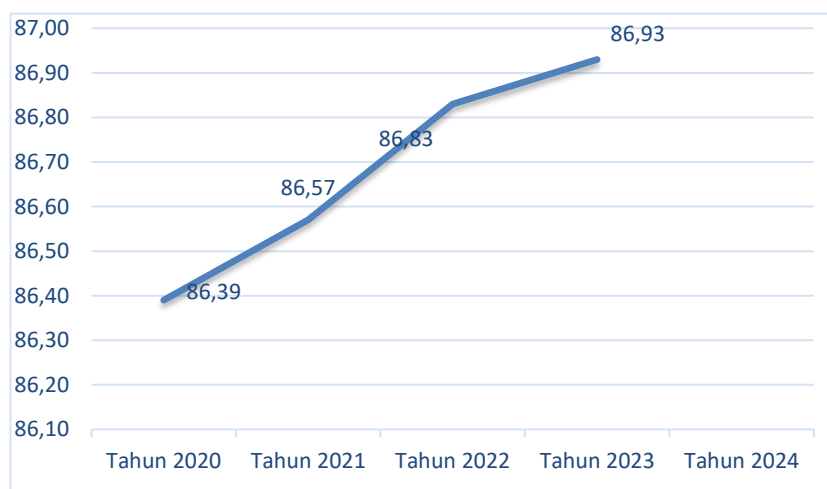
### 2.6.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender adalah salah satu ukuran tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Nilai IPG Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 belum dapat ditampilkan karena belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. IPG Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2023 IPG Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan 0,10 dibandingkan tahun 2022. Peningkatan capaian IPG ini menandakan bahwa adanya kemajuan dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan laki-laki dan perempuan. Realisasi nilai IPG tahun 2024 juga belum dapat dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, namun realisasi pada tahun 2023 sudah mencapai 98,95 % dari target akhir RPD.



**Grafik 3.20 Indeks Pembangunan Gender Penajam Paser Utara  
Tahun 2020 - 2024**

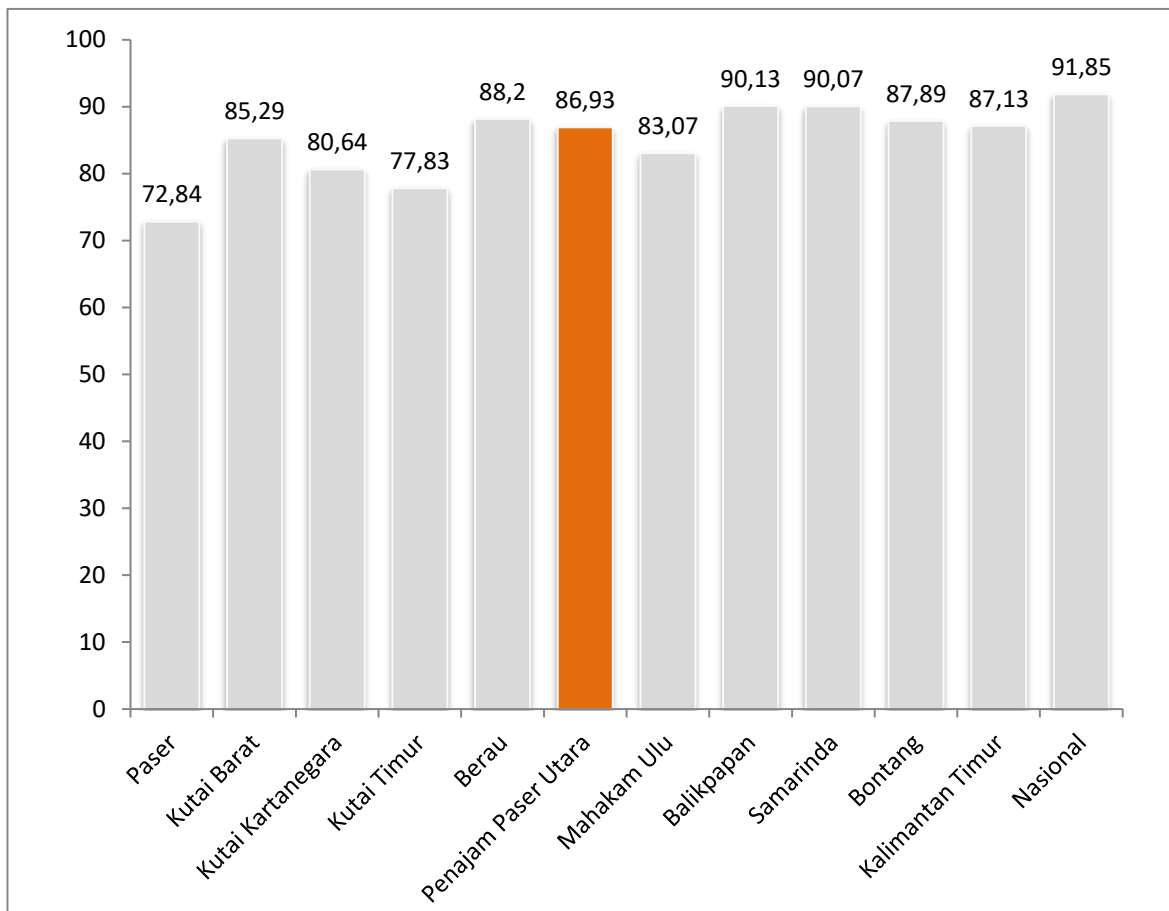


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2024

Nilai IPG Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan ke-6 terbesar dari 10 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, dan masih berada di bawah nilai IPG Provinsi Kalimantan Timur, serta di bawah IPG Nasional.



**Grafik 3.21 Indeks Pembangunan Gender Penajam Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib hadir dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak dan perempuan, dengan mendorong pembangunan manusia berbasis gender, di antaranya :

1. Menciptakan ruang publik yang ramah dan layak anak;
2. Memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menjamin persamaan perlakuan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan;
4. Meningkatkan akses perempuan terhadap pembangunan, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan;
5. Meningkatkan kemampuan perempuan sehingga mampu bersaing dengan laki-laki;
6. Memperhatikan kebutuhan dasar kodrat bagi perempuan;
7. Memberdayakan peran perempuan dalam memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dengan menggerakkan ekonomi skala mikro dan kecil;



8. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak;
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
8. Program Pengendalian Penduduk;
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana.

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender dengan pagu anggaran Rp 5.710.945.584,00, terealisasi Rp 5.223.017.098,00 sehingga capaian realisasi anggaran 91,46 %. Realisasi indikator sasaran strategis ini belum dapat ditampilkan karena belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini tidak dapat dihitung yang mengakibatkan nilai efisiensi penggunaan sumber daya anggaran juga tidak dapat ditampilkan.

**Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender</b>		5.710.945.584,00	5.223.017.098,00	91,46	-	-
<b>Indeks Pembangunan Gender</b>						
1	Program Pengendalian Penduduk	389.973.855,00	349.578.120,00			
2	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.176.590.429,00	1.149.786.947,00			



	Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
3	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	958.379.272,00	940.213.967,00			
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	28.157.715,00	27.712.775,00			
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	66.127.729,00	58.041.200,00			
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	305.755.537,00	276.509.393,00			
7	Program Perlindungan Khusus Anak	442.990.403,00	293.259.655,00			
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.713.684.447,00	1.585.009.373,00			
9	Program Perlindungan Perempuan	629.286.197,00	542.905.668,00			

## SASARAN 7

Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.7.1	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan	100 %	33	95	287,88	55	172,73
Rata-rata Capaian Kinerja					287,88		172,73

### 2.7.1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan

Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki berbagai *event* kebudayaan yang dilaksanakan secara rutin. Beberapa tujuannya antara lain untuk melestarikan budaya, memperkenalkan budaya lokal, meningkatkan kreatifitas generasi muda, serta meningkatkan visibilitas daerah sebagai destinasi wisata. Kegiatan kebudayaan yang rutin

dilaksanakan setiap tahun yaitu Festival Nondoi, Festival Tanjung Penajam, Festival Gilang Benuo Taka, dan event pemilihan berbagai duta seperti Duta Wisata.

Pembinaan kepemudaan berupa pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan kreativitas serta pembinaan karakter. Organisasi kepemudaan dapat berperan dalam mencetak pemimpin masa depan.

Tahun 2024 dari target yang ditetapkan 33 % dapat terealisasi 95 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 287,88 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, indikator ini telah jauh melampaui target, dengan capaian 172,73 %.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan, yaitu :

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
7. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
8. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
9. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
10. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;
11. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Budaya Politik;
12. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.



Festival Kebudayaan Nondoi

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan pagu anggaran Rp 60.325.478.597,00, terealisasi Rp 54.456.056.874,00 sehingga capaian realisasi anggaran 90,27 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 97,29 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 68,64 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target di dalam perencanaan.

**Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan</b>	60.325.478.597,00	54.456.056.874,00	97,29	287,88	68,64
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan					
1 Program Pengembangan Kebudayaan	1.762.925.456,00	1.751.560.381,00			
2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	721.943.000,00	718.000.440,00			
3 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	75.000.000,00	72.550.085,00			
4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.585.434.287,00	982.015.143,00			
5 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	18.086.754.519,00	15.460.691.558,00			
6 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
7 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.387.665.020,00	2.265.419.459,00			
8 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	191.392.750,00	181.655.830,00			
9 Program PEMBINAAN dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	762.145.653,00	717.777.615,00			





Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
10	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	599.195.782,00	573.020.897,00			
11	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	30.306.446.084,00	27.989.471.751,00			
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.846.576.046,00	2.743.893.715,00			

### Tujuan 3

### Meningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	53,89 (Cukup)	62,85 (Baik)	68,5	108,99	65,50	104,58
3.2	Indeks SPBE	2,85 (Baik)	3 (Baik)	2,87	95,67	3	95,67
Rata-rata Capaian Kinerja					102,33		100,13

#### 3.1. Indeks Reformasi Birokrasi

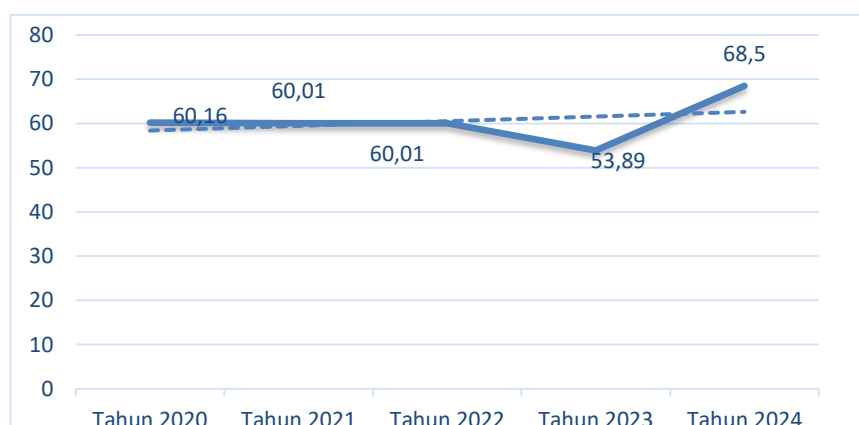
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan menjadi 68,5 dari indeks 53,89 pada tahun 2023. IRB Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tahun 2019 sudah mengalami peningkatan dan sudah berada pada kategori B atau dengan predikat Baik, namun



mengalami penurunan indeks pada tahun 2023 salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya informasi yang didapat terhadap perubahan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tentang evaluasi reformasi birokrasi, yang mengakibatkan Pemerintah Penajam Paser Utara hanya mengajukan satu tema yaitu pengentasan kemiskinan. Peningkatan IRB pada tahun 2023 menjadi bukti bahwa Pemerintah Penajam Paser Utara terus berupaya dan terus berkolaborasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempercepat agenda pembangunan melalui pencapaian yang berdampak.

**Grafik 3.22 Indeks Reformasi Birokrasi Penajam Paser Utara  
Tahun 2020 - 2024**



Nilai IRB 68,5 dengan interpretasi B pada tahun 2024 dengan RB General 59,92 dan RB Tematik 8,58. Kategori B atau predikat Baik menginterpretasikan bahwa sebagian kecil kriteria pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing telah terpenuhi karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Dari target 62,85 yang ditetapkan, terealisasi 68,5 sehingga capaian kinerja 108,99 % atau kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 nilai Indeks Reformasi Birokrasi sudah tercapai 104,58 %.

Adapun upaya yang dilakukan dalam peningkatan IRB, antara lain:

1. Menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi yang selaras dengan Roadmap RB Nasional;
2. Meningkatkan kolaborasi seluruh komponen yang ada;
3. Menyusun Rencana Aksi yang berdampak hasil;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pencapaian target;
5. Melaporkan seluruh tema tematik yang ada pada portal RB.



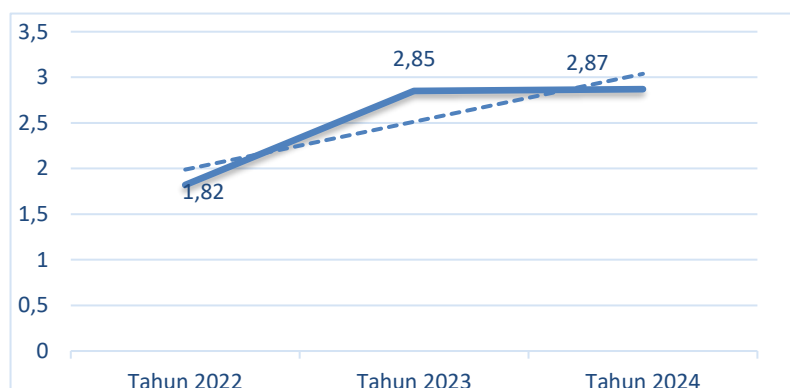
### 3.2. Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indeks yang mengukur penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 terjadi penambahan sebesar 0,02 poin menjadi 2,87 (Baik) dibanding tahun sebelumnya Indeks SPBE 2,85. Target Indeks SPBE 3 pada tahun 2024 terealisasi 2,87 dengan capaian 95,67 % atau dengan kategori Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Indeks SPBE tahun 2024 masih kurang 0,13 poin dengan capaian kinerja 95,67 %.



**Grafik 3.23 Indeks SPBE Penajam Paser Utara Tahun 2022 - 2024**



Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 dengan nilai 2,87 atau predikat Baik menggambarkan bahwa pelaksanaan SPBE internal banyak aspek-aspek SPBE yang telah diterapkan sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan. Beberapa keunggulan yang dimiliki yaitu Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah, Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan Layanan Publik Sektoral 1, 2, dan 3. Namun terdapat kelemahan yaitu Inovasi Proses Bisnis SPBE, Layanan Pusat Data, Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah, Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE, Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi



SPBE, Audit Keamanan SPBE, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah

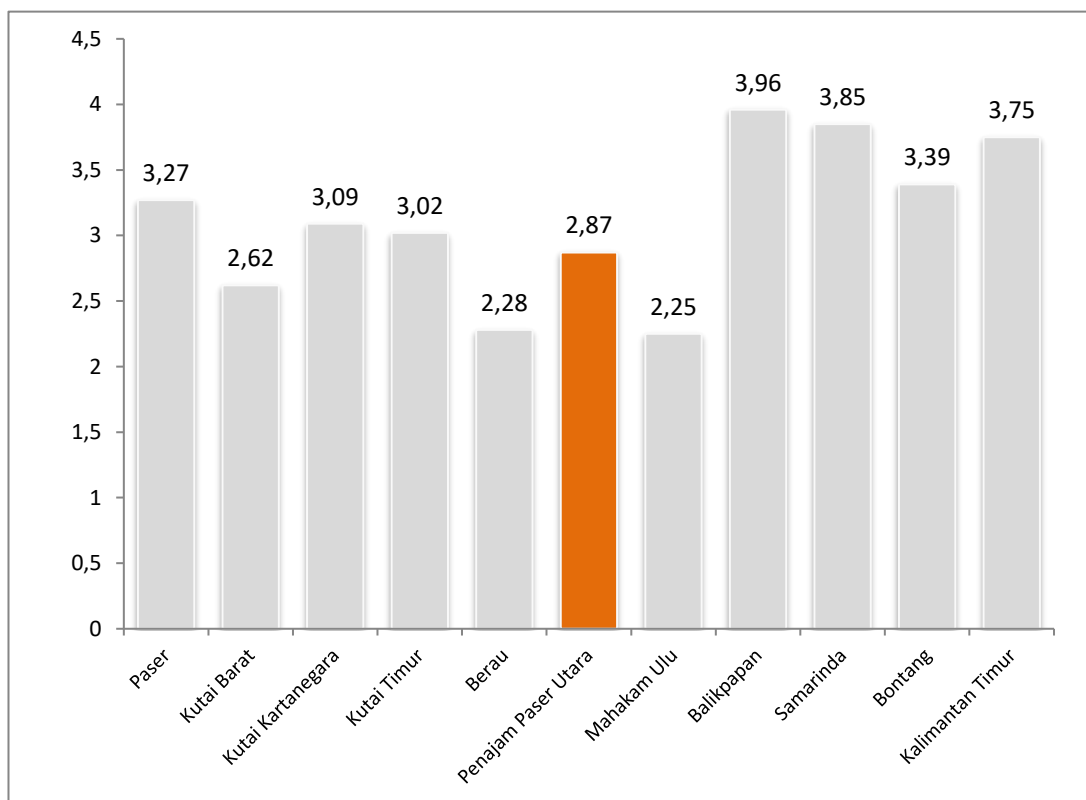
Berikut perolehan nilai pada setiap domain dan aspek penilaian :

**Tabel 3.14 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek Tahun 2024**

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,87
Domain Kebijakan SPBE	3,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	3,00
Domain Tata Kelola SPBE	2,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,27
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,38
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,51
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,40
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,67

Indeks SPBE Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 berada pada urutan ke-7 dengan dari Indeks SPBE tertinggi se-Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, dan masih di bawah Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Timur.

**Grafik 3.24 Indeks SPBE Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur Tahun 2024**



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2024

Strategi ke depan yang dapat dilakukan dalam peningkatan SPBE Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

1. Memperbaiki kebijakan internal dan menggunakan penerapan layanan manajemen pengetahuan agar data dukung terkait kegiatan SPBE beserta revidi, evaluasi, dan tindak lanjut suatu kebijakan yang berkelanjutan dapat diintervensi dengan baik;
2. Menciptakan suatu inovasi proses bisnis yang dapat meningkatkan efisiensi segala prosedur;
3. Memanfaatkan layanan pusat data nasional dan sistem penghubung layanan;
4. Membuat standarisasi tata kelola SPBE yang dapat diukur secara kuantitatif;
5. Membuat pedoman manajemen SPBE terpadu;
6. Menyediakan layanan SPBE secara elektronik untuk mengakomodir kebutuhan seluruh perangkat daerah.

## SASARAN 8

### Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3.8.1	Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	B	100	B	100
3.8.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	5,37 %	7,30	6,12	83,84	9,50	64,42
Rata-rata Capaian Kinerja					<b>91,92</b>		<b>82,21</b>

#### 3.8.1. Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah

Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi oleh tim evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (35 perangkat daerah). Evaluasi ini bertujuan untuk menilai berfungsinya implementasi dan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam seluruh perangkat daerah dalam rangka

mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi AKIP seluruh perangkat daerah pada tahun 2024 terhadap AKIP tahun anggaran 2023 menunjukkan bahwa Rata-rata Capaian AKIP Perangkat Daerah sebesar 67,8 (B) dengan interpretasi Baik, dengan rincian rata-rata tiap komponen sebagai berikut :

**Tabel 3.15 Hasil Evaluasi AKIP Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara T.A 2023**

No.	Komponen	Bobot (%)	Rata-rata Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,34
2	Pengukuran Kinerja	30	19,44
3	Pelaporan Kinerja	15	11,16
4	Evaluasi Internal	25	14,13
Total		100	67,08

Dari hasil evaluasi AKIP tahun 2023 oleh tim evaluator AKIP pemerintah daerah tersebut di atas, komponen penilaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja sudah mencapai dengan hasil yang Sangat Baik, namun komponen Evaluasi Internal masih dalam kategori Cukup dikarenakan sebagian besar perangkat daerah sudah melakukan evaluasi internal pada masing-masing perangkat daerah tetapi tidak terdokumentasi dengan baik sehingga tidak dapat dibuktikan dengan bukti dukung. Dari target B pada Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah, terealisasi B sehingga capaian kinerja sebesar 100 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat daerah tahun 2023 sudah mencapai 100 %.



Nilai AKIP Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada pada predikat B dengan nilai yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2022.



**Tabel 3.16 Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara  
Tahun 2022 - 2024**

No.	Komponen	Bobot (%)	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,81	20,85	21,09
2	Pengukuran Kinerja	30	16,76	16,82	17,14
3	Pelaporan Kinerja	15	10,11	10,17	9,99
4	Evaluasi Internal	25	12,58	13,28	13,96
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>60,26</b>	<b>61,11</b>	<b>62,19</b>

Strategi ke depan yang dapat dilakukan dalam meningkatkan Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah yang selaras dengan peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, antara lain:

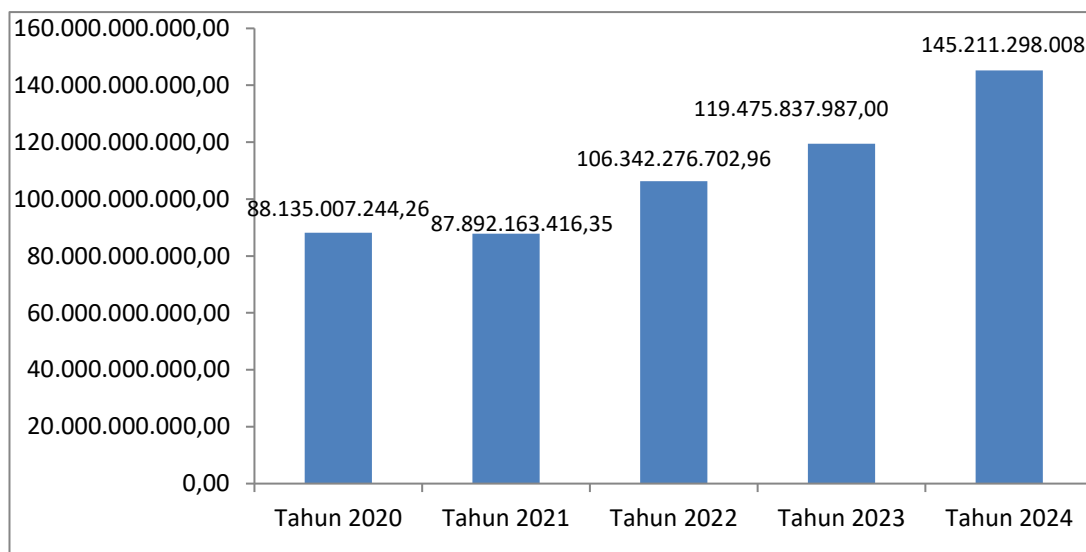
1. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi oleh evaluator pemerintah pusat maupun evaluator daerah;
2. Meningkatkan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperdalam pemahaman tentang AKIP;
3. Meningkatkan komitmen dan sinergitas seluruh perangkat daerah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tim AKIP dan tim evaluator AKIP Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan AKIP.

### **3.8.2. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



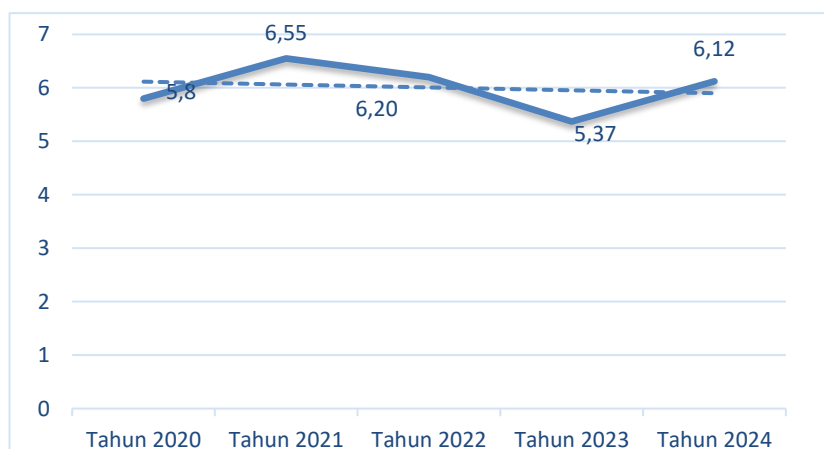
**Grafik 3.25 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 - 2024**



Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 adalah Rp 145.211.298.008,00. Jumlah ini meningkat sebesar 21,54 % dibanding PAD tahun 2023 dengan PAD sebesar Rp 119.475.837.987,00. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2024 mencapai 6,12 % dari target 7,30 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 83,84 %. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 49.497.656.912,00, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp 74.033.188.951,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 2.671.835.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 19.008.617.145,00.



**Grafik 3.26 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**





Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah mengalami nilai yang fluktuatif. Nilai kontribusi PAD ini selaras dengan nilai PAD yang dapat direalisasikan. Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya dalam optimalisasi pendapatan daerah karena melalui pendapatan daerah dapat diwujudkan kemandirian daerah. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan asli daerah harus ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui peningkatan peran BUMD dan menciptakan inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Dari target 7,30 % Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2024, terealisasi 6,12 % sehingga capaian kinerja 83,84 atau kategori kinerja Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah masih kurang sebesar 3,38 % dengan capaian kinerja 64,42 %.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain yaitu:

- a. Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi;
- b. Penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru melalui pemutakhiran data serta analisis potensi daerah;
- c. Revitalisasi fasilitas umum pendukung penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD seperti pasar, tempat parkir, pelabuhan, fasilitas objek wisata dan lain-lain;
- d. Penertiban atau penegakkan Perda pajak daerah dan retribusi daerah penguatan koordinasi antar pihak terkait seperti Satpol PP dan petugas pemungut pajak;
- e. Meningkatkan fungsi BUMD dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah;
- f. Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien, yaitu :

1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Program penyelenggaraan penataan ruang.



## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien dengan pagu anggaran Rp 6.622.012.768,00, terealisasi Rp 5.241.610.830,00 sehingga capaian realisasi anggaran 79,15 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 91,92 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 13,89 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>	6.622.012.768,00	5.241.610.830,00	79,15	91,92	13,89
<b>Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah</b>					
<b>Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>					
1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.961.017.295,00	1.689.841.994,00			
2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.242.139.978,00	1.046.751.742,00			
3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.418.855.495,00	2.505.017.094,00			

### SASARAN 9

#### Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3.9.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,51	83,55	83,57	100,02	90,07	92,78
Rata-rata Capaian Kinerja					100,02		92,78

### 3.9.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara berkala digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang salah satunya dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi terhadap pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 terealisasi 83,57 dari target yang ditetapkan 83,55, sehingga capaian kinerjanya 100,02 % atau kategori kinerja Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 masih kurang 6,50 poin dan sudah mencapai 92,78 %.



Berdasarkan hasil rekapitulasi Laporan SKM dari 62 perangkat daerah dan unit kerja terhadap 9 unsur yang disurvei, diperoleh nilai sebagai berikut :

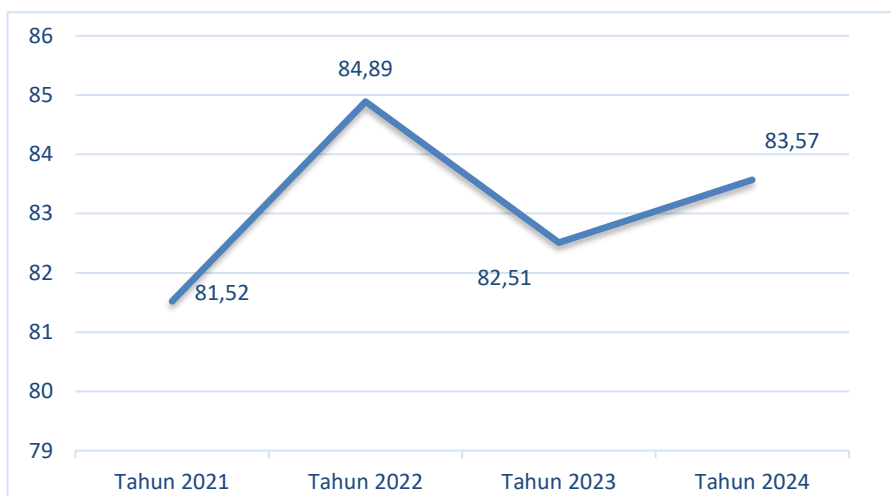
**Tabel 3.18 Hasil Evaluasi AKIP Seluruh Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dan 2024**

No.	Unsur Pelayanan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Nilai	Kinerja	Nilai	Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,24	Baik	3,33	Baik
2	Sistem Mekanisme Prosedur Pelayanan	3,14	Baik	3,30	Baik
3	Waktu Pelayanan	3,10	Baik	3,23	Baik
4	Biaya/ Tarif	3,56	Sangat Baik	3,69	Sangat Baik
5	Produk Sesifikasi Jenis Pelayanan	3,17	Baik	3,32	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,22	Baik	3,34	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,28	Baik	3,39	Baik
8	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	3,10	Baik	3,22	Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,33	Baik	3,45	Baik



Pada sembilan unsur yang disurvei terhadap pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan sudah Baik.

**Grafik 3.27 Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 - 2024**



Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami fluktuasi berdasarkan hasil survei penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, antara lain:

1. Mengevaluasi secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik;
4. Mengevaluasi kebijakan yang ada agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik, yaitu :

1. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
2. Program penyelenggaraan statistik sektoral;
3. Program pengelolaan aplikasi informatika;
4. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
5. Program penyelesaian sengketa tanah garapan;
6. Program pencatatan sipil;



7. Program pendaftaran penduduk;
8. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
9. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
10. Program pengelolaan profil kependudukan;
11. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik dengan pagu anggaran Rp 1.366.458.699.412,80, terealisasi Rp 1.299.588.972.899,00 sehingga capaian realisasi anggaran 95,11 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 100,02 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 4,91 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik</b>		1.366.458.699.412,80	1.299.588.972.899,00	95,11	100,02	4,91
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>						
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	429.370.000,00	346.324.874,00			
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	656.683.522,00	524.362.207,00			
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.583.047.110,00	4.198.827.914,00			
4	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	55.154.963.118,00	54.937.488.691,00			
5	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	817.967.067,00	644.076.964,00			
6	Program Pencatatan Sipil	291.665.000,00	279.710.860,00			
7	Program Pendaftaran Penduduk	407.319.178,00	358.825.500,00			
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.202.177.706,00	23.244.949.881,69			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.279.066.160.231,80	1.214.296.526.975,31			
10	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	118.827.000,00	113.014.883,00			
11	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	730.519.480,00	644.864.149,00			

### Tujuan 3

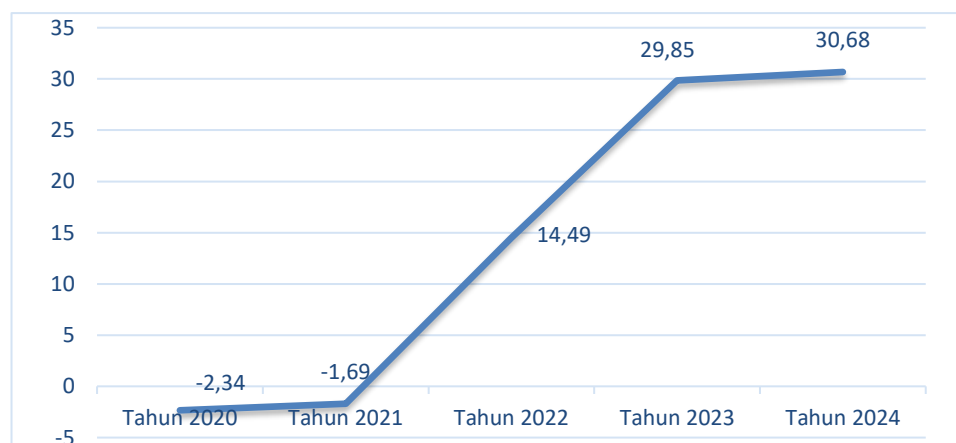
### Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	29,85	34,85	30,68	88,03	10	306,80
Rata-rata Capaian Kinerja					88,03		306,80

#### 4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

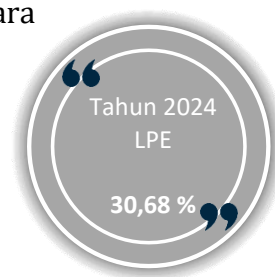
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Grafik 3.28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Penajam Paser Utara  
Tahun 2020 - 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami perbaikan dan peningkatan sejak tahun 2021. Perekonomian Penajam Paser Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,83 persen dari tahun 2023. Jika dijabarkan menurut lapangan usaha, maka kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara hampir semua jenis lapangan usaha mengalami peningkatan. Konstruksi menjadi lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 73,83 %.



Tahun 2024 dengan target 34,85 terealisasi 30,68 sehingga capaian kinerjanya sebesar 88,03 % atau kategori kinerja Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 telah jauh melebihi target, dengan capaian 306,80 %.

**Tabel 3.20 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**

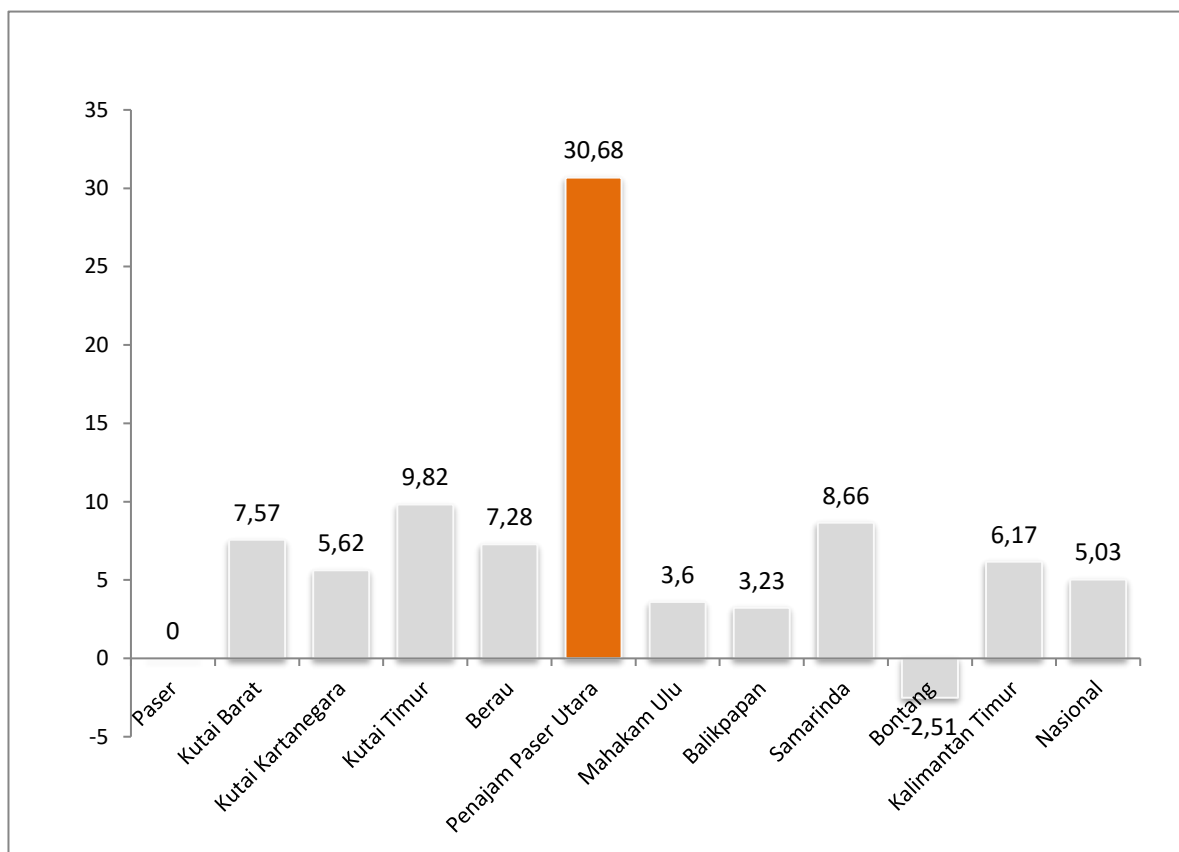
Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,5	0,07	-0,11	0,62	1,46
B	Pertambangan dan Penggalan	-5,16	-14,93	3,29	11,74	4,65
C	Industri Pengolahan	-7,21	-2,31	0,26	0,17	1,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,61	7,07	4,48	15,97	24,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,43	5,39	7,35	12,33	11,19
F	Konstruksi	8,30	25,20	89,82	110,97	73,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,21	3,97	5,82	6,23	9,64
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,31	2,74	7,76	9,68	9,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,42	2,57	8,02	9,14	18,31
J	Informasi dan Komunikasi	10,09	7,72	6,13	4,47	13,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,56	1,66	5,79	13,27	14,01
L	Real Estat	2,17	-0,93	1,52	1,97	17,28
M,N	Jasa Perusahaan	-3,37	1,32	4,63	6,56	11,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-6,26	-3,56	7,11	6,75	20,09
P	Jasa Pendidikan	2,27	2,96	3,28	3,66	4,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,25	18,56	4,30	6,65	13,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-3,47	0,25	6,64	5,68	14,85
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>-2,34</b>	<b>-1,69</b>	<b>14,49</b>	<b>29,40</b>	<b>30,68</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto Non Migas</b>		<b>-0,96</b>	<b>1,59</b>	<b>15,74</b>	<b>32,23</b>	<b>33,16</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025



Laju Pertumbuhan Ekonomi penajam Paser Utara masih berada pada posisi tertinggi dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional. Lima lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Penajam Paser Utara yaitu Konstruksi 110,42; Pengadaan Listrik dan Gas 15,97; Pertambangan dan Penggalian 13,93; Jasa Keuangan dan Asuransi 13,27; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 12,33.

**Grafik 3.29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se Kalimantan Timur, Prov. Kalimantan Timur, Nasional Tahun 2024**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) didukung oleh dua sasaran strategis, yaitu Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian, dan Sasaran Strategis Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah.



Peninjauan Pasar Penajam



## SASARAN 10

### Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.10.1	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	32,23	39,90	33,16	83,11	4,83	686,54
Rata-rata Capaian Kinerja					83,11		686,54

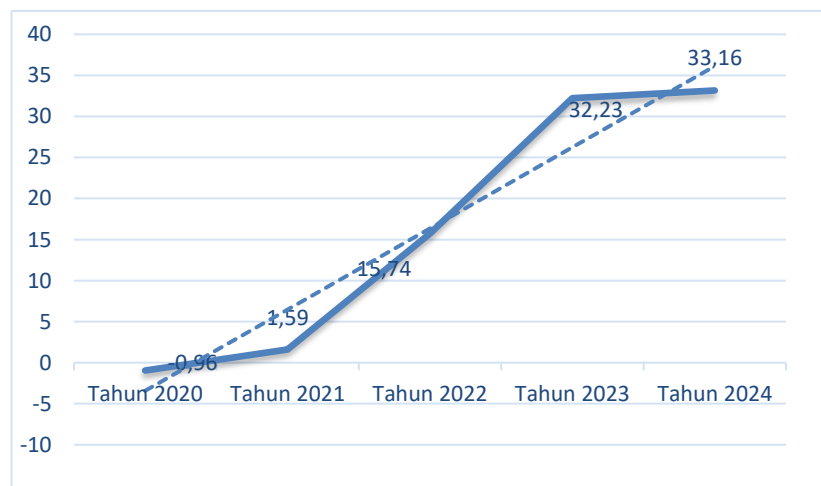
#### 4.10.1. LPE Non Pertambangan dan Penggalian

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Non Pertambangan dan Penggalian merupakan salah satu sektor perekonomian yang turut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar dalam PDRB. Sektor Non Pertambangan dan Penggalian menyumbang sebesar 33,16 % PDRB di tahun 2024. LPE Non Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penambahan LPE Non Migas sebesar 0,93 %. Dari target 39,90 % tahun 2024 terealisasi 33,16 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 83,11 % atau kategori kinerja Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 LPE Non Migas tahun 2024 telah jauh melampaui dari yang ditargetkan dengan capaian kinerja 686,54 %.

Tahun 2024  
LPE Non Migas

33,16

**Grafik 3.30 LPE Non Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2023**



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara, 2025

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Pertambangan dan Penggalian, antara lain yaitu:

- a. Mengembangkan UMKM yang ada untuk menghasilkan produk unggulan daerah;
- b. Meningkatkan investasi dengan menarik para investor;
- c. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor non migas melalui dukungan UMKM di bidang pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri rumah tangga;
- d. Meningkatkan daya saing produk lokal selain komoditas migas.

Pengembangan sektor pertanian dan perikanan



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian, yaitu :

1. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
2. Program perizinan usaha pertanian;
3. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
4. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
5. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Program penyuluhan pertanian;
7. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
8. Program standardisasi dan perlindungan konsumen;
9. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan;
10. Program pengendalian izin usaha industri;
11. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional;
12. Program perencanaan dan pembangunan industri;
13. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
14. Program pengelolaan perikanan tangkap;
15. Program pengelolaan perikanan budidaya;
16. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
17. Program Pemasaran Pariwisata;



18. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
19. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
20. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
21. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
22. Program perekonomian dan pembangunan;
23. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
24. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian dengan pagu anggaran Rp 72.396.076.483,00, terealisasi Rp 65.186.311.043,35 sehingga capaian realisasi anggaran 90,04 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 83,11 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar -8,34 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian</b>	72.396.076.483,00	65.186.311.043,35	90,04	83,11	-8,34
LPE Non Pertambangan dan Penggalian					
1 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.723.019.306,00	3.591.757.250,00			
2 Program Perizinan Usaha Pertanian	2.214.125.651,00	1.703.715.835,00			
3 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.187.789.099,00	18.516.659.095,00			
4 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.229.861.708,00	6.934.513.419,35			
5 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.340.159.509,00	1.021.026.482,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
6	Program Penyuluhan Pertanian	1.340.571.258,00	1.323.378.725,00			
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	338.406.400,00	256.818.550,00			
8	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	215.000.000,00	213.978.762,00			
9	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.669.010.436,00	2.114.531.160,00			
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	54.906.904,00	41.830.266,00			
11	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9.996.150,00	8.910.000,00			
12	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.816.780.715,00	2.447.927.331,00			
13	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	25.410.000,00			
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.504.922.674,00	5.046.181.746,00			
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.486.641.849,00	8.208.551.820,00			
16	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	311.540.100,00	296.277.985,00			
17	Program Pemasaran Pariwisata	1.793.669.827,00	1.779.719.889,00			
18	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.248.158.873,00	4.147.093.041,00			
19	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	128.610.000,00	125.692.119,00			
20	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	866.526.128,00	864.014.198,00			
21	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	221.131.427,00	196.245.570,00			
22	Program Perekonomian dan Pembangunan	6.416.431.039,00	6.095.308.750,00			
23	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	28.856.000,00	21.093.600,00			
24	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	219.961.430,00	205.675.450,00			



**SASARAN 11****Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah**

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.11.1	Nilai Realisasi PMDN dan PMA	Rp 1.637.143.260.000	1.040.366.000.000	3.705.197.869.077	356,14	1.068.366.000.000	346,81
Rata-rata Capaian Kinerja					356,14		346,81

**4.11.1. Nilai Realisasi PMDN dan PMA****Tabel 3.22 Nilai Investasi Tahun 2020 - 2024**

Tahun	Nilai Investasi		Jumlah Investasi (Rp)
	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	
Tahun 2020	84.528.000.000	487.048.200.000	571.576.200.000
Tahun 2021	23.400.880.000	404.886.000.000	428.286.880.000
Tahun 2022	141.577.097.948	1.253.095.900.000	1.394.672.997.948
Tahun 2023	54.037.760.000	852.128.300.000	906.166.060.000
Tahun 2024	811.634.357.488	2.893.563.511.589	3.705.197.869.077

Investasi di Kabupaten Penajam Paser Utara masih didominasi oleh investasi dalam negeri (PMDN) dan didominasi oleh sektor kimia dan farmasi (Kilang Pertamina Nasional), serta sektor hotel dan restoran. Nilai Investasi di Tahun 2024 mengalami peningkatan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Realisasi Investasi PMA pada tahun 2024 sebesar Rp 3.705.197.869.077,00,- , nilai ini mengalami penambahan investasi sebesar Rp 2.799.031.809.077,00 jika dibandingkan tahun 2023 dengan investasi sebesar Rp 906.166.060.000,00-. Penambahan nilai investasi PMA sebesar Rp 757.596.597.488,00,- dan penambahan nilai investasi PMDN sebesar Rp 2.041.4335.211.589,00.

Nilai Realisasi PMDN dan PMA tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 356,14 %. Jika



dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026, Nilai Realisasi PMDN dan PMA tahun 2024 telah jauh melampaui target, dimana capaian kinerjanya mencapai 239,92 %.

Adapun faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Realisasi PMDN dan PMA Kabupaten Penajam Paser Utara antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan keberlangsungan dan keberlanjutan investasi;
- b. Peningkatan promosi investasi;
- c. Optimalisasi pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Nilai Realisasi PMDN dan PMA, antara lain:

- a. Mengoptimalkan sumber investasi;
- b. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinvestasi;
- c. Penyederhanaan izin investasi;
- d. Meningkatkan promosi penanaman modal;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah, yaitu:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal;
2. Program promosi penanaman modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah dengan pagu anggaran Rp 1.924.191.475,00 terealisasi Rp 1.545.887.107,00 sehingga capaian realisasi anggaran 80,34 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 356,14 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 77,44 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori tidak efisien sehingga dibutuhkan evaluasi dalam menentukan target di dalam perencanaan.



**Tabel 3.23 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis  
Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah</b>		1.924.191.475,00	1.545.887.107,00	80,34	356,14	77,44
<b>Nilai Realisasi PMDN dan PMA</b>						
1	program pengembangan iklim penanaman modal	541.036.080,00	471.406.239,00			
2	program promosi penanaman modal	261.633.111,00	177.360.268,00			
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	245.851.085,00	221.398.731,00			
4	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	199.344.939,00	170.583.809,00			
5	program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	676.326.260,00	505.138.060,00			

## Tujuan 5

## Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	65 (Cukup)	-	-	70 (Cukup)	-
5.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	-	23,30	-	-	25,50	-
Rata-rata Capaian Kinerja					-		-

### 11.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas Pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Infrastruktur dasar pada umumnya terdiri dari infrastruktur Listrik, telekomunikasi, jalan, sanitasi, air bersih, dan drainase. Ketersediaan infrastruktur dasar yang optimal dapat mendukung dan meningkatkan akses masyarakat

dalam menjangkau sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Infrastruktur air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara dinilai masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena akses air bersih belum dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya yang berada di luar cakupan PDAM. Namun peningkatan cakupan rumah tangga yang mendapatkan air bersih, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Infrastruktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara juga masih belum maksimal, dimana persentase jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2024 hanya sebesar 33,38 %, sisanya merupakan jalan kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat.

Pembangunan infrastruktur secara umum sudah dirasakan di hamper di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui keberadaan UPT. PU di setiap kecamatan. Keberadaan UPT. PU di setiap kecamatan membantu mewujudkan percepatan kehadiran pemerintah dalam penyediaan layanan publik pada sektor infrastruktur.

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur merupakan indikator baru di dalam dokumen perencanaan Kabupaten Penajam Paser Utara. IKLI belum dilakukan pengukuran sampai dengan tahun 2024, masih pada tahap penyusunan pedoman awal pembuatan kajian sehingga nilai IKLI belum dapat disajikan.

## **11.2. Persentase Penurunan Emisi GRK**

Emisi GRK adalah pelepasan gas-gas yang mempunyai potensi untuk menyebabkan peningkatan efek rumah kaca di atmosfer bumi. Gas Rumah Kaca (GRK) menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi.

Persentase Penurunan Emisi GRK Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat ditampilkan karena belum dilakukan pengukuran terhadap besaran emisi GRK di Kabupaten Penajam Paser Utara. Potensi peningkatan emisi GRK di Kabupaten Penajam Paser Utara paling banyak disebabkan oleh kebakaran hutan, dan perubahan fungsi lahan dan limbah pabrik kelapa sawit.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selalu berupaya dalam melestarikan lingkungan. Melalui Inovasi SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit dan Gerakan Sedekah Sampah) sehingga pengelolaan sampah yang tidak tepat oleh masyarakat dapat dikurangi, Inovasi SAHABAT LAMA (Sejahtera Berkat Layanan Sampah Mobile Amanah) yaitu penjemputan secara terjadwal ke Bank Sampah Unit tanpa dipungut biaya, dan Inovasi PELITA KESAH (Pelajar Ikut Aktif Kelola Sampah).





Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan EMisi GRK, antara lain:

1. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dengan cara konservasi tanah dan air melalui terasering serta vegetasi penutup untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi; pembatasan konversi lahan gambut.
2. Pengelolaan sampah yang tepat.
3. Memberi kesadaran kepada masyarakat tentang optimalisasi penggunaan pupuk.
4. Rehabilitasi dan restorasi lahan.

## SASARAN 12

### Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.12.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,25	71,75	71,1	99,09	71,96	98,80
Rata-rata Capaian Kinerja					99,09		98,80

#### 24.12.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

1. Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

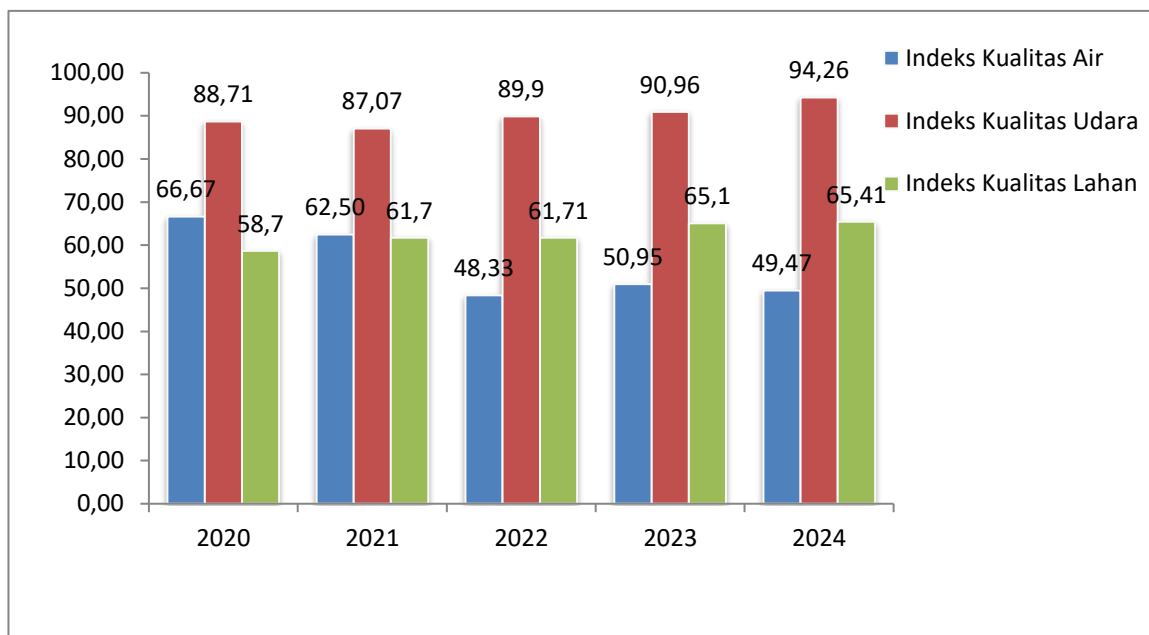
Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

1. Indeks Kualitas/ Pencemaran Air

## 2. Indeks Kualitas/ Pencemaran Udara

## 3. Indeks Kualitas Lahan

**Grafik 3.31 Indeks Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan  
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengetahui secara umum terhadap baku mutu air. Pengambilan sample air biasanya dilakukan terhadap air permukaan, seperti sungai, danau dan air permukaan lainnya yang biasa digunakan masyarakat.

IKA 81 – 100 tergolong memenuhi baku mutu;

IKA 61 – 80 tergolong tercemar ringan;

IKA 41 – 60 tergolong tercemar sedang;

IKA  $\leq$  40 tergolong tercemar berat.

IKA Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 tergolong dalam tercemar sedang dengan indeks sebesar 49,47, menurun jika dibandingkan tahun 2023 dengan indeks 50,95. IKA masih tergolong tercemar sedang ini dapat terjadi karena adanya indikasi penurunan kualitas sungai yang dilakukan pemantauan dan terbatasnya jumlah parameter uji yang dianalisa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air, yaitu:

- Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;



- b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
- d. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

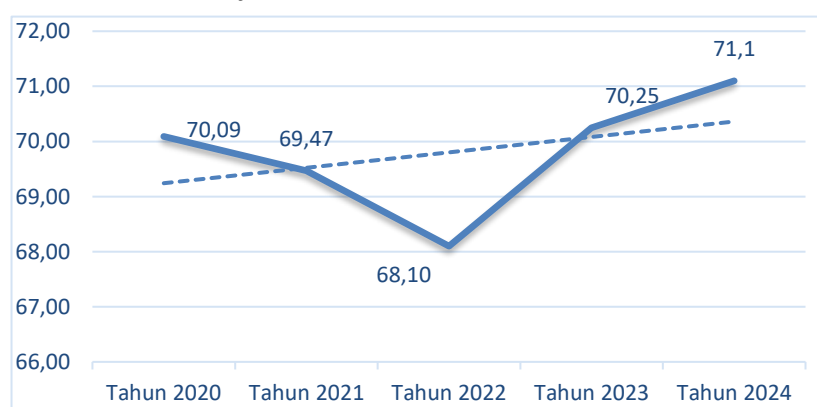
Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu untuk mengetahui kualitas udara yang ada dalam suatu wilayah. Nilai IKU yang semakin tinggi menandakan bahwa kualitas udara di suatu daerah semakin baik, dan begitu pula sebaliknya. IKU Kabupaten Penajam Paser Utara 94,26 tergolong sangat baik karena masih dalam rentang > 80 persen. IKU Tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan IKU di tahun 2024 menjadi 94,26 jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 90,96.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara, yaitu:

- a. Melakukan pemantauan kualitas udara dan meningkatkan pengawasan ke sumber pencemar;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam program pengendalian pencemaran udara;
- c. Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran udara.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambutan Lahan. IKL juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023, dari IKL 65,1 menjadi 65,41 di tahun 2024.

**Grafik 3.32 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



IKLH Kabupaten Penajam Paser Utara beberapa tahun terakhir mengalami nilai fluktuatif, dengan tren nilai meningkat. Pada tahun 2024 IKLH Kabupaten Penajam Paser



Utara sebesar 71,1 dari target yang ditetapkan 71,75 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,09 atau kategori kinerja Sangat Memuaskan. Nilai IKLH meningkat sebanyak 0,85 poin dari nilai tahun 2023. Peningkatan IKLH ini menggambarkan bahwa semakin baik kondisi lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 masih kurang 0,86 poin dan capaian kinerjanya sebesar 98,80 %.



Penghargaan daerah yang diterima terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

a. Adipura

b. Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menerima penghargaan sebagai Top Inovasi pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 dengan judul inovasi "SERBU GASS" (Seratus Bank Sampah Unit dan Gerakan Sedekah Sampah). Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, antara lain:

a. Pemantauan rutin kualitas air sungai

Upaya pengendalian dan pengelolaan kualitas air sungai dilakukan dengan cara mengambil sampel air sungai dari 14 titik sampel sungai di Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Pengukuran rutin kualitas udara

Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan di beberapa lokasi yang secara proporsional mewakili wilayah pantau Kabupaten Penajam Paser Utara.

c. Pengawasan rutin usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan RKL-RPL

Pengawasan rutin usaha dan/atau terhadap pelaksanaan RKL-RPL dilakukan secara rutin, diantaranya kegiatan pertambangan, perkebunan, industri dan lain-lain.

d. Program Sekolah Adiwiyata

Merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

e. Peningkatan operasional angkutan sampah

Pemenuhan kebutuhan armada atau kendaraan angkutan sampah yang dibutuhkan.

f. Inovasi SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit dan Gerakan Sedekah Sampah)



Program Inovasi SERBU GASS adalah program yang mewajibkan kelurahan/ desa membentuk minimal 2 bank sampah unit. Masyarakat di kelurahan/ desa yang telah memilah sampah dari rumah dapat menyetorkan sampah yang masih bernilai ekonomis ke bank sampah unit terdekat. Adapun sampah yang disetorkan dapat ditabung maupun disedekahkan. Hasil sedekah sampah akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

g. Inovasi SAHABAT LAMA (Sejahtera Berkat Layanan Sampah Mobile Amanah)

Inovasi SAHABAT LAMA (Sejahtera Berkat Layanan Sampah Mobile Amanah) yaitu penjemputan secara terjadwal ke Bank Sampah Unit tanpa dipungut biaya.

h. Inovasi PELITA KESAH (Pelajar Ikut Aktif Kelola Sampah)

Melibatkan para pelajar turut serta aktif dalam pengelolaan sampah.

i. Lomba Bank Sampah unit Se-Kabupaten Penajam Paser Utara

Saat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara mengadakan Lomba Bank Sampah.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Program pengelolaan persampahan;
2. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
3. Program perencanaan lingkungan hidup;
4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
6. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
8. Program pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat.



Penghargaan Adipura  
Kategori Kota Kecil

## Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan pagu anggaran Rp 36.009.505.542,00 terealisasi Rp 35.291.399.546,00 sehingga capaian realisasi anggaran 98,01 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 99,09 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 1,09 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.24 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	36.009.505.542,00	35.291.399.546,00	98,01	99,09	1,09
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>					
1 Program Pengelolaan Persampahan	8.154.369.965,00	7.953.814.544,00			
2 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84.791.000,00	65.991.767,00			
3 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	466.304.000,00	448.370.720,00			
4 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	787.973.345,00	746.497.963,00			
5 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	26.002.451.384,00	25.618.311.637,00			
6 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	11.922.000,00	10.267.200,00			
7 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.172.000,00	58.357.516,00			
8 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5.264.000,00	4.914.500,00			
9 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	437.257.848,00	384.873.699,00			



## SASARAN 13

### Peningkatan Ketahanan Kebencanaan

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.13.1	Indeks Risiko Bencana	129,44	125	131,81	94,83	120,66	91,54
Rata-rata Capaian Kinerja					94,83		91,54

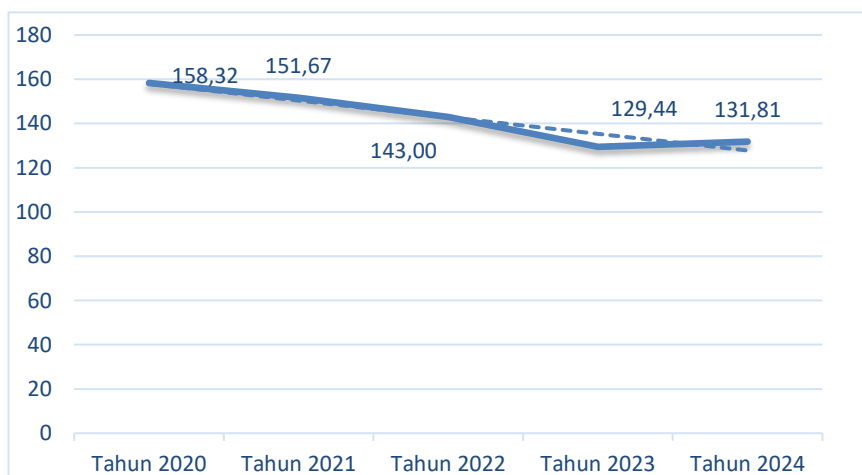
#### 9.13.1. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko bencana suatu wilayah. Indeks Risiko Bencana ditentukan oleh nilai indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Semakin tinggi (naik) nilai Indeks Risiko Bencana berarti menggambarkan bahwa upaya mitigasi risiko dan perbaikan manajemen bencana oleh pemerintah semakin rendah, dan sebaliknya semakin rendah (turun) Indeks Risiko Bencana, maka menunjukkan bahwa upaya mitigasi risiko dan perbaikan manajemen bencana semakin baik.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 ditargetkan 125, terealisasi 94,84 dengan capaian kinerja sebesar 131,80 % atau dalam kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2026 Indeks Risiko Bencana tahun 2024 masih mencapai 91,54 %.



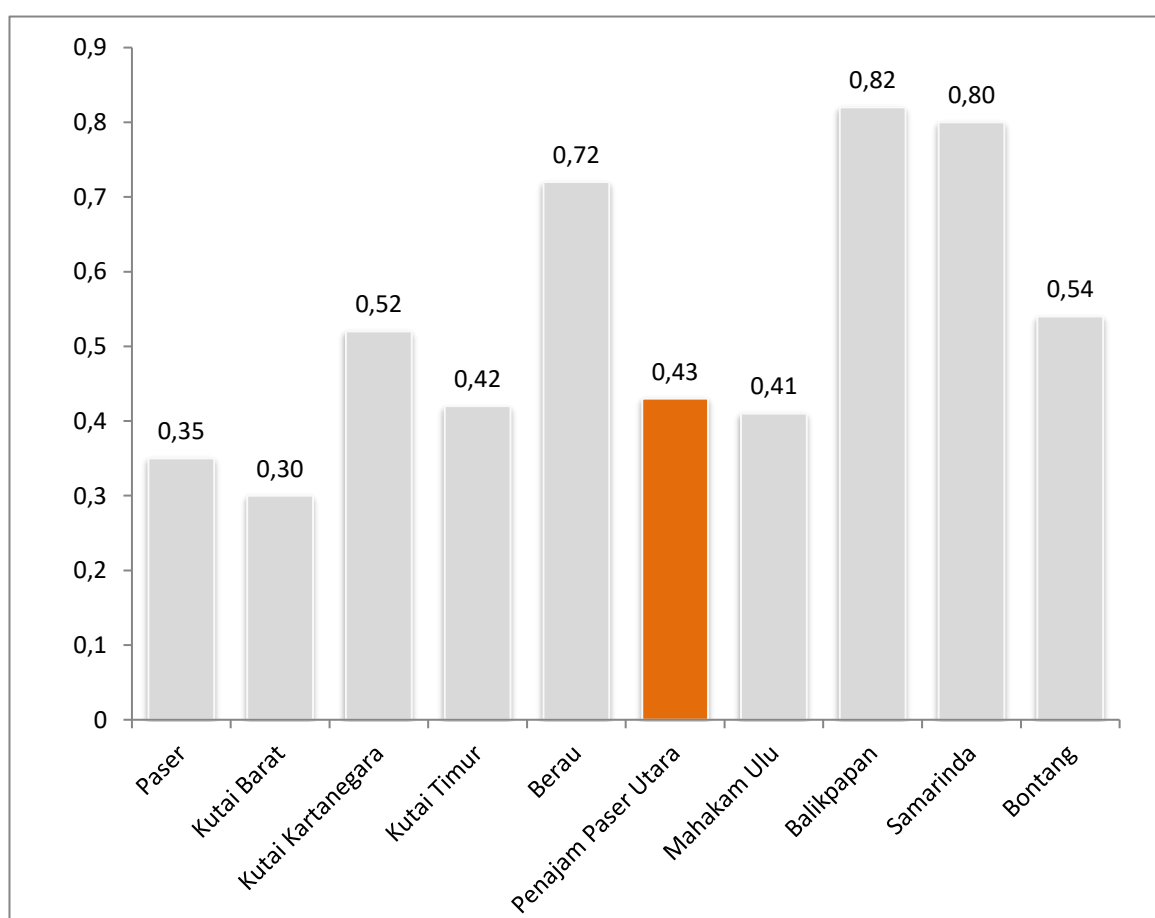
**Grafik 3.33 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 - 2024**



Dari grafik di atas terlihat tren Indeks Risiko Bencana yang turun, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara telah berhasil mengurangi atau menekan risiko bencana.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana, antara lain dengan meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana. Indeks Kapasitas Daerah meliputi penilaian terhadap 7 prioritas. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah berupaya dalam meningkatkan keberhasilan capaian 7 prioritas tersebut, terutama prioritas ke-2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, prioritas ke-3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, dan prioritas ke-6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Untuk prioritas ke-5 Penanganan Efektivitas Pencegahan dan Mitigas Bencana serta prioritas ke-7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana perlu peningkatan upaya yang lebih dalam peningkatannya. Indeks Kapasitas Daerah merupakan upaya mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana.

**Grafik 3.34 Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/ Kota seKalimantan Timur Tahun 2024**



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2024



Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebesar 0,43 (kategori sedang) menurun jika dibandingkan tahun 2023 dengan IKD sebesar 0,54. Nilai IKD Kabupaten Penajam Paser Utara berada pada urutan ke-6 tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota seKalimantan Timur.

Strategi ke depan yang untuk menurunkan Indeks Risiko Bencana dapat dilakukan melalui mitigasi, kesiapsiagaan, dan penguatan kapasitas daerah, yaitu:

1. Menghidupkan kembali fungsi hutan;
2. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;
3. Membuat alarm bencana;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
5. Meningkatkan ketahanan daerah dan ketahanan sumber daya masyarakat;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Ketahanan Kebencanaan, yaitu :

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
3. Program Penanggulangan Bencana.

### **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis Peningkatan Ketahanan Kebencanaan dengan pagu anggaran Rp 35.079.043.998,00 terealisasi Rp 34.340.437.804,00 sehingga capaian realisasi anggaran 97,89 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 94,83 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar -3,23 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.



**Tabel 3.25 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis  
Peningkatan Ketahanan Kebencanaan**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Ketahanan Kebencanaan</b>	35.079.043.998,00	34.340.437.804,00	97,89	94,83	-3,23
<b>Indeks Risiko Bencana</b>					
1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.476.401.480,00	2.416.863.684,00			
2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	24.932.510.894,00	24.506.458.567,00			
3 Program Penanggulangan Bencana	7.670.131.624,00	7.417.115.553,00			

## SASARAN 14

### Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap Target Akhir RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.14.1	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	59,69 %	64	64,23	100,36	67	95,87
5.14.2	Persentase Jalan Mantap	32,54 %	28	33,38	119,21	32	104,31
Rata-rata Capaian Kinerja					<b>109,79</b>		<b>100,09</b>

#### 5.14.1. Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan luas bangunan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus berupaya menyediakan RLH bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

Jumlah RTLH di Kabupaten Penajam Paser Utara menurut data e-RTLH sebanyak 1.666 unit. Dari 1.666 unit RTLH telah dilakukan penanganan sebanyak 1.070 unit sampai dengan tahun 2024. Penanganan RTLH selain bersumber dari dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara, dan melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dari APBD Provinsi Kalimantan Timur, serta melalui Program Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya dari APBN.

Persentase Pemenuhan RLH tahun 2024 ditargetkan 64 %, terealisasi 64,23 % dengan capaian kinerja sebesar 100,36 % atau dengan kategori capaian Sangat Memuaskan. Realisasi Persentase Pemenuhan RLH tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Realisasi tahun 2024 ini telah mencapai 95,87 % dari target akhir RPD tahun 2026 (67 %).

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni, antar lain:

1. Memberikan bantuan stimulan untuk meningkatkan kualitas RTLH;
2. Memfasilitasi alternatif pembiayaan perumahan;
3. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.



Bantuan Perumahan Korban Bencana

#### 5.14.2. Persentase Jalan Mantap

Jalan Kondisi Baik/ Mantap adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2024 tercatat sepanjang 1.179,47 km. Jalan tersebut terdiri dari jalan negara sepanjang 140,5 km, jalan provinsi sepanjang 7,58 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.031,39 km.



Infrastuktur jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan kondisi yang belum maksimal. Tahun 2024 panjang jalan dengan kondisi jalan baik (mantap) sebesar 33,38 %, sedangkan 66,62 % lainnya masih termasuk kondisi jalan sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Panjang jalan kabupaten berada dalam kondisi baik sepanjang 296,40 Km, kondisi sedang 68,52 Km, rusak 24,38 Km, dan rusak berat 642 Km. Dari target 28 % Persentase Jalan Mantap yang ditetapkan, terealisasi 33,38 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 119,21 % atau dalam kategori kinerja Sangat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD tahun 2026 Persentase Jalan Mantap tahun 2024 telah mencapai target dengan capaian sebesar 104,31 %.



**Tabel 3.26 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (Km) Tahun 2020 - 2024**

Kondisi	2020	2021	2022	2023	2024
1. Baik	456,99	439,20	328,74	285,72	296,40
2. Sedang	482,14	471,78	149,60	49,90	68,52
3. Rusak	137,29	227,52	103,10	9,54	24,38
4. Rusak Berat	147,61	102,80	662,36	686,23	642
Total	<b>1.224,03</b>	<b>1.241,29</b>	<b>2.275,19</b>	<b>1.031,39</b>	<b>1.031,4</b>

Berdasarkan kondisi infrastruktur jalan tersebut perlu diupayakan untuk meningkatkan kondisi jalan menjadi kondisi baik karena untuk mendorong kegiatan perekonomian membutuhkan aksesibilitas antar wilayah. Peningkatan kondisi jalan semestinya dapat ditingkatkan melalui keberadaan UPT. PU yang ada di setiap kecamatan. UPT. PU membantu mewujudkan kehadiran pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik pada sektor infrastruktur bagi masyarakat, seperti pembangunan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, pengelolaan sumber daya air, dan lain sebagainya.

Strategi ke depan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Persentase Jalan Mantap, antara lain:

- Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan;
- Meningkatkan pengelolaan, pemeliharaan rutin, dan rekonstruksi jalan;
- Melakukan survei kondisi jalan untuk mengetahui kondisi perkerasan, kerusakan, dan tipe perkerasan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti beban lalu lintas, kondisi tanah, dan iklim.



Program yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Peningkatan Pelayanan Infrastruktur, yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
5. Program Penyelenggaraan Jalan.

### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Infrastruktur dengan pagu anggaran Rp 317.824.345.653,00 terealisasi Rp 297.962.539.831,00 sehingga capaian realisasi anggaran 93,75 %. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini sebesar 109,79 %, maka efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 14,61 %. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran sasaran strategis ini berada dalam kategori efisien.

**Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Infrastruktur**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>Peningkatan Pelayanan Infrastruktur</b>	317.824.345.653,00	297.962.539.831,00	93,75	109,79	14,61
Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni					
Persentase Jalan Mantap					
1 Program Pengembangan Perumahan	2.470.198.951,00	2.282.363.670,00			
2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.518.144.600,00	2.508.069.750,00			
3 Program Kawasan Permukiman	1.993.785.970,00	1.975.725.930,00			
4 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	277.894.400,00	241.922.887,00			
5 Program Penyelenggaraan Jalan	310.564.321.732,00	290.954.457.594,00			

Secara umum seluruh tujuan dan sasaran yang ada di tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada masing-masing indikator. Dari 5 tujuan dan 14 sasaran yang ada, tercapai dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi. Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran sebesar 382,83 persen dengan interpretasi *“sangat memuaskan”*. Demikian juga dengan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target akhir RPD tahun 2026,



tercapai dengan ***"sangat memuaskan"*** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 359,75.

Perolehan rata-rata nilai kinerja tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.28 Perolehan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024**

Tujuan/ Sasaran		% Capaian	Interpretasi	2024 Terhadap Target Akhir RPD
<b>Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan</b>		100,92	Sangat Memuaskan	98,90
	Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	146,84	Sangat Memuaskan	<b>70,19</b>
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	101,47	Sangat Memuaskan	<b>98,80</b>
	Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	100	Sangat Memuaskan	<b>95,12</b>
<b>Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM</b>		100,52	Sangat Memuaskan	<b>99,92</b>
	Peningkatan Kualitas Pendidikan	97,57	Sangat Memuaskan	<b>89,97</b>
	Peningkatan Kualitas Kesehatan	97,29	Sangat Memuaskan	<b>93,35</b>
	Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	-	-	-
	Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan	287,88	Sangat Memuaskan	<b>172,73</b>
<b>Tujuan 3. Meningkatkan Standar Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>		102,33	Sangat Memuaskan	<b>100,13</b>
	Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	91,92	Sangat Memuaskan	<b>82,21</b>
	Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik	100,02	Sangat Memuaskan	<b>92,78</b>
<b>Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing</b>		88,03	Memuaskan	306,80
	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian	83,11	Memuaskan	686,54
	Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah	356,14	Sangat Memuaskan	346,81
<b>Tujuan 5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan</b>		-	-	-
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	99,09	Sangat Memuaskan	98,80
	Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	94,83	Sangat Memuaskan	91,54
	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	109,79	Sangat Memuaskan	100,09
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan</b>		<b>391,80</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>	<b>151,4</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran</b>		<b>135,84</b>	<b>Sangat Memuaskan</b>	<b>162,99</b>





Efektivitas dan efisiensi alokasi belanja Negara dengan mengacu kepada penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Belanja daerah digunakan untuk mendukung berbagai agenda kebijakan strategis dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Belanja daerah diutamakan pada program prioritas yang mendesak untuk segera dilaksanakan berupa agenda pembangunan yang mempunyai dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sebesar Rp 2.954.879.411.645,00, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp 145.211.298.008,00, Pendapatan Transfer Rp 2.762.111.375.637,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 47.556.738.000,00.

Berdasarkan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024 *unaudited* dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa komposisi belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2024 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Jumlah pagu anggaran belanja daerah setelah perubahan tahun 2024 sebesar Rp 3.199.582.729.663,00, dan realisasinya sebesar Rp 3.022.662.819.491,22 atau mencapai 94,47 %, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.29 Komposisi Belanja Tahun Anggaran 2024**

No.	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	1.786.188.767.491,00	1.678.694.216.328,44	93,98%
2	Belanja Modal	1.236.073.913.800,00	1.175.765.469.045,78	95,12%
3	Belanja Tak Terduga	9.089.139.681,00	138.053.926,00	1,52%
4	Belanja Transfer	168.230.908.691,00	168.065.080.191,00	99,90%
<b>Total</b>		<b>3.199.582.729.663,00</b>	<b>3.022.662.819.491,22</b>	<b>94,47%</b>

Efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan beserta realisasi anggaran di tahun 2024 secara umum rata-rata berada dalam kategori efisien. Jika rasio efisien -20 % sampai 20 %, maka penggunaan anggaran, maka dari 14 sasaran yang ada terdapat 10 sasaran dalam kategori efisien, 3 sasaran dalam kategori inefisien, dan 1 sasaran tidak dapat diukur persentasenya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tiga (3) sasaran yang dalam kategori inefisien menjadi bahan evaluasi dalam pencermatan penentuan target di dalam dokumen perencanaan, dimana target harus dapat dicapai namun tetap menantang.

**Tabel 3.30 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran  
Sasaran Strategis Kabupaten Penajam Paser Utara 2024**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan</b>	9.133.288.141,00	8.991.308.777,00	98,45	146,84	32,96
<b>Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial</b>					
Program Rehabilitasi Sosial	1.768.844.708,00	1.735.708.784,00			
Program Pemberdayaan Sosial	915.034.292,00	899.456.796,00			
Program perlindungan dan jaminan sosial	3.070.848.540,00	3.025.023.917,00			
Program Penanganan Bencana	2.957.585.833,00	2.927.672.380,00			
Program Penanganan Kerawanan Pangan	420.974.768,00	403.446.900,00			
<b>2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	32.253.971.903,00	28.821.896.916,08	89,36	101,47	11,94
<b>Indeks Desa Membangun</b>					
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.205.355.144,00	1.867.877.790,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.081.937.663,00	18.638.078.205,08			
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	286.002.703,00	243.622.900,00			





Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.305.552.778,00	2.903.288.988,00			
Program Penataan Desa	4.759.053.772,00	4.583.085.875,00			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	616.069.843,00	585.943.158,00			
<b>3. Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja</b>	27.650.238.810,00	26.167.384.598,00	94,64	100	5,36
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>					
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.436.201.600,00	14.340.365.473,00			
Program Penempatan Tenaga Kerja	279.000.000,00	277.109.879,00			
Program Hubungan Industrial	2.413.500.000,00	2.357.181.478,00			
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.388.558.444,00	3.187.995.307,00			
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	482.035.001,00	427.890.161,00			
Program Pengembangan UMKM	5.650.943.765,00	5.576.842.300,00			
<b>4. Peningkatan Kualitas Pendidikan</b>	275.479.556.153,00	267.826.623.369,59	97,22	97,57	0,36
<b>Harapan Lama Sekolah</b>					
<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>					
Program Pengelolaan Pendidikan	275.229.672.616,00	267.587.409.559,59			
Program Pengembangan Kurikulum	249.883.537,00	239.213.810,00			
<b>5. Peningkatan Kualitas Kesehatan</b>	276.727.141.818,00	258.503.664.060,20	93,41	97,29	3,98
<b>Usia Harapan Hidup</b>					
<b>Prevalensi Stunting</b>					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	272.621.307.334,00	254.895.294.507,20			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.248.798.020,00	1.144.389.416,00			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	434.131.000,00	311.066.000,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	837.692.461,00	662.081.592,00			
Program Pengawasan Keamanan Pangan	174.334.833,00	170.464.197,00			
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.410.878.170,00	1.320.368.348,00			
<b>6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender</b>	5.710.945.584,00	5.223.017.098,00	91,46	-	-
<b>Indeks Pembangunan Gender</b>					
Program Pengendalian Penduduk	389.973.855,00	349.578.120,00			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.176.590.429,00	1.149.786.947,00			
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	958.379.272,00	940.213.967,00			
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	28.157.715,00	27.712.775,00			
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	66.127.729,00	58.041.200,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	305.755.537,00	276.509.393,00			
Program Perlindungan Khusus Anak	442.990.403,00	293.259.655,00			
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.713.684.447,00	1.585.009.373,00			
Program Perlindungan Perempuan	629.286.197,00	542.905.668,00			
<b>7. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan</b>	60.325.478.597,00	54.456.056.874,00	97,29	287,88	68,64
<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan</b>					
Program Pengembangan Kebudayaan	1.762.925.456,00	1.751.560.381,00			
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	721.943.000,00	718.000.440,00			
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	75.000.000,00	72.550.085,00			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.585.434.287,00	982.015.143,00			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	18.086.754.519,00	15.460.691.558,00			
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.387.665.020,00	2.265.419.459,00			
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	191.392.750,00	181.655.830,00			
Program PEMBINAAN dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	762.145.653,00	717.777.615,00			
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	599.195.782,00	573.020.897,00			
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	30.306.446.084,00	27.989.471.751,00			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.846.576.046,00	2.743.893.715,00			
<b>8. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>	6.622.012.768,00	5.241.610.830,00	79,15	91,92	13,89
<b>Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah</b>					
<b>Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>					
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.961.017.295,00	1.689.841.994,00			
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.242.139.978,00	1.046.751.742,00			
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.418.855.495,00	2.505.017.094,00			
<b>9. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik</b>	1.366.458.699.412,80	1.299.588.972.899,00	95,11	100,02	4,91
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>					



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	429.370.000,00	346.324.874,00			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	656.683.522,00	524.362.207,00			
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.583.047.110,00	4.198.827.914,00			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	55.154.963.118,00	54.937.488.691,00			
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	817.967.067,00	644.076.964,00			
Program Pencatatan Sipil	291.665.000,00	279.710.860,00			
Program Pendaftaran Penduduk	407.319.178,00	358.825.500,00			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.202.177.706,00	23.244.949.881,69			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.279.066.160.231,80	1.214.296.526.975,31			
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	118.827.000,00	113.014.883,00			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	730.519.480,00	644.864.149,00			
<b>10. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>72.396.076.483,00</b>	<b>65.186.311.043,35</b>	<b>90,04</b>	<b>83,11</b>	<b>-8,34</b>
<b>LPE Non Pertambangan dan Penggalian</b>					
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.723.019.306,00	3.591.757.250,00			
Program Perizinan Usaha Pertanian	2.214.125.651,00	1.703.715.835,00			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.187.789.099,00	18.516.659.095,00			
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.229.861.708,00	6.934.513.419,35			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.340.159.509,00	1.021.026.482,00			
Program Penyuluhan Pertanian	1.340.571.258,00	1.323.378.725,00			
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	338.406.400,00	256.818.550,00			
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	215.000.000,00	213.978.762,00			
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.669.010.436,00	2.114.531.160,00			
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	54.906.904,00	41.830.266,00			
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9.996.150,00	8.910.000,00			
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.816.780.715,00	2.447.927.331,00			
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	25.410.000,00			
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.504.922.674,00	5.046.181.746,00			
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.486.641.849,00	8.208.551.820,00			
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	311.540.100,00	296.277.985,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
Program Pemasaran Pariwisata	1.793.669.827,00	1.779.719.889,00			
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.248.158.873,00	4.147.093.041,00			
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	128.610.000,00	125.692.119,00			
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	866.526.128,00	864.014.198,00			
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	221.131.427,00	196.245.570,00			
Program Perekonomian dan Pembangunan	6.416.431.039,00	6.095.308.750,00			
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	28.856.000,00	21.093.600,00			
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	219.961.430,00	205.675.450,00			
<b>11. Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah</b>	1.924.191.475,00	1.545.887.107,00	80,34	356,14	77,44
<b>Nilai Realisasi PMDN dan PMA</b>					
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	541.036.080,00	471.406.239,00			
Program Promosi Penanaman Modal	261.633.111,00	177.360.268,00			
Program Pelayanan Penanaman Modal	245.851.085,00	221.398.731,00			
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	199.344.939,00	170.583.809,00			
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	676.326.260,00	505.138.060,00			
<b>12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	36.009.505.542,00	35.291.399.546,00	98,01	99,09	1,09
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>					
Program Pengelolaan Persampahan	8.154.369.965,00	7.953.814.544,00			
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84.791.000,00	65.991.767,00			
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	466.304.000,00	448.370.720,00			
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	787.973.345,00	746.497.963,00			
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	26.002.451.384,00	25.618.311.637,00			
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	11.922.000,00	10.267.200,00			
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.172.000,00	58.357.516,00			



Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5.264.000,00	4.914.500,00			
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	437.257.848,00	384.873.699,00			
<b>13. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan</b>		35.079.043.998,00	34.340.437.804,00	97,89	94,83	-3,23
<b>Indeks Risiko Bencana</b>						
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.476.401.480,00	2.416.863.684,00			
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	24.932.510.894,00	24.506.458.567,00			
	Program Penanggulangan Bencana	7.670.131.624,00	7.417.115.553,00			
<b>14. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur</b>		317.824.345.653,00	297.962.539.831,00	93,75	109,79	14,61
<b>Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni</b>						
<b>Persentase Jalan Mantap</b>						
	Program Pengembangan Perumahan	2.470.198.951,00	2.282.363.670,00			
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.518.144.600,00	2.508.069.750,00			
	Program Kawasan Permukiman	1.993.785.970,00	1.975.725.930,00			
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	277.894.400,00	241.922.887,00			
	Program Penyelenggaraan Jalan	310.564.321.732,00	290.954.457.594,00			



Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai bentuk upaya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pemerintah daerah dalam rangka perwujudan *good governance* dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, dan berkeadilan.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian tujuan atau sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam upayanya mencapai seluruh kinerja yang direncanakan dan ditetapkan pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 14 sasaran strategis diperoleh rata-rata sebesar 162,99 persen, dimana sebanyak 4 sasaran sudah mencapai 100 persen, dan sisanya berada di antara 70 sampai 90 an persen. Sasaran strategis dengan jumlah 26 indikator yang terdiri dari 8 indikator tujuan dan 18 indikator sasaran. Sebanyak 23 indikator atau sebanyak 88,46 persen dalam kategori Sangat Memuaskan, dan 3 indikator atau sebanyak 11,54 persen dalam kategori Memuaskan, sementara 3 indikator tidak dapat ditampilkan hasil realisasinya karena 1 indikator belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik Penajam Paser Utara dan 2 indikator belum dilakukan pengukuran.

Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya anggaran terlihat bahwa upaya mengefektifkan pengelolaan anggaran dengan memaksimalkan pemberdayaan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal sudah diupayakan. Namun, beberapa sasaran masih perlu pencermatan dalam penentuan target disaat menyusun dokumen perencanaan agar terpenuhi sasaran dan indikator yang SMART sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien.

Secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024 sudah sangat baik, namun masih terdapat sasaran yang belum mencapai 100 persen seperti yang ditargetkan. Capaian kinerja yang belum sepenuhnya dapat tercapai 100 persen ini menjadi suatu motivasi untuk dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dari hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024, dapat dirumuskan beberapa strategi solusi ke depan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan sehingga memenuhi kriteria SMART. Terutama pada penentuan target pada indikator kinerja, dimana target harus dapat dicapai namun tetap menantang.
2. Melakukan perbaikan pada dokumen penjenjangan kinerja dari level jabatan tinggi hingga terendah dengan memperhatikan kerangka kerja yang logis, sistematis, dan terukur.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Meningkatkan komitmen semua pihak yang terlibat dalam peningkatan capaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
5. Mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru untuk menciptakan solusi dan meningkatkan kualitas yang membawa perbaikan atau perubahan positif.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2024, sehingga program dan kegiatan pemerintah dapat terlaksana.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel, serta dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024**

Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan			
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1	Persentase Kemiskinan	Persen	6,76 %
2	Rasio Gini	Rasio	0,260
Sasaran Strategis 1.1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan			
	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	Persen	100 %
Sasaran Strategis 1.2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			
	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,8086(Maju) Mandiri : 19 Desa Maju : 11 Desa Berkembang : 0 Desa
Sasaran Strategis 1.3. Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja			
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,05 %
Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM			
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,55
Sasaran Strategis 2.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan			
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,95 Tahun
	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	8,95 Tahun



	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Sasaran Strategis 2.2. Peningkatan Kualitas Kesehatan		
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,25 Tahun
	Prevalensi Stunting	Persen	10,92 %
	Sasaran Strategis 2.3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		87,50 %
	Sasaran Strategis 2.4. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan		
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	Persen	33 %
Tujuan 3. Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	62,85 (Baik)
	Indeks SPBE	Indeks	3 (Baik)
	Sasaran Strategis 3.1. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien		
	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	B
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,30
	Sasaran Strategis 3.2. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik		
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,55
Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing			
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	34,85
	Sasaran Strategis 4.1. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian		
	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	Persen	39,90

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Sasaran Strategis 4.2. Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah		
	Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rupiah	Rp 1.040.366.000.000
Tujuan 5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan			
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	65 (Cukup)
	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	23,30 %
	Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,75
	Sasaran Strategis 5.2. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan		
	Indeks Resiko Bencana	Indeks	125
	Sasaran Strategis 5.3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur		
	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	Persen	64,00 %
	Persentase Jalan Mantap	Persen	28,00 %

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Makmur Marbun, M.Si  
Jabatan : Pj. Bupati Penajam Paser Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Penajam, Januari 2024  
Pj. Bupati Penajam Paser Utara

**Drs. Makmur Marbun, M.Si**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

### PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase Kemiskinan	6,76 %
		Rasio Gini	0,260
		Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial	47,80 %
2	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,30
		Indeks Desa Membangun	0,8086 (Maju) Mandiri : 19 Desa Maju : 11 Desa Berkembang : 0 Desa Tertinggal : 0 Desa Sangat Tertinggal : 0 Desa
3	Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05 %
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,95 Tahun
		Rata - Rata Lama Sekolah	8,95 Tahun

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
5	Peningkatan Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	74,25 Tahun
		Prevalensi Stunting	10,92 %
6	Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,50 %
7	Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	33 %
8	Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62,85 (Baik)
		Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B
9	Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik	Indeks SPBE	3 (Baik)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,55
10	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	34,85 %
		LPE Non Pertambangan dan Penggalian	39,90 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(1)	(2)	(3)
11	Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,30 %
		Nilai Realisasi PMDN & PMA	Rp 1.040.366.000.000
12	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Emisi GRK	23,30 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,75
13	Peningkatan Ketahanan Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	125
14	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	65 (Cukup)
		Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	64,00 %
		Persentase Jalan Mantap	28,00 %

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.162.782.756.337,00
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.019.707.045,00
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	43.205.867.023,00
4	Program Hubungan Industrial	2.413.500.000,00
5	Program Kawasan Permukiman	2.190.000.000,00
6	Program Kepegawaian Daerah	1.994.302.083,00
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.407.561.026,00
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.567.640.000,00
9	Program Pelayanan Penanaman Modal	208.777.282,00
10	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	75.000.000,00
11	Program Pemasaran Pariwisata	1.387.076.212,00
12	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	191.392.750,00
13	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.176.602.315,00
14	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	219.961.430,00
15	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.903.636.247,00
16	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	745.924.030,00
17	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20.643.143.521,00
18	Program Pemberdayaan Sosial	952.194.780,00
19	program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	446.871.001,00
20	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	681.861.228,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
21	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.714.000,00
22	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	762.145.653,00
23	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.694.800.627,00
24	Program Pembinaan Perpustakaan	641.425.740,00
25	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	276.478.587,00
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	228.449.918.165,00
27	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	28.826.380.000,00
28	Program Penanganan Bencana	2.744.006.540,00
29	Program Penanganan Kerawanan Pangan	400.036.518,00
30	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	122.518.250,00
31	Program Penanggulangan Bencana	5.590.008.613,00
32	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	19.947.898.000,00
33	Program Penataan Bangunan Gedung	1.496.661.101,00
34	Program Penataan Desa	805.759.814,00
35	Program Pencatatan Sipil	142.185.000,00
36	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	14.702.724.971,00
37	Program Pendaftaran Penduduk	407.319.178,00
38	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.914.714.897,00
39	Program Penempatan Tenaga Kerja	229.000.000,00
40	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak Mha Yang Terkait dengan PPLH	33.693.234,00



No.	Program	Anggaran (Rp)
41	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	802.722.779,00
42	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	18.856.000,00
43	Program Pengawasan Keamanan Pangan	174.334.833,00
44	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	30.000.000,00
45	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.212.112.115,00
46	Program Pengelolaan Arsip	187.108.515,00
47	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	930.091.757,00
48	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	307.578.045,00
49	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	29.457.733.990,00
50	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.501.693.373,00
51	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	63.071.260,00
52	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	720.849.480,00
53	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	25.995.304.086,00
54	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	12.041.819.976,00
55	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	214.682.431.764,00
56	Program Pengelolaan Pelayaran	16.204.832.580,00
57	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.219.835.073,00
58	Program Pengelolaan Pendidikan	184.962.458.004,00
59	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.137.050.387,00
60	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.119.527.544,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
61	Program Pengelolaan Persampahan	6.523.526.465,00
62	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	40.061.000,00
63	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	56.545.085,00
64	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9.996.150,00
65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	78.859.293.108,00
66	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	170.674.427,00
67	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	177.385.000,00
68	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	599.999.459,00
69	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.001.240.668,00
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	15.591.860.932,00
71	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.684.996.614,00
72	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	500.000.000,00
73	Program Pengembangan Kebudayaan	1.566.149.474,00
74	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	325.000.000,00
75	Program Pengembangan Perumahan	720.000.000,00
76	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	672.738.128,00
77	Program Pengembangan Umkm	2.062.632.565,00
78	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000,00
79	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	984.040.680,00
80	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	54.906.904,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
81	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.034.858.630,00
82	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	199.344.939,00
83	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	521.920.183,00
84	Program Pengendalian Penduduk	313.924.132,00
85	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	298.122.160,00
86	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	291.540.100,00
87	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.307.184.242,00
88	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.073.617.788,00
89	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.059.672.432,00
90	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.248.798.020,00
91	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	236.002.703,00
92	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.769.174.910,00
93	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	549.195.782,00
94	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	28.157.715,00
95	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	28.166.446.084,00
96	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	75.531.789.301,00
97	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.886.998.948,00
98	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.953.512.032,00
99	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.898.088.075,00
100	Program Penyelenggaraan Jalan	279.446.305.916,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
101	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.049.790.594,00
102	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.019.383.240,00
103	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	962.433.978,00
104	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.211.206.689,00
105	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	436.678.000,00
106	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	457.364.128,00
107	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.850.859.574,00
108	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	843.000.000,00
109	Program Penyuluhan Pertanian	1.260.215.267,00
110	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.151.058.117,00
111	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	784.088.403,00
112	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	277.894.400,00
113	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	466.304.000,00
114	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.311.197.157,00
115	Program Perizinan Usaha Pertanian	2.064.251.497,00
116	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.194.617.890,00
117	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	124.988.612,00
118	Program Perlindungan Khusus Anak	383.126.709,00
119	Program Perlindungan Perempuan	642.659.268,00
120	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.108.310.000,00

No.	Program	Anggaran (Rp)
121	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	639.073.004,00
122	Program Promosi Penanaman Modal	135.709.737,00
123	Program Rehabilitasi Sosial	1.629.209.226,00
124	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	434.131.000,00
125	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	367.007.000,00
126	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	215.000.000,00
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>2.675.666.833.000</b>



Penajam, Januari 2024  
Pj. Bupati Penajam Paser Utara

**Drs. Makmur Marbun, M.Si**

# PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Tujuan 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan								
	Indikator Kinerja		Capaian Th. 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap RPD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Kemiskinan		6,97	6,76 %	6,69	101,05	6,62	98,95
2	Rasio Gini		0,299	0,260	0,258	100,78	0,255	98,84
Sasaran Strategis 1.1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Masyarakat Miskin dan Rentan								
	Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/Jaminan Sosial		77,27	100 %	70,19	146,84	100	70,19
Sasaran Strategis 1.2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat								
	Indeks Desa Membangun		0,8052 (Maju) Mandiri : 18 Desa Maju : 12 Desa Berkembang : 0 Desa	0,8086(Maju) Mandiri : 19 Desa Maju : 11 Desa Berkembang : 0 Desa	0,8205 (Mandiri) Mandiri : 21 Desa Maju : 9 Desa Berkembang : 0 Desa	101,47	0,8305 (Mandiri) Mandiri : 25 Desa Maju : 5 Desa	98,80
Sasaran Strategis 1.3. Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja								
	Tingkat Pengangguran Terbuka		2,07	2,05 %	2,05	100	1,95	95,12
Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup SDM								
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		74,33	74,55	74,94	100,52	75,00	99,92
Sasaran Strategis 2.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan								
	Harapan Lama Sekolah		12,86	12,95 Tahun	12,87	99,38	13,85	92,92
	Rata - Rata Lama Sekolah		8,53	8,95 Tahun	8,57	95,75	9,85	87,01

	Indikator Kinerja	Capaian Th. 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap RPD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Sasaran Strategis 2.2. Peningkatan Kualitas Kesehatan						
	Usia Harapan Hidup	74,03	74,25 Tahun	74,27	100,03	74,50	99,69
	Prevalensi Stunting	11,55	10,92 %	11,55	94,55	10,05	87,01
	Sasaran Strategis 2.3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender						
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,93	87,50 %	-	-	87,85	-
	Sasaran Strategis 2.4. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan						
	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan	100	33 %	95	287,88	55	172,73
Tujuan 3. Meningkatkan standar tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik							
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	53,89	62,85 (Baik)	68,5	108,99	65,50	104,58
	Indeks SPBE	2,85 (Baik)	3 (Baik)	2,87 (Baik)	95,67	3 (Baik)	95,67
	Sasaran Strategis 3.1. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien						
	Rata - Rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	B	100	B	100
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	5,37	7,30	6,12	83,84	9,50	64,42
	Sasaran Strategis 3.2. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,51	83,55	83,57	100,02	90,07	92,78
Tujuan 4. Peningkatan Transformasi Ekonomi yang Berdaya Saing							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	29,85	34,85	30,68	88,03	10	306,80
	Sasaran Strategis 4.1. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian						
	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	34,93	39,90	33,16	83,11	4,83	686,54

	Indikator Kinerja		Capaian Th. 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPD (2026)	Capaian 2024 Terhadap RPD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Sasaran Strategis 4.2. Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal di Daerah							
		Nilai Realisasi PMDN & PMA	1.637.143.260.000	Rp 1.040.366.000.000	Rp 3.705.197.869.077	356,14	1.068.366.000.000	239,92
Tujuan 5. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan								
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	-	65 (Cukup)	-	-	70	-
		Persentase Penurunan Emisi GRK	-	23,30 %	-	-	25,50	-
	Sasaran Strategis 5.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup							
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,25	71,75	71,1	99,09	71,96	98,80
	Sasaran Strategis 5.2. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan							
		Indeks Resiko Bencana	129,44	125	131,81	94,83	120,66	91,54
	Sasaran Strategis 5.3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur							
		Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	59,69	64,00 %	64,23	100,36	67	95,87
		Persentase Jalan Mantap	32,54	28,00 %	33,38	119,21	32	104,31



**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  
PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2024**

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>1. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepada Masyarakat Miskin dan Rentan</b>	9.133.288.141,00	8.991.308.777,00	98,45	146,84	32,96
<b>Persentase Masyarakat Miskin Mendapat Bantuan/ Jaminan Sosial</b>					
Program Rehabilitasi Sosial	1.768.844.708,00	1.735.708.784,00			
Program Pemberdayaan Sosial	915.034.292,00	899.456.796,00			
Program perlindungan dan jaminan sosial	3.070.848.540,00	3.025.023.917,00			
Program Penanganan Bencana	2.957.585.833,00	2.927.672.380,00			
Program Penanganan Kerawanan Pangan	420.974.768,00	403.446.900,00			
<b>2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</b>	32.253.971.903,00	28.821.896.916,08	89,36	101,47	11,94
<b>Indeks Desa Membangun</b>					
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.205.355.144,00	1.867.877.790,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.081.937.663,00	18.638.078.205,08			
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	286.002.703,00	243.622.900,00			
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.305.552.778,00	2.903.288.988,00			
Program Penataan Desa	4.759.053.772,00	4.583.085.875,00			
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	616.069.843,00	585.943.158,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>3. Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Tenaga Kerja</b>	27.650.238.810,00	26.167.384.598,00	94,64	100	5,36
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>					
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	15.436.201.600,00	14.340.365.473,00			
Program Penempatan Tenaga Kerja	279.000.000,00	277.109.879,00			
Program Hubungan Industrial	2.413.500.000,00	2.357.181.478,00			
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.388.558.444,00	3.187.995.307,00			
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	482.035.001,00	427.890.161,00			
Program Pengembangan UMKM	5.650.943.765,00	5.576.842.300,00			
<b>4. Peningkatan Kualitas Pendidikan</b>	275.479.556.153,00	267.826.623.369,59	97,22	97,57	0,36
<b>Harapan Lama Sekolah</b>					
<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>					
Program Pengelolaan Pendidikan	275.229.672.616,00	267.587.409.559,59			
Program Pengembangan Kurikulum	249.883.537,00	239.213.810,00			
<b>5. Peningkatan Kualitas Kesehatan</b>	276.727.141.818,00	258.503.664.060,20	93,41	97,29	3,98
<b>Usia Harapan Hidup</b>					
<b>Prevalensi Stunting</b>					
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	272.621.307.334,00	254.895.294.507,20			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.248.798.020,00	1.144.389.416,00			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	434.131.000,00	311.066.000,00			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	837.692.461,00	662.081.592,00			
Program Pengawasan Keamanan Pangan	174.334.833,00	170.464.197,00			

	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.410.878.170,00	1.320.368.348,00		
<b>6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender</b>		5.710.945.584,00	5.223.017.098,00	91,46	-
	<b>Indeks Pembangunan Gender</b>				
	Program Pengendalian Penduduk	389.973.855,00	349.578.120,00		
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.176.590.429,00	1.149.786.947,00		
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	958.379.272,00	940.213.967,00		
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	28.157.715,00	27.712.775,00		
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	66.127.729,00	58.041.200,00		
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	305.755.537,00	276.509.393,00		
	Program Perlindungan Khusus Anak	442.990.403,00	293.259.655,00		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.713.684.447,00	1.585.009.373,00		
	Program Perlindungan Perempuan	629.286.197,00	542.905.668,00		
<b>7. Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan yang Berwawasan Kebangsaan</b>		60.325.478.597,00	54.456.056.874,00	97,29	287,88
	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, Kebudayaan dan Kemasyarakatan</b>				
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.762.925.456,00	1.751.560.381,00		
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	721.943.000,00	718.000.440,00		
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	75.000.000,00	72.550.085,00		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.585.434.287,00	982.015.143,00		

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	18.086.754.519,00	15.460.691.558,00			
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	2.387.665.020,00	2.265.419.459,00			
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	191.392.750,00	181.655.830,00			
	Program PEMBINAAN dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	762.145.653,00	717.777.615,00			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	599.195.782,00	573.020.897,00			
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	30.306.446.084,00	27.989.471.751,00			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.846.576.046,00	2.743.893.715,00			
<b>8. Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>		6.622.012.768,00	5.241.610.830,00	79,15	91,92	13,89
<b>Rata-rata Capaian SAKIP Perangkat Daerah</b>						
<b>Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>						
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.961.017.295,00	1.689.841.994,00			
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.242.139.978,00	1.046.751.742,00			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.418.855.495,00	2.505.017.094,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
<b>9. Peningkatan Pelayanan Prima Kepada Publik</b>	1.366.458.699.412,80	1.299.588.972.899,00	95,11	100,02	4,91
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>					
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	429.370.000,00	346.324.874,00			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	656.683.522,00	524.362.207,00			
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.583.047.110,00	4.198.827.914,00			
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	55.154.963.118,00	54.937.488.691,00			
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	817.967.067,00	644.076.964,00			
Program Pencatatan Sipil	291.665.000,00	279.710.860,00			
Program Pendaftaran Penduduk	407.319.178,00	358.825.500,00			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24.202.177.706,00	23.244.949.881,69			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.279.066.160.231,80	1.214.296.526.975,31			
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	118.827.000,00	113.014.883,00			
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	730.519.480,00	644.864.149,00			
<b>10. Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Non Pertambangan dan Penggalian</b>	72.396.076.483,00	65.186.311.043,35	90,04	83,11	-8,34
<b>LPE Non Pertambangan dan Penggalian</b>					
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3.723.019.306,00	3.591.757.250,00			
Program Perizinan Usaha Pertanian	2.214.125.651,00	1.703.715.835,00			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	22.187.789.099,00	18.516.659.095,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.229.861.708,00	6.934.513.419,35			
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.340.159.509,00	1.021.026.482,00			
	Program Penyuluhan Pertanian	1.340.571.258,00	1.323.378.725,00			
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	338.406.400,00	256.818.550,00			
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	215.000.000,00	213.978.762,00			
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.669.010.436,00	2.114.531.160,00			
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	54.906.904,00	41.830.266,00			
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	9.996.150,00	8.910.000,00			
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.816.780.715,00	2.447.927.331,00			
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	25.410.000,00			
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.504.922.674,00	5.046.181.746,00			
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	8.486.641.849,00	8.208.551.820,00			
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	311.540.100,00	296.277.985,00			
	Program Pemasaran Pariwisata	1.793.669.827,00	1.779.719.889,00			
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.248.158.873,00	4.147.093.041,00			
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	128.610.000,00	125.692.119,00			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	866.526.128,00	864.014.198,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	221.131.427,00	196.245.570,00			
	Program Perekonomian dan Pembangunan	6.416.431.039,00	6.095.308.750,00			
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	28.856.000,00	21.093.600,00			
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	219.961.430,00	205.675.450,00			
<b>11. Optimalisasi Capaian Investasi/ Penanaman Modal Investor di Daerah</b>		1.924.191.475,00	1.545.887.107,00	80,34	356,14	77,44
<b>Nilai Realisasi PMDN dan PMA</b>						
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	541.036.080,00	471.406.239,00			
	Program Promosi Penanaman Modal	261.633.111,00	177.360.268,00			
	Program Pelayanan Penanaman Modal	245.851.085,00	221.398.731,00			
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	199.344.939,00	170.583.809,00			
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	676.326.260,00	505.138.060,00			
<b>12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>		36.009.505.542,00	35.291.399.546,00	98,01	99,09	1,09
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>						
	Program Pengelolaan Persampahan	8.154.369.965,00	7.953.814.544,00			
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84.791.000,00	65.991.767,00			
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	466.304.000,00	448.370.720,00			
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	787.973.345,00	746.497.963,00			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	26.002.451.384,00	25.618.311.637,00			

Sasaran Strategis/ Indikator/ Program		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	% Efisiensi
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	11.922.000,00	10.267.200,00			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.172.000,00	58.357.516,00			
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5.264.000,00	4.914.500,00			
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	437.257.848,00	384.873.699,00			
<b>13. Peningkatan Ketahanan Kebencanaan</b>		35.079.043.998,00	34.340.437.804,00	97,89	94,83	-3,23
<b>Indeks Risiko Bencana</b>						
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.476.401.480,00	2.416.863.684,00			
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	24.932.510.894,00	24.506.458.567,00			
	Program Penanggulangan Bencana	7.670.131.624,00	7.417.115.553,00			
<b>14. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur</b>		317.824.345.653,00	297.962.539.831,00	93,75	109,79	14,61
<b>Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni</b>						
<b>Persentase Jalan Mantap</b>						
	Program Pengembangan Perumahan	2.470.198.951,00	2.282.363.670,00			
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.518.144.600,00	2.508.069.750,00			
	Program Kawasan Permukiman	1.993.785.970,00	1.975.725.930,00			
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	277.894.400,00	241.922.887,00			
	Program Penyelenggaraan Jalan	310.564.321.732,00	290.954.457.594,00			